

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
(Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

DESY VITA FITRIANINGRUM

0210310023



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2006**

ABSTRAKSI

Desy Vita Fitrianingrum, 2006. **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang)**.
Dr. Abdul Yuli Andi Gani, M.Si dan Drs. Tri Laksono Nugroho, M.S. 223 hal + xix.

Sebagai salah satu kawasan wisata di Daerah Tujuan Wisata Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki cukup banyak obyek dan daya tarik wisata yang mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan. Dalam meningkatkan potensi pariwisata pantai selatan Kabupaten Malang, telah dipilih satu obyek wisata andalan yang menjadi program prioritas untuk meningkatkan potensi wisata Kabupaten Malang, yaitu Pantai Balekambang. Dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata, pemerintah perlu menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah dalam sektor pariwisata, yaitu rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang. Perencanaan dalam pengembangan pariwisata bertujuan agar pengembangan pariwisata yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sektor pariwisata, serta perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Malang dengan situs penelitian antara lain pada kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Unit Wisata Pantai Balekambang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, obyek wisata Pantai Balekambang, serta masyarakat disekitar kawasan wisata Pantai Balekambang. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat tulis-menulis. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan sesuai fokus bahwa kawasan wisata Pantai Balekambang mempunyai potensi dan daya tarik wisata, baik wisata alamnya yang berupa pantai maupun wisata budaya yang berupa Upacara Jalanidhipuja dan Upacara Suroan. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang telah memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pariwisata yang ada. Pengembangan yang sudah dilaksanakan pada kawasan wisata Pantai Balekambang dengan berpedoman pada Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang, baru tahap 1 dan 2 yang sudah mulai berjalan. Sedangkan untuk tahap 3 dan 4 belum berjalan. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengembangan internal

mengenai pentingnya pelayanan kepada pengunjung serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Upaya promosi dan pemasaran wisata Pantai Balekambang dilaksanakan dengan pembuatan buku dan brosur tentang kepariwisataan dalam dua bahasa; kerjasama dengan Departemen Pariwisata, hotel, *Tourist Information Service* (TIS), media cetak maupun elektronik; mengikuti pameran wisata; pemilihan duta wisata; serta membentuk Kelompok-Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah sekitar obyek wisata dengan berpedoman pada terciptanya program Sapta Pesona. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, faktor-faktor pendukung pengembangan meliputi karakteristik obyek; dibukanya jalur Malang Selatan; peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar obyek wisata; UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; serta jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dana; kondisi jalan menuju obyek yang rusak; belum adanya kerjasama dengan biro perjalanan; kurangnya investor; suasana yang kurang kondusif; faktor bencana alam; status tanahnya masih dikelola oleh Perhutani; serta air bersih di lokasi wisata belum memenuhi syarat.

Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti antara lain : (1) Pihak pengelola obyek wisata Pantai Balekambang perlu meningkatkan pelayanan pada saat diadakannya even-even tradisional; (2) Penambahan frekuensi promosi menjadi dua kali dalam satu bulan; (3) Pembenahan terhadap aksesibilitas jalan yang rusak antara Gondanglegi – Balekambang melalui koordinasi dengan Dinas Bina Marga; (4) Kerjasama dengan investor dalam mengelola Pantai Balekambang dengan menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan memberikan kemudahan dalam hal perizinan; (5) Kerjasama dengan biro perjalanan; (6) Koordinasi dengan Dinas Perindustrian untuk memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat sekitar obyek dalam hal pembuatan cinderamata; (7) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wisata; (8) Peningkatan kebersihan dengan menggerakkan para pegawai yang ada untuk membersihkan areal di dalam kawasan wisata Pantai Balekambang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang)”**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, M.A sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Sukanto, M.S sebagai Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Abdul Yuli Andi Gani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan berdiskusi dengan penulis; sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan pada penulis untuk maju selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak Drs. Tri Laksono Nugroho, M.S sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memotivasi penulis dengan kesabaran; sekaligus sebagai Dosen Pendamping kelas ganjil angkatan 2002 S1 Reguler Jurusan Administrasi Publik pada saat studi ekskursi ke Jakarta, Bandung, dan Yogya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

7. Bapak Drs. Arief Setyadi, terima kasih telah memberikan beberapa masukan yang berarti dan pencerahan pada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Soewardi, B.E sebagai Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencanaan Kabupaten Malang dan Bapak Drs. M. Nur Fuad Fauzi, M.T sebagai Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup.
9. Bapak Drs. Achmad Zakaria, M.M sebagai Kepala Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan Bapak Drs. Bendut Isriyanto sebagai Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata.
10. Bapak Drs. Rakhmat Hermawan sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dan Bapak Suyono sebagai Kepala Seksi Promosi.
11. Bapak Sunardi sebagai Kepala Unit Wisata Pantai Balekambang; Ibu Sarminah sebagai Staf Administrasi, dan Bapak Yasdi sebagai Staf Bendahara Pembantu.
12. Keluarga penulis, terutama ayah, ibu, kakak dan adikku yang telah menyayangi penulis serta atas doa, motivasi, perhatian, dan pengorbanan, yang telah diberikan pada penulis hingga saat ini.
13. Teman-temanku seperjuanganku, angkatan 2002 S1 Reguler Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan teman-teman kost, yang telah mengisi hari-hari penulis selama kuliah dengan semangat, keceriaan, dan persahabatannya.

Sebagaimana proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan yang konstruktif, baik dari Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji serta pihak-pihak lain yang dapat membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi ini selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya, dan sebagai masukan yang berguna bagi pembaca pada umumnya.

Malang, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perencanaan Pembangunan	17
1. Pengertian Perencanaan	17
2. Pengertian Pembangunan	18
3. Pengertian Perencanaan Pembangunan	19
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	20
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah	20
2. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah	21
3. Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah	22
4. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah	23
C. Sektor Pariwisata	23
1. Pengertian Pariwisata	23
2. Jenis-jenis Obyek Wisata	25
3. Sarana dan Prasarana Pariwisata	26
4. Pemasaran Pariwisata	29
5. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan	30
6. Fungsi dan Peranan Pemerintah Daerah dalam Sektor Pariwisata	32
D. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	34
1. Proses Perencanaan Pariwisata	34
2. Prinsip-prinsip Perencanaan Pariwisata	35
3. Pengembangan Pariwisata	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

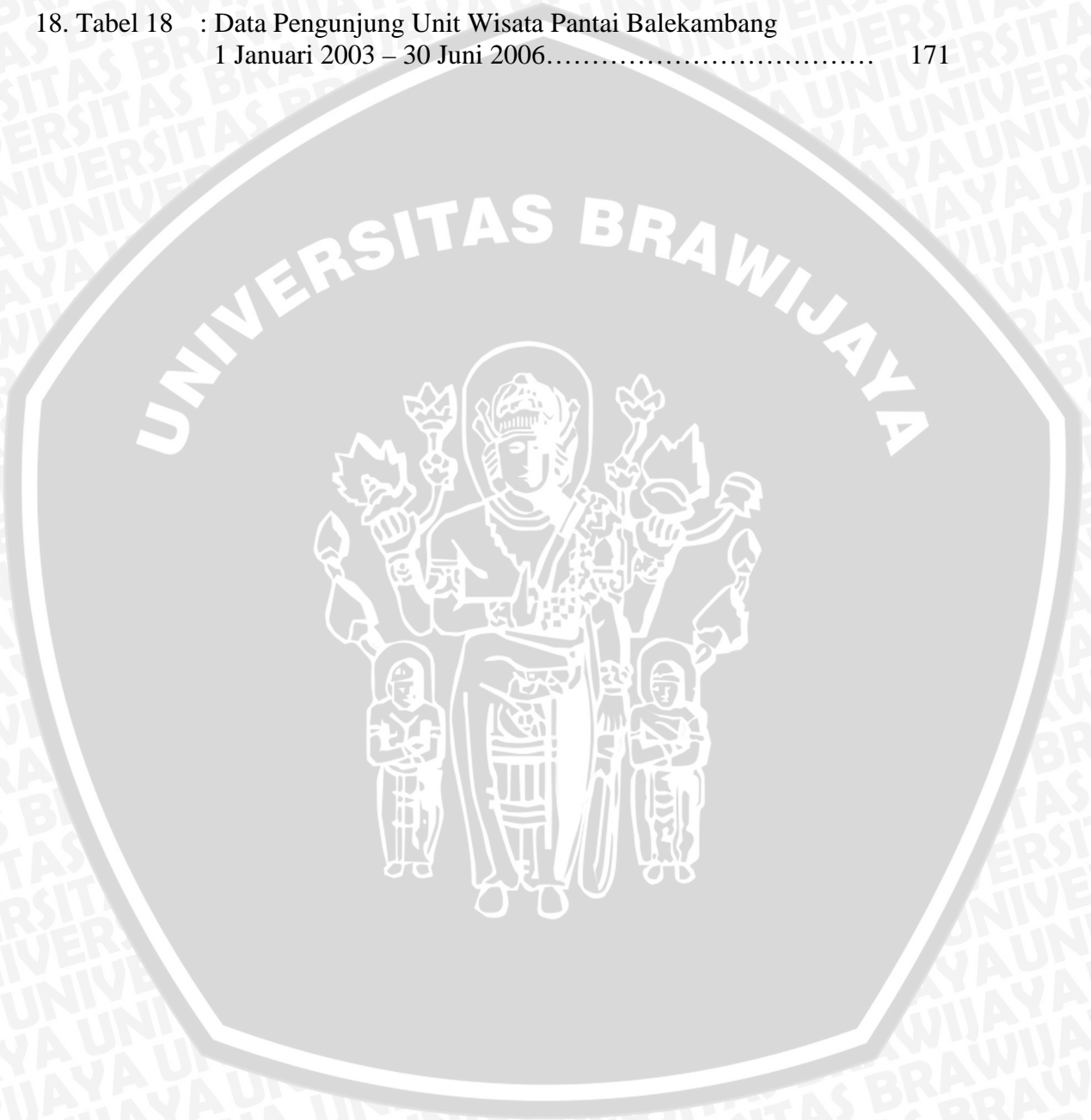
A. Penyajian Data Penelitian.....	53
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	53
II. Gambaran Umum Situs Penelitian	58
1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Kabupaten Malang ..	58
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang	60
3. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Jasa Yasa dan Unit Wisata Balekambang.....	63
4. Gambaran Umum Pantai Balekambang	65
III. Penyajian Data Fokus.....	68
1. Kondisi Potensi Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Balekambang	68
a. Jenis Wisata dan Obyek Wisata	69
b. Sarana dan Prasarana Wisata	72
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Balekambang	72
a. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pengembangan.....	72
b. Bentuk dan Langkah Perencanaan Pengembangan.....	73
3. Pengembangan Pariwisata yang Telah dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang	150
a. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata	150
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wisata	153
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	159
d. Upaya Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	162
4. Faktor-Faktor Pendukung dan Kendala-Kendala dalam Pengembangan Pariwisata yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang	167
a. Faktor-Faktor Pendukung	167
b. Kendala-Kendala.....	172

B. Analisis Data.....	179
1. Kondisi Potensi Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Balekambang	179
a. Jenis Wisata dan Obyek Wisata	179
b. Sarana dan Prasarana Wisata	182
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Balekambang	183
a. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pengembangan.....	183
b. Bentuk dan Langkah Perencanaan Pengembangan.....	185
3. Pengembangan Pariwisata yang Telah dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang.....	201
a. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata	201
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wisata	202
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	204
d. Upaya Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	205
4. Faktor-Faktor Pendukung dan Kendala-Kendala dalam Pengembangan Pariwisata yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang.....	210
a. Faktor-Faktor Pendukung	210
b. Kendala-Kendala.....	214
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	218
B. Saran.....	222
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

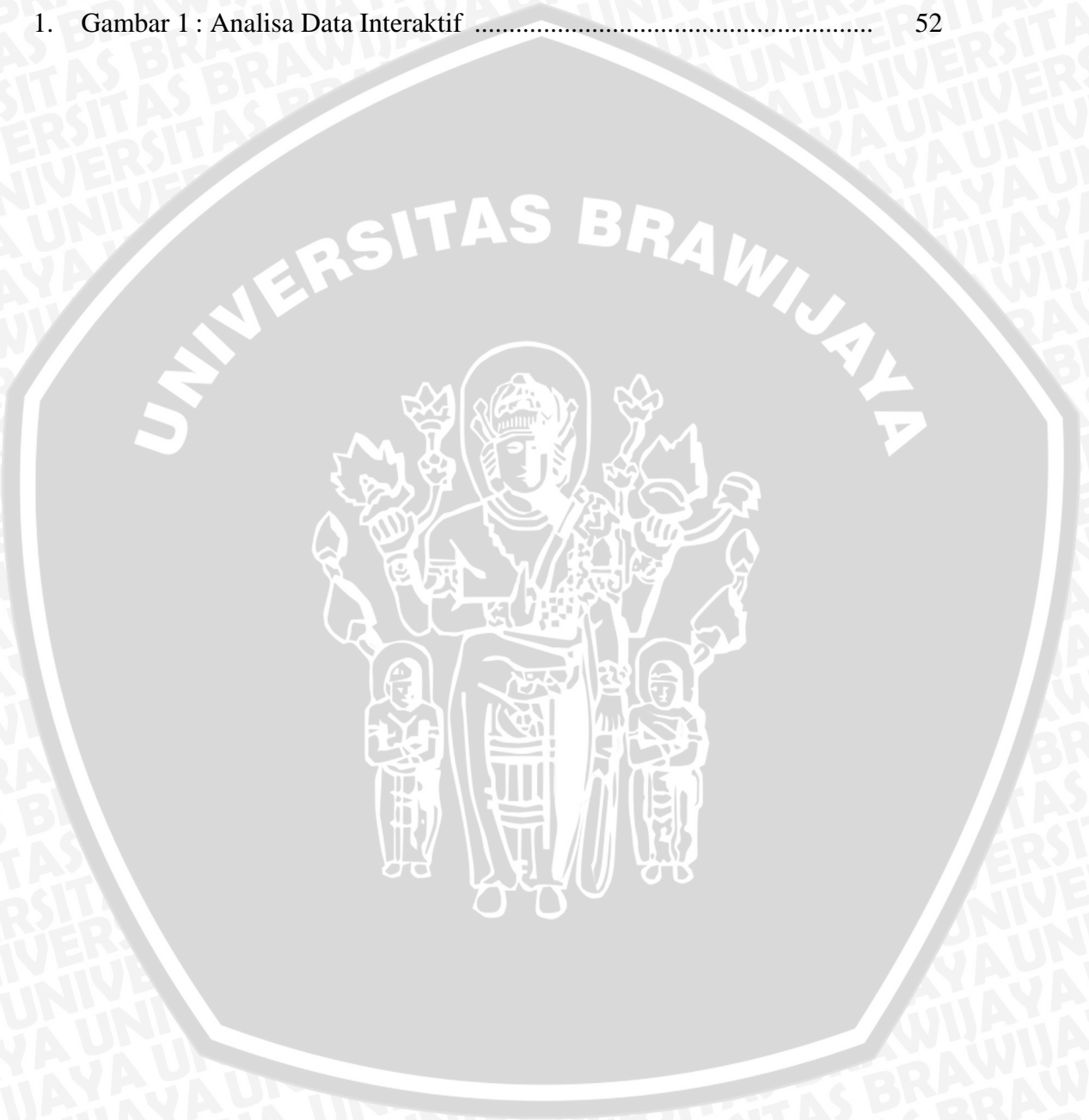
No	Judul	Hal
1.	Tabel 1 : Prioritas Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Malang.....	55
2.	Tabel 2 : Akomodasi Penunjang Wisata Kabupaten Malang.....	56
3.	Tabel 3 : Restoran Penunjang Wisata Kabupaten Malang.....	57
4.	Tabel 4 : Kalender Kegiatan Pendukung Wisata di Kabupaten Malang.....	58
5.	Tabel 5 : Kondisi Obyek Wisata Pantai Balekambang.....	68
6.	Tabel 6 : Jumlah Penduduk Kecamatan Bantur Tahun 2005.....	95
7.	Tabel 7 : Jenis Tanaman yang Dapat Ditanam di Pantai Balekambang.....	105
8.	Tabel 8 : Potensi dan Masalah Obyek Wisata Pantai Balekambang.....	106
9.	Tabel 9 : Pengaturan dan Arahan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Balekambang.....	107
10.	Tabel 10 : Pangsa Pasar dan Atraksi yang Mungkin Dikembangkan di Obyek Wisata pantai Balekambang.....	108
11.	Tabel 11 : Analisis Makro Perkiraan Dampak Lingkungan Hidup Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang.....	134
12.	Tabel 12 : Analisis Makro Perkiraan Dampak Sosial Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang.....	136
13.	Tabel 13 : Analisis Perkiraan Kesempatan Kerja yang Mungkin Timbul Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang.....	137
14.	Tabel 14 : Analisis Perkiraan Kenaikan Tingkat Pendapatan Penduduk Akibat Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang.....	138
15.	Tabel 15 : Analisis Perkiraan Pendapatan Daerah Pada Obyek Wisata Pantai Balekambang.....	139

16. Tabel 16	: Nama dan Jumlah Harga Kamar Penginapan yang Dioperasikan.....	159
17. Tabel 17	: Diklat Personalia Unit Wisata Pantai Balekambang.....	161
18. Tabel 18	: Data Pengunjung Unit Wisata Pantai Balekambang 1 Januari 2003 – 30 Juni 2006.....	171



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Gambar 1 : Analisa Data Interaktif	52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)
2. Lampiran 2 : Peta Wisata Kabupaten Malang
3. Lampiran 3 : Rencana Zoning
4. Lampiran 4 : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pantai Balekambang Tahap I
5. Lampiran 5 : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pantai Balekambang Tahap II
6. Lampiran 6 : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pantai Balekambang Tahap III
7. Lampiran 7 : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pantai Balekambang Tahap IV
8. Lampiran 8 : Foto Obyek Wisata Pantai Balekambang
9. Lampiran 9 : Surat Keterangan Survey dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang
10. Lampiran 10 : Surat Keterangan Survey dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang
11. Lampiran 11 : Surat Keterangan Survey dari Badan Perencanaan Kabupaten Malang
12. Lampiran 12 : *Curriculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini, sistem pemerintahan sangat sentralistik dengan kebijakan yang didominasi oleh pusat (*top-down*). Sedangkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi, maka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Artinya, daerah mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu.

Dengan pemberian hak dan kewenangan kepada daerah tersebut, daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abe, 2002:14).

Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Artinya, daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan agar dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi tersebut. Pemerintah daerah

dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus-menerus menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik (Tjokroamidjojo, 1994:222). Pembangunan daerah dalam konteks pembangunan nasional memiliki kedudukan yang sangat penting. Kegagalan pembangunan daerah akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan nasional. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional harus menjadi perhatian yang serius.

Dilihat dari sudut pandang administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (1994:97) menyatakan :

“Masalah pemerintahan daerah dilihat pula dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi secara konsisten dalam usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya. Hal ini berarti bahwa rencana kebijakan maupun program-program pembangunan nasional harus memperhatikan pertimbangan regional”.

Dengan demikian, pemerintah daerah selain dituntut untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, di sisi lain pembangunan daerah itu harus sejalan dengan pembangunan nasional. Menurut Syahroni (2001:16), pembangunan daerah secara umum memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah;

5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang atau berkelanjutan.

Bila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dalam proses pembangunan akan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Abe, 2002:16). Agar dapat melaksanakan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan secara efektif, maka pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, asas desentralisasi pembangunan daerah memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada semua masyarakat dan semua pelaku (*stakeholders*) di daerah. Masyarakat daerah ikut berperan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakter daerahnya dan potensi sumber daya daerah yang tersedia.

Pembangunan daerah itu sendiri meliputi berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Masing-masing bidang mempunyai beberapa sektor pembangunan. Demikian juga dengan bidang ekonomi, dimana pariwisata merupakan salah satu sektor di dalamnya.

Sejalan dengan uraian diatas, maka dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai konsekuensi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangan di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya, serta menetapkan dan mengusahakan sendiri sumber pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menarik para investor serta memperkenalkan budaya daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009, yang menjadi salah satu agenda pembangunan nasional adalah agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu prioritasnya adalah peningkatan investasi dan ekspor non migas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan devisa, kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan pengembangan produk-produk wisata dan meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, disebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan tahun 2006 adalah peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. Dalam matriks program-program prioritas, dapat diketahui bahwa salah satu arah industrinya adalah meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor dengan kegiatan utamanya adalah promosi pariwisata melalui kegiatan pameran, baik yang bertaraf nasional maupun internasional, fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya, dengan mengedepankan tujuan atau destinasi yang mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dengan instansi pelaksana yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kondisi umum pertumbuhan penerimaan devisa sektor pariwisata pada tahun 2005 adalah sebesar 12,5 %. Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2006 dalam penerimaan devisa dari sektor pariwisata diharapkan meningkat sebesar 16,6 %.

Selama ini terjadi penurunan perolehan devisa ekspor (jasa) pada sektor pariwisata. Meskipun demikian, sektor pariwisata masih merupakan penyumbang

devisa keempat terbesar setelah ekspor migas, ekspor kelompok komoditi mesin elektronik, dan ekspor dari produk tekstil. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009, disebutkan bahwa penurunan kinerja daya saing pariwisata disebabkan oleh beberapa permasalahan yang berkenaan dengan :

1. Kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri akhir-akhir ini, terutama dengan maraknya berbagai aksi terorisme seperti pemboman yang memberikan citra buruk bangsa Indonesia
2. Maraknya hambatan dari bermunculannya berbagai regulasi baik di pusat maupun daerah sebagai dampak masa transisi pelaksanaan otonomi daerah. Keadaan ini memberatkan pelaku industri pariwisata yang tercermin dari menurunnya minat dunia usaha di dalam pengembangan obyek wisata potensial dan infrastruktur yang berkenaan dengan kepariwisataan
3. Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sehingga kurang atraktif dan kurang mampu bersaing dengan obyek-obyek wisata terutama dengan negara-negara ASEAN
4. Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata terutama ke masyarakat internasional.

Dewasa ini, pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global dengan pelaku-pelaku yang melibatkan ratusan jiwa manusia, baik di kalangan pemerintahan, industri pariwisata maupun di kalangan masyarakat dengan biaya yang sangat besar. Dalam perkembangannya tersebut, pariwisata telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, motivasi perjalanan, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling memungkinkan dan diharapkan dapat menggalakkan perekonomian di daerah. Spillane (1990:57) menyatakan bahwa :

“Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : pertama adalah karena makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu lalu; kedua,

merosotnya nilai ekspor di sektor-sektor non minyak; ketiga, prospek pariwisata yang terus memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten; dan keempat, karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia“.

Untuk menggalakkan usaha-usaha sektor pariwisata secara nasional, maka seperti yang dikemukakan oleh Musanef (1995:39), pemerintah merasa perlu mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang dapat memacu keberhasilan program-program pariwisata, yaitu :

- a. Promosi digencarkan
- b. Aksesibilitas diperluas
- c. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan
- d. Kawasan pariwisata dikembangkan
- e. Wisata bahari digalakkan
- f. Sumber daya manusia ditingkatkan
- g. Sadar wisata dan sapta pesona dibudayakan

Wahab (1992:5) menyatakan bahwa :

“Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima devisa. Lagipula, pariwisata sebagai sesuatu yang kompleks, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri”.

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional. Hal ini terbukti melalui peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah, serta devisa negara. Disamping itu, pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan pariwisata, maka dirasa sangat perlu dan mendesak untuk menata mekanisme pengembangan pariwisata secara konseptual yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk pembinaan kepariwisataan di Indonesia.

Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam lima tahun ke depan seperti yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009 adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya :

- a. Peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama pengembangan wisata bahari yang potensinya sangat besar dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya wisata bahari; dan
- d. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.

Dalam melaksanakan program pengembangan pariwisata dengan sebaik-baiknya, pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan alat ukur keberhasilan program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan, selain itu dalam perencanaan juga berisi tentang cara-cara yang harus dilakukan yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan.

Perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu sektor yang dapat diandalkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan agar pengembangan pariwisata yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan

dan berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Kabupaten Malang merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dengan jarak sekitar 87 km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Kabupaten Malang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama kawasan Malang Selatan. Kekayaan alam ini merupakan modal dalam membangun Kabupaten Malang khususnya dan Propinsi Jawa Timur umumnya. Kekayaan alam dan budaya yang merupakan modal potensial tersebut antara lain adalah perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dan pariwisata.

Namun demikian, dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kepariwisataan Kabupaten Malang. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masing obyek wisata dalam pengembangannya memiliki kesamaan, yakni sebagai berikut : sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau obyek masih mengalami kesulitan, terutama kondisi jalan yang rusak; kurangnya keterpaduan perencanaan antar obyek wisata; kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata; obyek wisata di kawasan pantai selatan seperti di Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Ampel Gading dan Tirtoyudo masih alami dan belum dikembangkan; promosi tentang keunikan obyek sangat terbatas; serta terbatasnya sarana dan prasarana penginapan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yaitu yang mengarah pada penggalan potensi Malang Selatan, maka Pemerintah Kabupaten

Malang sesuai dengan rencana jangka pendek dan menengah sedang melaksanakan beberapa program pembangunan sebagai pendukung pengembangan Malang Selatan, seperti pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang kegiatan pariwisata. Hal ini dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mengarah pada pengembangan kawasan Jawa Timur bagian selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Malang juga semakin serius mengelola wisata pantainya. Sejumlah investor sudah menawarkan diri untuk mengelola pantai di Malang Selatan, dimana melalui konsultan dari *Asian Development Bank (ADB)*, mereka telah melakukan penjajakan sebelum menanamkan investasi. Badan Perencanaan Kabupaten Malang telah melakukan survei ke sejumlah lokasi yang bisa dikembangkan dengan lebih besar, antara lain ke Pantai Balekambang, Pantai Sendangbiru, Wendit, serta Gunung Kawi (Surya, 8 Maret 2006:13).

Berdasarkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Malang, sasaran pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang diarahkan dan diupayakan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan, peningkatan kemampuan dan ketrampilan guna menunjang kelancaran layanan terhadap wisatawan serta meningkatkan mutu prasarana dan sarana obyek wisata, agar wisatawan lebih lama tinggal dan lebih besar membelanjakan uangnya (Saurianto, 2004:15).

Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar) Kabupaten Malang mulai menyiapkan anggaran untuk mengembangkan sektor pariwisata. Anggaran ini untuk mengenalkan obyek wisata di kabupaten. Obyek wisata yang dikenalkan tersebut

antara lain sektor laut, alam, budaya, serta minat khusus yang ada di kabupaten. Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung di obyek wisata di kabupaten pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari 2.134 ribu menjadi 2.174 ribu wisatawan. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 3.977 ribu menjadi 4.311 ribu wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut merupakan prestasi dalam bidang pariwisata. Meskipun demikian, menurut Soefianto, Kabid Lalu Lintas Dishubpar Kabupaten Malang, obyek wisata di Kabupaten Malang belum dipromosikan secara maksimal (Radar Malang, 15 Maret 2006:32).

Trend saat ini yang paling digemari oleh para wisatawan adalah wisata pantai. Dengan kata lain, yang menjadi preferensi atau kesenangan wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang saat ini adalah kembali ke alam (*back to nature*), sehingga yang dikembangkan adalah wisata alam, yaitu salah satunya wisata pantai. Hal ini juga bisa dilihat di obyek wisata di luar negeri maupun Indonesia sendiri yang rata-rata fasilitas-fasilitas pariwisatanya terletak di areal dekat pantai, seperti Pantai Kuta, Sanur, dan Nusa Dua yang terletak di Bali. Dibandingkan dengan obyek wisata pegunungan, obyek wisata pantai lebih besar potensinya untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik.

Di Kabupaten Malang, banyak sekali terdapat obyek wisata pantai yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Dalam meningkatkan potensi pariwisata pantai selatan di Kabupaten Malang, telah dipilih satu obyek wisata andalan yaitu Pantai Balekambang. Latar belakang pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang antara lain : pantainya cukup menarik, lokasinya sudah dikenal dan berkembang, terdapat acara ritual yang pada waktu-waktu tertentu cukup banyak

menarik wisatawan untuk berkunjung, penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata, serta diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 1994/1995 - 2004/2005).

Pantai Balekambang merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan potensi wisata Kabupaten Malang, karena pantai ini merupakan salah satu obyek yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Malang maupun luar Kabupaten Malang. Selain itu, dari unit-unit wisata yang dikelola oleh PD Jasa Yasa, Pantai Balekambang menyumbang pemasukan terbesar yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp. 736.048.150,- pada tahun 2003, Rp. 802.914.700,- pada tahun 2004, dan Rp. 964.214.250,- pada tahun 2005.

Obyek wisata Pantai Balekambang merupakan obyek wisata andalan Kabupaten Malang, dimana Pantai Balekambang sudah menjadi *icon* atau *image brand* untuk wisata pantai Kabupaten Malang. Lokasi Pantai Balekambang terletak di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur yang berjarak sekitar 57 km arah selatan dari pusat Kota Malang. Obyek wisata Balekambang merupakan sisi lain dari obyek wisata pantai selatan Kabupaten Malang dengan ciri khas yang berbeda dari obyek wisata pantai yang lainnya, dimana yang menjadi andalan Pantai Balekambang ini adalah pantainya yang cukup indah dengan terdapat dua buah pulau, yaitu Pulau Ismoyo dengan Pulau Hanoman yang menjadi tempat melangsungkan upacara ritual pada waktu-waktu tertentu (Dinas Perhubungan dan Pariwisata, 2005:16).

Pantai Balekambang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik karena memiliki pantai yang indah dan potensi alamnya yang mendukung. Banyak potensi yang dimiliki oleh obyek wisata Pantai Balekambang membuat Pemerintah Kabupaten Malang mengandalkannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi pengelola obyek wisata Pantai Balekambang yaitu PD Jasa Yasa untuk lebih meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, berbagai macam usaha dilakukan oleh pengelola obyek wisata Pantai Balekambang dalam menyediakan fasilitas usaha yang layak. Selain itu, perlu dilakukan usaha-usaha pembenahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Selain usaha-usaha dalam menyediakan fasilitas, maka perlu juga ditingkatkan mutu pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung.

Pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang selain diharapkan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah, juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk desa setempat yang kehidupannya kebanyakan rakyat miskin, mengingat kondisi areal pertanian di Malang Selatan tidak begitu baik, dimana sebagian tanahnya adalah berupa kapur, yang kurang baik untuk pertanian. Sehingga dengan dikembangkannya obyek wisata Pantai Balekambang, nantinya juga akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah Malang Selatan, khususnya masyarakat setempat yang berada di sekitar obyek.

Berdasarkan uraian diatas, kawasan wisata Pantai Balekambang yang ada di Kabupaten Malang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu perencanaan pembangunan daerah dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu,

peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut dengan mengambil judul penelitian **“PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kondisi potensi pariwisata di kawasan wisata Pantai Balekambang?
2. Bagaimana perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang?
3. Bagaimana pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang?
4. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala dalam pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kondisi potensi pariwisata di kawasan wisata Pantai Balekambang
2. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang
3. Untuk mendeskripsikan pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang
4. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala dalam pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi studi ilmu Administrasi Publik, khususnya Administrasi Pembangunan, dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya di bidang perencanaan pariwisata. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran.

b. Bagi akademik

Memberikan referensi berupa sumbangan pemikiran dan informasi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti masalah yang sejenis dengan mengangkat obyek yang sama.

c. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata pantai Balekambang

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, dikemukakan mengenai latar belakang mengapa peneliti mengangkat permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, akan dibahas secara teoritis mengenai perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sektor pariwisata, serta perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan. Metode penelitian yang ada meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang dipergunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, dimana dalam bab ini terdiri dari dua sub bab utama, yaitu penyajian data dan analisis data.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan

Dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi, perlu dibuat perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan, sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan.

Dalam melakukan suatu perencanaan, seperti dikemukakan oleh Syamsi (1986:134), maka perencanaan yang baik dan lengkap haruslah memenuhi 6 (enam) unsur pokok. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

1. Apa (*What*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan
2. Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan
3. Bagaimana dan Berapa (*How dan How much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan
4. Dimana (*Where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek)
5. Kapan (*When*), yaitu pemilihan waktu (*timing*) yang tepat dalam pelaksanaannya
6. Siapa (*Who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut (subyek pelaksana).

Conyers dan Hills dalam Riyadi dan Bratakusumah (2005:2) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan

asaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan Kartasmita (1997:48) mengemukakan bahwa, pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan, pada umumnya terkandung hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.
2. Adanya pilihan prioritas dan cara/alternatif sebagai dasar-dasar penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

2. Pengertian Pembangunan

Menurut Syamsi (1986:4), pembangunan merupakan proses perubahan sistem yang direncanakan dan pertumbuhan menuju ke arah perbaikan yang berorientasi pada modernitas, *nation building* dan kemajuan sosial ekonomi. Sedangkan Todaro

(1985:21), mendefinisikan istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Secara lebih sederhana, Kartasasmita (1994:9) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang berkelanjutan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya melalui upaya yang terencana.

3. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005:7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai :

“Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi

lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental. Data-data riil lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area/wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) memberikan definisi sebagai berikut :

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas“.

Berarti, perencanaan pembangunan daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya.

Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab (Arsyad, 1999:127). Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah serta

meningkatkan kemampuan sektor swasta dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya tersebut secara maksimal dalam upaya menambah nilai daerah.

Demi kepentingan praktis, perencanaan pembangunan daerah dapat pula didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (*actors*), baik umum (*public*) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lainnya dengan cara :

1. Secara terus-menerus menganalisa kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
5. Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan (Syahroni, 2001:17).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

2. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Sjafrudin (1993:40) mengemukakan pendapat bahwa pemerintah daerah harus secara aktif merencanakan pembangunan daerah, karena :

1. Membantu pemerintah pusat pada waktu yang sama mengemukakan pendapat dan meneliti proyek-proyek yang akan dilaksanakan di daerah tersebut
2. Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan selanjutnya menciptakan administrasi yang lebih efisien

3. Untuk memberikan informasi kepada sektor swasta sehingga kegiatan-kegiatan mereka dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan sumbangan yang maksimal, terutama terhadap pembangunan sosial ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui keadaan riil daerahnya daripada pemerintah pusat. Pengetahuan pemerintah pusat tentang daerah-daerah, terutama daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan sangat terbatas. Selain itu, permasalahan pembangunan di daerah yang membutuhkan penanganan cepat dapat lebih segera ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki jumlah permasalahan yang relatif lebih sedikit daripada pemerintah pusat.

Sjafrudin (1993:40) juga menambahkan, perencanaan pembangunan yang terpusat memiliki sejumlah kelemahan sebagai berikut :

1. Kurang mantapnya perencanaan yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pembagian tugas dan kewenangan
2. Organisasi pelaksanaan yang kurang efisien
3. Kekurangan informasi mengenai potensi daerah dan kendala-kendala dalam menggali serta memanfaatkannya
4. Alokasi sumber berbagai daerah penyebarannya menimbulkan anggapan kurang adil bagi daerah tertentu.

3. Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan “alat” pembangunan dan berfungsi sebagai “tolak ukur” pembangunan. Menurut Syahroni (2002) perencanaan pembangunan daerah mempunyai tujuan-tujuan seperti berikut :

1. Menyusun atau memproduksi dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak atau pelaku
2. Membuat program atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan-harapan dan tujuan-tujuan pembangunan
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui *monitoring* dan evaluasi
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya.

4. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan daerah pada umumnya disusun dalam bentuk umum dan untuk jangka waktu panjang bagi suatu daerah. Dari bentuk umum itu, disusunlah perencanaan pembangunan untuk jangka menengah dan dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan untuk jangka pendek (tahunan). Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Artinya rencana jangka menengah harus sejalan dengan rencana jangka panjang dan rencana tahunan harus sejalan dengan rencana jangka menengah.

Sjafrudin (1993:49) mengemukakan langkah-langkah utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah
3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan
4. Merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang
5. Merumuskan beberapa pilihan strategis rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah
6. Mengikuti pilihan-pilihan strategis dan memilih atau menetapkan strategi yang optimum
7. Merumuskan rencana dan anggaran tahunan
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan
9. Melaksanakan rencana atau program tahunan
10. Melakukan pemantauan (*monitoring*)
11. Melakukan evaluasi
12. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.

C. Sektor Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Yoeti (1982:103), secara etimologis, pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”, dimana dijelaskan bahwa pari berarti banyak, berkali-

kali, berputar-putar lengkap. Wisata berarti perjalanan, bepergian. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Spillane (1990:21), pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Selanjutnya, Musanef (1995:11) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi wisata di tempat lain atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Biasanya pariwisata mencakup keinginan tentang :

1. Keseluruhan fenomena alam atau buatan manusia yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan
2. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan aktivitas.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan bersifat sementara dari satu tempat ke tempat yang lain dan bertujuan untuk kesenangan atau menikmati keindahan suatu tempat yang dikunjungi.

2. Jenis-Jenis Obyek Wisata

Di dalam dunia pariwisata, istilah obyek dan daya tarik wisata mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau calon wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, budaya dan sejarah, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi atau menjadi sasaran bagi wisatawan.

Setiap daerah memiliki bermacam-macam jenis pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan yang lama-kelamaan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata itu sendiri, perlu pula dibedakan jenis pariwisata, karena dengan demikian akan dapat ditentukan kebijakan apa yang perlu mendukung, sehingga jenis pariwisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Ada beberapa jenis dan sumber-sumber pariwisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Menurut Musanef (1995:175), obyek dan daya tarik wisata dapat dibagi menjadi :

1. Obyek dan daya tarik wisata alam, yang terdiri dari :
 - a. Obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di kawasan konservasi, yaitu kawasan hutan atau kawasan pelestarian alam yang pengelolaannya dan pengawasannya berada dalam wewenang Departemen Kehutanan dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Obyek dan daya tarik wisata ini seperti : Taman Nasional, Taman Wisata, Taman Buru, Taman Laut, Taman Hutan Raya, dan sebagainya.
 - b. Obyek dan daya tarik yang terdapat di luar kawasan konservasi. Obyek dan daya tarik wisata ini dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani dan Taman Safari.
2. Obyek dan daya tarik wisata budaya atau sejarah
Termasuk dalam obyek dan daya tarik wisata budaya adalah peninggalan sejarah, candi, keraton, monumen, dan sebagainya.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus
Termasuk dalam obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah wisata agro, wisata buru, wisata tirta, wisata kesehatan, dan sebagainya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Musanef, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa terdapat tiga jenis obyek dan daya tarik wisata, yaitu obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah, dan obyek daya tarik wisata minat khusus.

Kekayaan nilai budaya dan keindahan alam yang dimiliki daerah sangat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai pendorong atau motivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

3. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sebelum suatu daerah tujuan wisata melakukan promosi dan pemasaran pariwisata, maka yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai. Hal ini diperlukan karena seseorang atau kelompok orang yang menjadi wisatawan sebelum melakukan perjalanan wisata, ia ingin mengetahui terlebih dahulu sudah siapkah daerah tujuan wisata tersebut menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, tentu tidak lepas dari upaya pengembangan sarana dan prasarana wisata, karena keduanya selalu berhubungan erat. Menurut Yoeti (1982:179), sarana dan prasarana kepariwisataan dapat diartikan sebagai semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak selamanya akan tergantung kepada wisatawan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya adalah melayani wisatawan dan kehidupannya tidak selamanya tergantung pada kunjungan wisatawan.

1) Sarana Pariwisata

Sarana pariwisata meliputi sarana pokok, sarana pelengkap dan sarana penunjang. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sarana pokok pariwisata

Sarana pokok pariwisata adalah fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata. Pada dasarnya, perusahaan yang mengelola sarana ini hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan. Adapun yang termasuk dalam sarana pokok pariwisata ini seperti : sarana penghubung, sarana angkutan wisata, hotel, dan jenis akomodasi lainnya.

b. Sarana pelengkap pariwisata

Sarana pelengkap pariwisata merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok, sehingga fungsi sarana pelengkap ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan atau tempat tinggal yang dikunjungi. Adapun yang termasuk dalam sarana ini adalah sarana olahraga, dan lain sebagainya.

c. Sarana penunjang pariwisata

Sarana penunjang pariwisata diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ke

tempat yang dikunjungi. Adapun yang termasuk dalam sarana ini misalnya bioskop dan lain sebagainya.

2) Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1982:11), prasarana merupakan semua fasilitas yang memproses perekonomian berjalan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan pengertian tersebut, prasarana pariwisata dapat disimpulkan sebagai semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana wisata dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan serta untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Adapun yang termasuk dalam prasarana pariwisata adalah :

a. Prasarana ekonomi

Prasarana yang termasuk dalam prasarana ekonomi dalam pariwisata diantaranya adalah angkutan, komunikasi, sistem perbankan dan termasuk dalam kelompok utilitas. Misalnya : listrik dan sumber air.

b. Prasarana sosial

Adapun yang termasuk dalam prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan pariwisata adalah seperti pelayanan kesehatan, petugas yang langsung melayani wisatawan, pramuwisata, faktor keamanan, dan sebagainya.

Tersedianya sarana pokok, sarana pelengkap dan sarana penunjang pariwisata dan juga prasarana ekonomi dan prasarana sosial yang memadai dalam bidang pariwisata akan dapat memberikan daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung pada daerah tujuan wisata yang ada.

4. Pemasaran Pariwisata

Dalam rangka mencapai sasaran pengembangan kepariwisataan, salah satu strategi dasar yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam suatu daerah tujuan wisata adalah pemasaran wisata. Hal ini penting untuk daerah tujuan wisata yang lain. Dengan demikian, diperlukan kebijakan tentang pemasaran pariwisata yang berorientasi pada pengunjung dan wisatawan.

Krippendorff sebagaimana dikutip oleh Wahab (1992:27) memberikan batasan pemasaran pariwisata sebagai berikut :

“Penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sektor pariwisata pada tingkat pemerintah lokal, regional, nasional dan internasional guna mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi kebutuhan-kebutuhan kelompok pelanggan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus untuk mencapai tingkat kebutuhan yang memadai”.

Masih sejalan dengan pendapat diatas, Wahab (1992:28) memberikan batasan tentang pemasaran wisata, yaitu :

”Pemasaran wisata ialah proses manajemen dimana organisasi pariwisata nasional dan atau badan-badan usaha wisata dapat mengidentifikasi wisata pilihannya, baik yang aktual maupun potensial dan dapat berkomunikasi dengan mereka untuk meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal yang tidak disukai, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional serta merumuskan dan menyesuaikan produk wisata mereka secara tepat, dengan maksud mencapai kepuasan optimal wisatawan sehingga dengan begitu mereka dapat meraih sasarannya”.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik suatu makna bahwa pemasaran wisata merupakan salah satu upaya pengembangan kepariwisataan yang berusaha sedemikian rupa untuk berkomunikasi dengan para pelanggan atau wisatawan serta meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi para calon wisatawan

dan yang paling penting adalah menyesuaikan produk wisata secara tepat, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, dan motivasi dari calon wisatawan.

5. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan

Sebagai suatu industri, pariwisata yang memiliki kekompleksan aktivitas sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pariwisata merupakan suatu bentuk ekspor yang dianggap menguntungkan, terutama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Industri pariwisata dapat memajukan dan pemeratakan perekonomian suatu negara karena kegiatan pariwisata merupakan sektor yang bersifat padat karya. Hal ini dapat dilihat bahwa industri pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang, mulai dari kegiatan biro perjalanan, perusahaan angkutan, akomodasi, perhotelan, restoran, kegiatan pemanduan, dan kerajinan rakyat. Ini berarti pariwisata melibatkan lembaga formal seperti telekomunikasi, kantor pos, dan lain-lain. Pariwisata juga menggerakkan sektor-sektor ekonomi dengan jangkauan yang amat luas dengan menyerap tenaga kerja dalam pengembangannya, baik yang langsung maupun tidak langsung.

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan ingin memperoleh kepuasan dari daerah yang ditujunya, termasuk pelayanan yang baik. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengembangan suatu daerah tujuan wisata tertentu yang menuntut peningkatan pelayanan.

Pengembangan suatu daerah tujuan wisata akan meyebabkan suatu daerah yang memiliki potensi wisata mendapatkan penanganan dan perhatian yang lebih. Misalnya, akan mendapat perhatian dalam membangun akomodasi di daerah tersebut.

Karena industri pariwisata merupakan suatu industri yang dapat mengembalikan keuntungan dengan cepat, maka akan mudah untuk mendapatkan modal bagi pembangunan akomodasi dari suatu daerah yang memiliki potensi wisata.

Agar tercipta pelayanan yang baik, maka dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dan berkualitas. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang profesional, diperlukan lembaga pendidikan yang berorientasi khusus pada kegiatan kepariwisataan, yang merupakan wadah untuk mencetak tenaga hotel dan biro perjalanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata benar-benar memiliki peranan yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Mengenai keuntungan dari industri pariwisata ini dikemukakan oleh Spillane (1990:138) sebagai berikut :

1. Membuka kesempatan kerja
Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.
2. Menambah pendapatan atau pemasukan masyarakat daerah
Di daerah pariwisata tersebut, masyarakat dapat menambah pendapatan dengan menjual barang dan jasa. Misal : restoran, hotel, biro perjalanan, pramuwisata, dan barang-barang sovenir.
3. Menambah devisa negara
Dengan makin banyaknya wisatawan asing yang datang, maka akan semakin banyak devisa yang akan diperoleh.
4. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli suatu daerah
Kebudayaan suatu daerah dapat lestari dan tumbuh karena adanya pariwisata. Wisatawan asing banyak yang ingin melihat kebudayaan asli yang tidak ada duanya. Dengan demikian, kebudayaan asli dapat lestari dan berkembang dengan suburnya.
5. Menunjang gerak pembangunan di daerah
Di daerah tujuan pariwisata, banyak timbul pembangunan jalan, hotel, dan restoran, sehingga pembangunan di daerah lebih maju.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang bersifat strategis. Pariwisata tidak boleh dianggap hanya sebagai urusan dari satu instansi pemerintah saja, yaitu organisasi pariwisata nasional, tetapi melibatkan instansi yang lain karena

pengembangan pariwisata juga mencakup masalah infrastruktur, sarana dan fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan masalah sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, pariwisata harus ditangani oleh pemerintah sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Dari hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia, pariwisata mempunyai peranan yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai, dan budaya bangsa.

6. Fungsi dan Peranan Pemerintah Daerah dalam Sektor Pariwisata

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Dan salah satu bidang tugas pemerintah tersebut adalah pembangunan sektor pariwisata. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan sektor pariwisata juga mempunyai peran dan fungsi untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah yang ada di daerahnya. Dari hal tersebut diatas, maka fungsi pemerintah daerah khususnya dalam sektor pariwisata adalah sebagai pelaksana sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan pariwisata tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pendit (1994:56) yang menyatakan bahwa :

Fungsi pokok Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata adalah :

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan di daerahnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan
2. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari upaya pembangunan sektor kepariwisataan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tingkat atasnya

Dengan demikian, peran dari pemerintah daerah dalam kepariwisataan adalah sebagai unsur pembaharu serta pendorong pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang peningkatan sumber-sumber pendapatan bagi daerah maupun bagi devisa negara. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya dukungan atau kerjasama dengan badan atau organisasi lainnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan sektor pariwisata tersebut, seperti Dinas Pariwisata Daerah (Disparida), dimana tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian, riset, merumuskan dan mengusulkan kebijakan kepariwisataan pada tingkat kepala daerah, sehingga tercapai suatu usaha yang terkoordinir dan terarah menuju pengembangan kepariwisataan di daerah yang bersangkutan secara menyeluruh
2. Menggerakkan dan mendayagunakan seluruh potensi di daerah yang dapat diarahkan menuju pengembangan kepariwisataan di daerah yang bersangkutan
3. Memberikan saran-saran kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di daerah kepada Gubernur Kepala Daerahnya
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha-usaha pengembangan kepariwisataan yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan
5. Ikut serta dalam kerjasama antar daerah dan mewakili daerahnya pada tingkat pusat (Pendit, 1994:64).

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor kepariwisataan adalah bagaimana pemerintah daerah sanggup menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, melakukan koordinasi antar aparat pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, pengaturan promosi

umum ke luar negeri atau ke daerah lain serta melakukan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, peran dan fungsi pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengembangan sektor pariwisata ini sangat vital dan perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak agar tujuan tersebut selain dapat terwujud, dampak sebagai akibat pengembangan sektor pariwisata pada akhirnya akan membawa angin segar bagi perekonomian dan kesejahteraan pada umumnya.

D. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

1. Proses Perencanaan Pariwisata

Sesuai dengan kesimpulan yang disepakati dalam *Travel Research Seminar* Ketiga yang diselenggarakan oleh IUOTO di Paraguay pada tahun 1964, maka terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan kepariwisataan, yang apabila diperinci lagi akan terdapat lima tahap, yaitu :

1. Melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki
2. Menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi lalu lintas wisatawan pada masa yang akan datang
3. Memperhatikan di daerah belahan bumi manakah permintaan adalah lebih besar daripada persediaan atau penawaran
4. Melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing
5. Melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa serta adat istiadat suatu bangsa yang ada (Yoeti, 1997:7)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan kepariwisataan meliputi melakukan survei tentang potensi kepariwisataan yang ada, yang akan disesuaikan dengan bentuk dan sifat pengembangan yang dikehendaki dan mencoba meramalkan potensi pariwisata di masa yang akan datang berdasarkan besar kecilnya permintaan dan memperhatikan perlu tidaknya penanaman modal baru serta usaha perlindungan terhadap kekayaan alam budaya yang dimiliki.

2. Prinsip-prinsip Perencanaan Pariwisata

Dalam upaya pengembangan pariwisata, terdapat kaitan yang erat antara pariwisata dengan lingkungannya. Lingkungan fisik (alam maupun buatan manusia) menyediakan banyak atraksi wisata bagi wisatawan, sehingga hal ini bisa menghasilkan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Pelaksanaan prinsip-prinsip perencanaan pariwisata sehingga selaras dengan lingkungan hidup dan tidak menurunkan kualitasnya adalah salah satu faktor utama dalam mencapai pengembangan yang berkelanjutan.

Yoeti (1997:13), mengemukakan prinsip-prinsip dalam perencanaan kepariwisataan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan kepariwisataan haruslah merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan ekonomi negara, karena itu perencanaan pengembangan kepariwisataan hendaknya termasuk dalam kerangka dari pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup di negara tersebut
2. Seperti halnya perencanaan sektor ekonomi lainnya, perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan terpadu (*integrated approach*) dengan sektor-sektor lainnya yang banyak berkaitan dengan bidang kepariwisataan
3. Perencanaan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah haruslah dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan

4. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus pula berdasarkan studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam, dan budaya di daerah sekitarnya
5. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata haruslah didasarkan atas suatu penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor-faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja
6. Rencana dan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan suatu daerah harus memperhatikan faktor ekologi daerah yang bersangkutan
7. Perencanaan pengembangan kepariwisataan tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial yang mungkin ditimbulkannya
8. Pada masa-masa yang akan datang, jam kerja para buruh dan karyawan akan semakin pendek dan waktu senggang akan semakin panjang, karena itu dalam sistem perencanaan pariwisata, khususnya di daerah yang dekat dengan industri perlu diperhatikan pengadaan fasilitas rekreasi dan hiburan di sekitar daerah yang disebut *pre-urban*
9. Pariwisata, bagaimanapun bentuknya, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak tanpa membedakan ras, agama, dan bangsa. Karena itu, dalam pengembangan pariwisata perlu pula memperhatikan kemungkinan peningkatan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang saling menguntungkan.

Sejalan dengan pendapat diatas, Hadinoto (1996:207) mengemukakan prinsip-prinsip dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata antara lain :

1. Inventarisasi dan penilaian sumber daya wisata
Dari studi analisis yang dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa suatu daerah yang dipertimbangkan memiliki potensi yang cukup berharga untuk pengembangan pariwisata dan dinyatakan bahwa kecenderungan gerak wisata menguntungkan daerah tersebut, maka diperlukan suatu inventarisasi dan penilaian dari sumber daya wisata untuk dapat memilih kawasan utama dari konsentrasi investasi dalam daerah tersebut untuk menentukan kapabilitas dalam memberikan akomodasi dan hiburan pada wisatawan yang berkunjung
2. Upaya pengembangan sumber daya wisata (obyek dan daya tarik wisata) dan fasilitas yang ada
Supply sumber daya wisata (lahan dengan karakteristik tertentu, pelayanan yang tidak bergerak dan seringkali tidak dapat diganti) dan fasilitas dibatasi oleh besarnya kapasitas dan aksesibilitas yang tersedia. Oleh karena itu, adanya atraksi dan fasilitas wisata tidak mempunyai arti apabila sumber daya wisata tidak digunakan secara tepat

3. Rencana fisik detail untuk upaya pengembangan
Rencana fisik detail untuk pengembangan kawasan harus disediakan untuk menentukan fasilitas tambahan yang diperlukan dengan tidak mengganggu karakteristik lingkungan dan untuk menjamin preservasi kualitas aslinya
4. Perencanaan yang ada sesuai dengan tata guna tanah
Perencanaan fisik untuk pengembangan wilayah harus disusun dalam kerangka tata guna tanah regional. Unsur perencanaan ini adalah secara sungguh-sungguh mempelajari karakteristik lokal yang dapat menjadi atraksi bagi wisatawan
5. Rencana sistem transportasi
Perencanaan transportasi juga perlu menjadi perhatian, seperti antara pintu gerbang dan kawasan pengembangan wisata, dimana perhubungan yang cepat dan aman adalah tujuannya. Rencana transportasi harus mempertimbangkan perjalanan alternatif untuk keperluan ini
6. Preservasi (upaya pemeliharaan) bangunan
Dalam perencanaan fisik fasilitas wisata, yang menjadi perhatian utama adalah preservasi dari skala bangunan. Sakla unsur sejarah dan karakteristik lain dari lingkungan buatan perlu dipreservasi. Bangunan baru jangan merusak lingkungan asli dan skala aslinya
7. Implementasi perencanaan yang efisien
Pengembangan suatu wilayah tidak hanya tergantung dari sektor pariwisata saja. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana mencegah sektor lain, akan tetapi bagaimana mengawasi sektor-sektor lain untuk menghindarkan dampak merusak lingkungan serta bagaimana menggunakan sekteo lain untuk perbaikan wilayah. Sehingga diperlukan untuk mengkreasikan mekanisme implementasi perencanaan yang efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus menjadikan perencanaan kepariwisataan ke dalam satu kesatuan program pembangunan suatu daerah, terutama yang berkaitan dengan pariwisata, dengan melalui suatu studi khusus dan penelitian yang memperhatikan lingkungan alam, budaya dan sosial daerah yang bersangkutan, serta mengusahakan adanya kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu perlu diperhatikan perencanaan yang sesuai dengan tata guna tanah, preservasi bangunan, dan implementasi perencanaan yang efisien.

3. Pengembangan Pariwisata

Ndraha (1993:134) menyatakan bahwa istilah pengembangan berasal dari kata “kembang”, yang berarti meningkatkan, menambah sesuatu yang sudah ada, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ada sesuatu yang bertambah. Penambahan itu sendiri adalah pembangunan. Sedangkan Jayadinata (1992:2) mengartikan pengembangan dengan suatu usaha untuk memajukan, meningkatkan, dan memperbaiki sesuatu yang telah ada.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan segala sesuatu atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menjadikan suatu obyek wisata menjadi lebih besar, sehingga diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut.

Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha pariwisata itu sendiri meliputi :

1. Usaha yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya, dan wisata minat khusus
2. Usaha yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, seperti penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, jasa impresariat, jasa biro perjalanan, penginapan, toko souvenir, dan sebagainya

3. Usaha lain yang terkait dengan kegiatan pengembangan sektor pariwisata, seperti pengembangan sumber daya manusia, upaya promosi dan pemasaran obyek wisata, dan lain-lain.

Kegiatan pariwisata tersebut diatas mengusahakan fasilitas, sarana dan prasarana serta faktor penunjang lainnya yang disediakan dan diadakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya perencanaan, pengaturan, pengurusan dan pelayanan yang baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Selanjutnya, Sumardjan berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Spillane (1990:133) yang mengatakan bahwa :

”Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, fisik, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan kepariwisataan”.

Musanef berpendapat bahwa pengusahaan dan pengembangan obyek wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek serta sarana dan prasarana atau kegiatan mengelola obyek wisata yang sudah ada. Dalam menentukan sistem pengelolaan untuk setiap obyek dan daya tarik wisata, menurut Musanef (1995:80), perlu dilakukan pendekatan dengan dasar pemikiran bahwa pengembangan suatu obyek dan daya tarik wisata berdasarkan urutan prioritas yang dimiliki, sehingga potensi obyek dan daya tarik wisata yang tinggi mempunyai prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam aspek ekonomi, potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan faktor penentu.

Upaya pengembangan obyek dan daya tarik wisata ini sebenarnya tidak akan dapat berjalan jika upaya tersebut hanya dilakukan semata-mata oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, sangat perlu dukungan serta kerjasama dengan pihak lain, terutama para investor yang mau mengeluarkan modalnya di bidang jasa kepariwisataan. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata tersebut, pemerintah perlu memiliki organisasi pengelolaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang disesuaikan dengan jenis serta klasifikasi masing-masing obyek dan daya tarik wisata tersebut. Kemudian yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam bermacam-macam pasar, maka haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”, artinya di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “*entertainment*” bila orang biasa kesana
2. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut “*something to do*”, artinya ditempat tersebut selain banyak yang dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lama di tempat tersebut
3. Daerah tersebut harus tersedia pula apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*”, artinya di tempat tersebut tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang sovenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing. Fasilitas untuk berbelanja ini tidak hanya menyediakan barang-barang yang dapat dibeli, tetapi harus tersedia pula sarana-sarana pembantu lainnya untuk lebih memperlancar perjalanan wisata seperti *money changers*, bank, kantor pos, telepon, dan lain-lain (Yoeti, 1982:164).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga syarat yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, antara lain daerah

tersebut harus mempunyai obyek wisata dan atraksi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain; adanya fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lama di tempat tersebut; serta di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang sovenir dan kerajinan rakyat sarana-sarana pembantu lainnya untuk lebih memperlancar perjalanan wisata.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah (Hasan, 2002:10). Menurut Riduwan (2002:3), penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada, sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia. Sedangkan metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002:22).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu fenomena maupun peristiwa yang terjadi.

Seperti yang ditegaskan oleh Moleong (2002:3), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan secara sistematis sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

Adapun yang diungkapkan oleh Faisal (1989:20) mengenai penelitian deskriptif adalah:

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Pada suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan melakukan pengujian hipotesis; berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan membentuk perbendaharaan teori”.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2002:3) bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu hanya berusaha menggambarkan secara obyektif suatu keadaan atau fenomena dengan jalan mengungkapkan permasalahan yang terjadi melalui fakta-fakta yang ada.

Dengan demikian, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan dan menginterpretasikan permasalahan yang ada. Kemudian, diambil kesimpulan tentang bagaimana perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang ada agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak

meluas serta relevan dengan obyek penelitian dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kondisi potensi pariwisata di kawasan wisata Pantai Balekambang
 - a. Jenis wisata dan obyek wisata
 - b. Sarana dan prasarana wisata
2. Perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang
 - a. Tujuan dan sasaran perencanaan pengembangan
 - b. Bentuk dan langkah perencanaan pengembangan
3. Pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang
 - a. Pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
 - c. Pengembangan sumber daya manusia
 - d. Upaya promosi dan pemasaran obyek wisata
4. Faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala dalam pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Malang. Pertimbangan dalam menetapkan lokasi adalah bahwa kawasan wisata Pantai Balekambang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, dimana Pantai Balekambang merupakan obyek wisata andalan yang menjadi program prioritas untuk meningkatkan potensi wisata Kabupaten Malang, karena pantai ini merupakan salah satu obyek yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Malang maupun luar Kabupaten Malang.

Situs penelitian menunjukkan tempat dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar relevan dan akurat. Peneliti dalam menetapkan situs penelitian mempunyai pertimbangan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, tentunya melibatkan kerjasama antara Badan Perencanaan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, PD Jasa Yasa selaku pihak pengelola, dan dukungan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan obyek. Situs dari penelitian ini adalah :

1. Kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang
2. Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang
3. Kantor Unit Wisata Balekambang pada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa Kabupaten Malang

4. Obyek wisata Pantai Balekambang
5. Masyarakat di sekitar kawasan wisata Pantai Balekambang

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland seperti yang dikutip oleh Moleong (2002:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Data primer diperoleh peneliti dari :

a. Pegawai di kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang

Data-data yang diperoleh mengenai :

- 1) Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Malang
- 2) Rencana detail pengembangan kawasan Pantai Balekambang

b. Pegawai yang ada di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang

- 1) Gambaran umum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang
- 2) Data-data yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang

c. Pegawai pada Unit Wisata Balekambang pada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa

- 1) Gambaran umum Unit Wisata Pantai Balekambang pada PD Jasa Yasa

2) Promosi dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang telah dilaksanakan

3) Jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Balekambang pada tanggal 1 Januari 2003 - 30 Juni 2006

4) Pendapatan Unit Wisata Pantai Balekambang pada tahun 2003-2005

d. Pegawai di kantor pengelola pada obyek wisata Pantai Balekambang

1) Sarana dan prasarana yang ada pada obyek wisata

2) Pengembangan sumber daya manusia

3) Faktor-faktor yang terkait dalam pengembangan kawasan wisata

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder dari :

a. Buku Panduan Wisata Kabupaten Malang

b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 1994/1995-2004/2005

c. Rencana Teknik Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Balekambang dan Ngliyep Tahun 1995/1996 – 2005/2006

d. Hasil-Hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2003-2005.

e. Data Potensi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gondanglegi dan Sekitarnya (meliputi : Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran dan Gondanglegi).

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dapat diartikan sebagai pembicaraan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Noor, 1991:26). Wawancara untuk mendapatkan data penelitian dilakukan antara lain dengan :

- a. Kepala dan Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang
- b. Kepala Bagian Ekonomi dan Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang
- c. Plt. Direktur Utama dan Kasi Promosi Perusahaan Daerah Jasa Yasa
- d. Kepala dan Staf Unit Wisata Pantai Balekambang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu berasal dari buku-buku, gambar-gambar atau catatan khusus, dokumen-dokumen atau arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Menurut Guba & Lincoln seperti yang dikutip oleh Moleong (2002:161), dokumen digunakan dalam penelitian, karena sebagai sumber data, ia bersifat stabil, dapat digunakan sebagai bukti dalam pengkajian, yang sifatnya alamiah sesuai dengan konteks. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang

umum mengenai gambaran obyek wisata Pantai Balekambang dan perencanaan yang dilaksanakan dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang.

3. Pengamatan (observasi)

Peneliti mengadakan penelitian dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian ini, kemudian mencatatnya. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan dalam upaya memperoleh gambaran langsung mengenai obyek penelitian, yaitu Pantai Balekambang, dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan, memperoleh data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian ini, yaitu :

1. Peneliti sendiri

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian, peneliti merupakan instrumen utama (Moleong, 2002:4). Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung serta mencatat, menganalisa serta mengkaji fenomena-fenomena dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Yaitu proses pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan informan terkait. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti yang akan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian untuk memudahkan dan mengarahkan wawancara agar tidak keluar dari tema penelitian.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

4. Alat tulis-menulis

Sebagai alat untuk membantu pencatatan di lapangan.

G. Analisis Data

Pengertian analisis data, sebagaimana diungkapkan oleh Singarimbun dan Effendi (1995:167) adalah :

“Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk tabel guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus di lapangan“.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam model ini terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992:16). Selanjutnya, analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen tersebut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh di lapangan tersebut kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara klasifikasi data dan selanjutnya dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung, sehingga diharapkan nantinya akan diklasifikasikan dan diperoleh suatu verifikasi yang jelas dan terarah.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau “*display data*” merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel, skema dan bentuk naratif atau kumpulan kalimat.

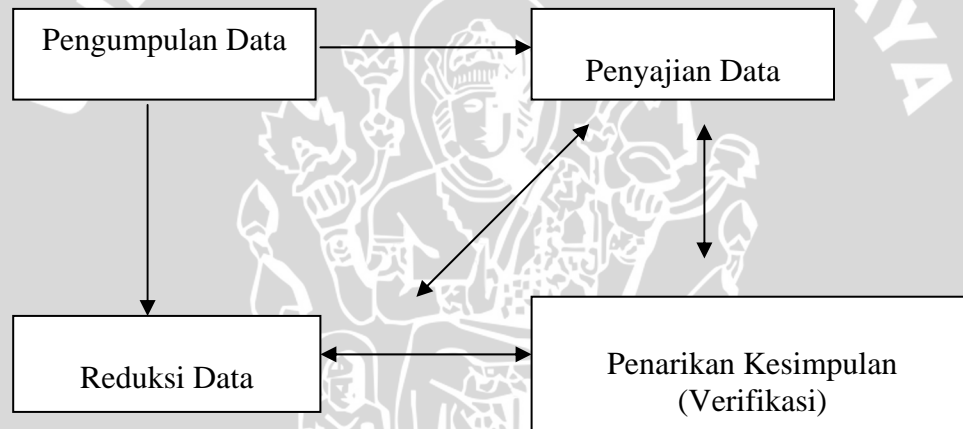
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh disajikan sedemikian rupa, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dari hasil data-data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi, baik berdasarkan kerangka pikir penelitian maupun berdasarkan catatan-catatan yang ada, agar mempunyai validitas dan mencapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informan (Milles dan Huberman, 1992:16).

Pada intinya, dalam penelitian ini semua data yang diperoleh akan direduksi, yaitu memilih data, baik dengan mengurangi maupun diklasifikasi karena tidak semua data yang diperoleh itu mempunyai kaitan dengan penelitian. Setelah itu, data yang ada akan dianalisis, kemudian dilakukan penyajian data dengan membuat data kesimpulan sementara. Analisis data yang dilakukan bersifat umum dan menyeluruh tentang hal-hal yang tercakup dalam fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti berusaha

memberikan gambaran dan mendeskripsikan tentang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang dilaksanakan pada kawasan wisata Pantai Balekambang. Hasil kecenderungan yang ada nantinya akan disimpulkan sebagai hasil dari penelitian ini. Tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif. Terlihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Milles and Hubberman (1992:20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi bagian tengah Propinsi Jawa Timur. Kawasan ini dikelilingi oleh Pegunungan, yaitu Pegunungan Tengger di sebelah timur yang memiliki dua gunung terkenal, yakni Gunung Bromo dan Gunung Semeru (3.676 m) yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Kawi dan Kelud di sebelah barat serta Gunung Arjuna dan Welirang di bagian utara. Sedangkan untuk posisinya terletak pada ordinat $112^{\circ} 17' 10,9''$ - $112^{\circ} 57' 0,0''$ Bujur timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ - $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kota Batu, Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
2. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Kabupaten Malang memiliki luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Malang tersebut adalah $351.456,99 \text{ km}^2$. Dari seluruh total luas tersebut sekitar 54,93 % dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (tegalan, sawah, perkebunan), sedangkan pemanfaatan untuk permukiman penduduk baru sekitar 13,71 %.

Kabupaten Malang berkembang bersama 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan bergandengan erat dengan Kota Malang dan Kota Batu di Malang Raya. Kabupaten Malang secara keseluruhan terdiri dari 33 kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci terdiri dari 12 kelurahan, 377 desa, 3.138 rukun warga dan 14.346 rukun tetangga.

Topografi Kabupaten Malang terdiri atas daerah lembah atau daratan rendah yang terletak pada ketinggian 250-500 m di atas permukaan air laut; daerah dataran tinggi; daerah perbukitan kapur; daerah lereng Tengger-Semeru pada ketinggian 500-3600 m di atas permukaan air laut, daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno pada ketinggian 500-3300 m di atas permukaan air laut. Kondisi kelerengan Kabupaten Malang sebagian besar berkisar antara 2-15 % dan sebagian kecil memiliki kelerengan antara 0-2 %. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Malang dikenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan peristirahatan dengan ketinggian di pusat pemerintahan Kecamatan terendah 240 meter dan tertinggi 1.299 m dari permukaan laut, suhu udara rata-rata Kabupaten Malang relatif rendah, yaitu berkisar antara 20° C hingga mencapai 28° C.

Dalam hal potensi pariwisata, prioritas pengembangan obyek wisata di Kabupaten Malang berdasarkan jenis wisatanya dibagi menjadi lima jenis, yaitu wisata alam, wisata pemandian, wisata pantai, peninggalan sejarah dan pesarean, dan wisata bendungan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Prioritas Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Malang

No.	Jenis Wisata	Prioritas	Nama Obyek
1.	Wisata Alam	1	Coban Rondo
		2	Coban Pelangi
		3	Coban Glotak
2.	Wisata Pemandian	1	Sengkaling
		2	Wendit
		3	Lembah Dieng
		4	Metro
		5	Ken Dedes
		6	Sumber Jenon
		7	Dewi Sri
3.	Wisata Pantai	1	Balekambang
		2	Ngliyep
		3	Sendang Biru
		4	Sipelot
		5	Lenggoksono
		6	Tamban
		7	Kondang Merak
		8	Licin
		9	Wonogoro
		10	Bajulmati
		11	Jonggring Saloko
		12	Modangan
		13	Tambak Asri
4.	Peninggalan Sejarah & Pesarean	1	Pesarean Gunung Kawi
		2	Candi Singosari
		3	Candi Jago
		4	Candi Kidal
		5	Candi Badut
		6	Stupa Sumberawan
5.	Wisata Bendungan	1	Bendungan Selorejo
		2	Bendungan Sutami-Lahor
		3	Bendungan Sengguruh

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang Tahun 2006

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa prioritas pengembangan untuk wisata alam adalah Coban Rondo, Coban Pelangi, dan Coban Glotak. Untuk wisata pemandian, urutan prioritas pengembangannya adalah Sengkaling, Wendit, Lembah Dieng, Metro, Ken Dedes, Sumber Jenon, dan Dewi Sri. Prioritas pengembangan wisata pantai adalah Pantai Balekambang, Ngliyep, Sendangbiru, Sipelot, Lenggoksono, Tamban, Kondang Merak, Licin, Wonogoro, Bajulmati, Jonggring Saloko, Modangan dan Tambak Asri. Untuk peninggalan sejarah & pesarean yaitu Pesarean Gunung Kawi, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Badut, dan

Stupa Sumberawan. Prioritas pengembangan wisata Bendungan Bendungan yaitu Selorejo, Bendungan Sutami-Lahor, dan Bendungan Sengguruh.

Sarana penunjang pariwisata di Kabupaten Malang terdiri dari :

a. Akomodasi

Fasilitas akomodasi penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Malang berupa

10 hotel bintang dan 17 hotel melati, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Akomodasi Penunjang Wisata Kabupaten Malang

No	Jenis Hotel	Alamat
1.	Hotel Bintang	
	a) Kusuma Agro Hotel	Jl. Abdul Gani Atas 16 Batu, Malang
	b) Splindid Inn Hotel	Jl. Mojopahit 4 Malang
	c) Kartika Graha Hotel	Jl. Jaksas Agung Soeprapto 17 Malang
	d) Taman Regent Hotel	Jl. Jaksas Agung Soeprapto 12-16 Malang
	e) Tugu Hotel	Jl. Tugu 3 Malang
	f) Purnama Hotel	Jl. Raya Selecta 1-15 Batu, Malang
	g) Kartika Wijaya Hotel	Jl. Panglima Besar Sudirman 127 Batu, Malang
	h) Pelangi Hotel	Jl. Merdeka Selatan 3 Malang
	i) Royal Orchid Garden Hotel	Jl. Indragiri 4 Batu, Malang
	j) Klub Bunga Butik Resort Hotel	Jl. Kartika 1 Batu, Malang
2.	Hotel Melati	
	a) Arjuno View Hotel	Jl. Dr. Wahidin 25 Lawang, Malang
	b) Wonosari Agro Wisata	Kebun The Wonosari Lawang Singosari, Malang
	c) Niagara Hotel	Jl. Dr. Soetomo 63 Lawang, Malang
	d) Waringin Anom Hotel	Jl. Sumber Kembar 10 Lawang, Malang
	e) Wisata Air Panas Songgoriti Hotel	Jl. Songgoriti 30 Batu, Malang
	f) Selorejo Hotel	Jl. Selorejo, Ngantang, Malang
	g) Roro Hotel	Jl. Raya Wonosari Gunung Kawi Wonosari, Malang
	h) Chandra Hotel	Jl. Pasarean Gunung Kawi 329 Wonosari, Malang
	i) Indah Jaya Hotel	Jl. Pasarean Gunung Kawi 554 Wonosari, Malang
	j) Surya Abadi Hotel	Jl. Desa Wonosari Gunung Kawi RT 9 RW 5 Wonosari, Malang
	k) Gunung Tabor Hotel	Desa Tulus Besar, Tumpang, Malang
	l) Wisata Tidar	Jl. Tidar No 1 Malang
	m) Pondok Wisata Panca Pesona	Jl. Raya Poncokusumo 72 Poncokusumo, Malang
	n) Pondok Wisata Apel Ana (<i>Homestay</i>)	Jl. Raya Poncokusumo 158 Poncokusumo, Malang
	o) Pondok Wisata Pak Lukman/Hajjah Sih (<i>Homestay</i>)	Jl. Raya Poncokusumo, Poncokusumo, Malang
	p) Pondok Wisata Manalagi (<i>Homestay</i>)	Jl. Raya Poncokusumo, Poncokusumo, Malang
q) Pondok Wisata Bu Irma Mashuri (<i>Homestay</i>)	Jl. Diponegoro RT 37 RW 6 Poncokusumo, Malang	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 2005

b. Rumah makan (restoran)

Jumlah rumah makan (restoran) yang ada di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 20 buah yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Restoran Penunjang Wisata Kabupaten Malang

No.	Nama Restoran	Letak/Lokasi
1.	Ayam Goreng Prambanan	Jl. Randu agung 106 Singosari, Malang
2.	Warung Biru	Jl. Raya Singosari 121 Singosari, Malang
3.	Depot Sari Rasa	Jl. Dr. Wahidin 29/61 Lawang, Malang
4.	Depot Surabaya	Jl. Dr. Wahidin 47 Lawang, Malang
5.	Depot "29"	Jl. Raya Randuagung 83 Singosari, Malang
6.	Depot "99"	Jl. Dr. Cipto Bedali – Lawang
7.	Depot Cobra Agung	Jl. Raya Randu Gumbolo 32 Singosari, Malang
8.	HTS	Jl. Dr. Wahidin 123 Lawang, Malang
9.	Kertosono	Jl. Dr. Wahidin 99 Lawang, Malang
10.	Kantri Club	Jl. Dr. Wahidin 169 Lawang, Malang
11.	Pondok Alam	Jl. Dr. Wahidin 184 Lawang, Malang
12.	Soto Ayam Lombok	Jl. Mondoroko Singosari, Malang
13.	Sopo Nyono	Jl. Dr. Wahidin 45 Lawang, Malang
14.	Pringandes	Jl. Dr. Wahidin 12 Lawang, Malang
15.	Warung Anda	Jl. Ahmad Yani 24 Kepanjen, Malang
16.	Bojana Puri Restaurant	Jl. Raya Ngudilengkung Kepanjen, Malang
17.	Warung Ikan Segar	Jl. Raya Kebun Agung 117 Pakisaji, Malang
18.	Gunung Kawi Restaurant	Jl. Pasarean Gunung Kawi 283, Wonosari, Malang
19.	Jakarta Restaurant	Jl. Pasarean Gunung Kawi, Wonosari, Malang
20.	New Merdeka Restaurant	Jl. Pasarean Gunung Kawi, Wonosari, Malang

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 2005

Selain hal tersebut diatas, salah satu penunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Malang adalah adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin terjadi setiap tahun. Biasanya kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan ritual yang biasa dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan bukan berdasarkan tahun Masehi ataupun berdasarkan kelender matahari, tetapi berdasarkan perhitungan tahun Jawa yang dihitung berdasarkan pergerakan bulan. Sebagai gambaran, kegiatan adat/upacara-upacara ritual yang biasa dilakukan masyarakat di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Kalender Kegiatan Pendukung Wisata
Di Kabupaten Malang

No.	Obyek wisata	Acara/kegiatan	Tanggal	Konsumen/pangsa pasar
1.	Balekambang	Nyepi Sedekah Laut	1 Saka 1 Suro	Regional Regional
2.	Ngliyep	Labuhan	1 Suro	Regional
3.	Sendang biru/ P. Sempu	Mandi di sumber air P. Sempu	7-8 Syawal	Regional
4.	Wendit	Taman Hiburan (pertunjukan kesenian, <i>play ground</i>)	Lebaran Ketupat (7-8 Syawal)	Lokal
5.	Pantai Tamban	Upacara Syawalan	7-8 Syawal	Regional
6.	Sumber Jenon	Taman hiburan (pertunjukan kesenian, <i>play ground</i>)	1 Syawal	Lokal

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang Tahun 2006

II. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Kabupaten Malang

a. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 22 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan pasal 3, disebutkan bahwa Badan Perencanaan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Kabupaten

Badan Perencanaan Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan dan menilai atas pelaksanaannya.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Badan Perencanaan Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Perencanaan Daerah (PROPEDA)
- b. Penyusunan Program-Program Tahunan Daerah (PROPETADA) sebagai pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pasal ini yang dibiayai oleh Daerah atau Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Dinas/Instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di wilayah Daerah.
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran.
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan atau penelitian terhadap usulan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh Dinas-dinas/instansi yang ada di wilayah Daerah.
- f. Penyusunan Persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (RAKORBANG).
- g. Pelaksanaan Monitoring, menganalisa dan mengevaluasi, mendokumentasikan serta memvisualisasikan hasil pelaksanaan pembangunan serta berbagai potensi di daerah.
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang

a. Landasan Hukum Institusi

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan pariwisata adalah dua dinas yang digabung. Penggabungan tersebut yang sebelumnya terdiri dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dilegalisasi menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai berikut :

Tugas pokoknya adalah :

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan dan pariwisata
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *data base* serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan sarana dan pos telekomunikasi, pemaduan moda transportasi dan pengembangan wisata dan kelestarian budaya
- c. Perencanaan strategis pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- d. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan pariwisata
- e. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan dan pariwisata
- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- g. Pembinaan UPTD
- h. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- i. Pembinaan dan melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang perhubungan dan pariwisata
- k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

c. Kelembagaan Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang
 - a. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - 1) Seksi Lalu Lintas
 - 2) Seksi Angkutan
 - b. Kepala Bidang Keselamatan Sarana dan Pos Telekomunikasi
 - 1) Seksi teknik Keselamatan Sarana
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - c. Kepala Bidang Pemadu Moda Transportasi
 - 1) Seksi Simpul Transportasi
 - 2) Seksi Manajemen Perparkiran
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Wisata dan Kelestarian Budaya
 - 1) Seksi Pengembangan Wisata
 - 2) Seksi Pelestarian Kebudayaan
 - e. Kepala UPTD, terdiri dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD Singosari, UPTD Kapanjen, UPTD Pagak, UPTD Gondanglegi, UPTD Turen, UPTD Tumpang, UPTD Pujon, dan UPTD Dampit
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dan Unit Wisata Balekambang

a. Perusahaan Daerah Jasa Yasa

Perusahaan Daerah Jasa Yasa merupakan salah satu perusahaan daerah diantara beberapa perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai perusahaan daerah yang terdiri dari PD Jasa Yasa, PDAM, dan BPP (Badan Pinjaman Pasar) yang kesemuanya itu tergabung pada BUMD. PD Jasa Yasa didirikan pada tanggal 29 Agustus 1973 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1973.

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diadakannya reorganisasi pada PD Jasa Yasa Malang, sehingga dikeluarkan Perda No 40 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Malang.

Di semua unit usaha yang dikelola oleh PD Jasa Yasa, semua letaknya sangat berdekatan, hanya beberapa saja yang letaknya berjauhan, sehingga diperlukan banyak karyawan dalam mengurusinya. Di setiap unit-unit wisata dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada direktur Perusahaan jasa Yasa. Jumlah karyawan yang ada di sekretariat atau kantor pusat berjumlah 30 orang. Sedangkan yang ada di tiap-tiap unit obyek wisata berjumlah sekitar 10 orang.

Berdasarkan Perda No 40 Tahun 2000, tugas pokok masing-masing bagian pengelola PD Jasa Yasa adalah sebagai berikut :

1. Badan pengawas
2. Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Administrasi
- c. Direktur Usaha, yang membawahi :
 1. Seksi perencanaan, penelitian, dan pengembangan
 2. Seksi promosi dan penyuluhan
3. Satuan Pengawas Intern
4. Unit-Unit Usaha

Unit-unit Usaha dipimpin oleh seorang kepala unit usaha yang bertanggungjawab pada Direktur. Unit-unit usaha meliputi : Percetakan, Apotik Kabupaten, Pemandian Wendit, Pemandian Dewi Sri, Pemandian Sumber Waras, Pemandian Metro, Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Hotel, pemandian air panas dan kolam renang Songgoriti, Taman Burung Jeru. Semua Kepala Unit Usaha yang ditunjuk bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Malang, yang setiap tahunnya diminta pertanggungjawabannya. Setelah itu, diadakan evaluasi hasil kerja di tiap-tiap unit usaha.

b. Unit Wisata Balekambang

Pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang secara langsung ditangani oleh PD Jasa Yasa Kabupaten Malang berdasarkan Perda No 11 Tahun 1973 tanggal 23 Agustus 1973 yang disahkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No HK/86/311 SK tanggal 21 Februari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C tanggal 28 Februari 1974.

Struktur organisasi unit wisata Balekambang terdiri dari 1 orang Kepala Unit yang membawahi 1 orang Kasubag Keamanan yang masing-masing mempunyai staf.

Struktur organisasi yang ada di unit wisata Balekambang terdiri dari Kepala Unit; Bendahara; Kepala Sub Tata Usaha yang membawahi staf loket, abumen, losmen, dan inventaris; Kepala Sub Keamanan yang membawahi staf yang terdiri dari SAR laut, satpam, kebersihan dan operator diesel.

Kepala Unit bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas di unit wisata Balekambang, mulai dari sumber daya manusia sampai dengan keadaan yang ada di kawasan wisata Pantai Balekambang. Bendahara bertugas mengatur sirkulasi pendapatan, dari loket disetorkan ke bendahara, kemudian disetorkan ke PD Jasa Yasa. Bendahara juga bertugas sebagai penanggungjawab keuangan dan mengatur pembagian gaji karyawan. Kepala Sub Tata Usaha bertanggung jawab terhadap masalah administrasi yang ada di Pantai Balekambang. Staf loket bertugas mengatur keluar-masuknya tiket. Staf losmen bertanggungjawab terhadap penyewaan losmen. Staf inventaris bertugas menjaga dan merawat inventaris yang ada di kantor pengelola Pantai Balekambang.

4. Gambaran Umum Pantai Balekambang

Pantai wisata Balekambang termasuk dalam wilayah Desa Srigonco Kecamatan Bantur, yaitu sejauh 57 km ke arah selatan dari pusat Kota Malang. Untuk dapat mengunjungi pantai tersebut harus melewati daerah Gondanglegi, lalu naik dari Pasar Bantur ke jurusan Balekambang, karena hanya sampai pasar saja, kecuali jika ada mobil sewaan.

Pantai ini dipenuhi dengan karang yang timbul sewaktu air surut, karang tersebut sepanjang 2,5 km dan sejauh kurang lebih 2000 m ke arah laut. Pantai

Balekambang dipenuhi dengan aneka ikan hias serta satwa laut yang lain yang juga sangat mengundang pesona.

Pulau yang dihubungkan dengan Pantai Balekambang tersebut yaitu : Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Hanoman yang berjarak 100 m dari daratan dan dihubungkan dengan jembatan dengan lebar 1 m. Pada salah satu pulau telah dibangun sebuah pura tempat pemujaan umat Hindu Malang Raya dan Bali. Selain itu, Pantai Wisata Balekambang tersedia pula penginapan yang sederhana serta perkemahan pramuka.

Setiap tahun sekali dipergunakan untuk menyemayamkan air suci (satu malam) yang diperoleh dari tujuh sumur/sumber mata air di hutan Balekambang. Keesokan harinya air suci tersebut diambil lagi untuk pelaksanaan upacara Jalanidhipuja bagi masyarakat Hindu, bahkan ada yang dibawa ke Bali atau tempat lain untuk melaksanakan upacara Nyepi.

Begitu pula bagi penduduk Desa Srigonco, setiap 1 Suro juga melakukan upacara adat, yaitu upacara Suroan (upacara 1 Suro). Hal ini dilakukan sebagai upacara syukuran atas banyaknya rahmat yang diterima oleh masyarakat, juga memohon agar dijauhkan dari malapetaka serta tahun berikutnya banyak lagi rahmat yang dilimpahkan pada masyarakat Srigonco. Upacara Suroan ini merupakan even dengan arak-arakan Jolen dan kesenian tradisional menuju Pulau Hanoman sebagai pusat kegiatan selamatan dan Jolen dilarung ke laut. Kedua upacara ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang dianggap sakral.

a. Kondisi Topografi dan Geologi

Kondisi fisik Pantai Balekambang merupakan daerah pantai dengan pasir-pasir yang memanjang sepanjang garis pantai merupakan suatu wilayah pantai yang menarik, karena berbatasan langsung dengan Laut Selatan (Samudra Indonesia). Adapun kondisi pantainya adalah relatif landai dan tidak curam, sedangkan kawasan datar pada sektor pantai merupakan tanah dengan klasifikasi permeabilitas yang tinggi, peka terhadap erosi, bertekstur pasir, kandungan tanah liat sebesar 40 % serta memiliki tingkat kesuburan yang baik.

b. Hidrologi

Kondisi hidrologi Pantai Balekambang selain dipengaruhi oleh keadaan air laut juga sangat dipengaruhi oleh adanya aliran sungai, air permukaan tanah yang dangkal, dan sumber mata air. Pantai Balekambang merupakan daerah muara sungai karena umumnya aliran sungai mengalir ke arah selatan, yang akan berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman yang tumbuh karena ekosistem dalam suatu lingkungan akan berlangsung dalam suatu mata rantai yang saling mempunyai ketergantungan. Kebutuhan air bersih bagi aktivitas yang ada di Pantai Balekambang dipenuhi oleh adanya dua mata air, yaitu yang ada di sebelah utara Pulau Hanoman dengan jarak sekitar 1 kilometer dari pantai wisata.

c. Kelompok Vegetasi

Sejalan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dasar wilayah, maka dominasi kelompok vegetasi yang tumbuh (hutan campuran) di penuhi oleh kondisi fisik yang ada dan orientasi primer pola kerja penduduk di sekitar lokasi wisata, dimana pola kerja agraris masih menjadi jenis kegiatan yang dominan.

III. Penyajian Data Fokus

1. Kondisi Potensi Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Balekambang

Kondisi riil potensi pariwisata di kawasan wisata Pantai Balekambang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Kondisi Obyek Wisata Pantai Balekambang

No.	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Lokasi	Desa Srignonco Kecamatan Bantur
2.	Luas Areal	20 Ha
3.	Unit Pengelola	PD Jasa Yasa Kabupaten Malang
4.	Aksesibilitas	
	a. Rute	Malang – Gondanglegi
	b. Jarak	25 km
	c. Jalan	<i>Hotmix</i>
	d. Lebar	6-8 m
	e. Kondisi	Baik
	f. Moda	Bus, <i>Colt</i>
	1). Rute	Gondanglegi – Bantur
	a. Jarak	20 km
	b. Jalan	Aspal
	c. Lebar	4-5 m
	d. Kondisi	Sedang
	e. Moda	<i>Colt</i>
	2). Rute	Bantur – Balekambang
	a. Jarak	18 km
	b. Jalan	Aspal
	c. Lebar	3-4 m
	d. Kondisi	Rusak
	e. Moda	<i>Colt</i>
5.	Potensi	Pemandangan bagus, pasir putih bersih, pencapaian mudah, fasilitas lengkap, kampung 5 km, garis pantai 2,1 km, pantainya landai, ombaknya bagus
6.	Fasilitas dan Utilitas	Penginapan, pendopo, kamar mandi/WC, warung makanan, <i>souvenir shop</i> , kantor pengelola, loket, parkir, keamanan, listrik (diesel), air minum, mushola, pura, <i>shelter</i> , <i>camping ground</i> , tempat duduk, dan tempat sampah
7.	Asal wisatawan	Jawa Timur

(1)	(2)	(3)
8.	Vegetasi a. Sepanjang rute b. Sekitar obyek	Hutan jati, kebun campuran, tanaman tebu, hutan campuran, hutan bakau Hutan campuran
9.	Potensi penunjang	Pulau Ismoyo, Pulau Hanoman, Pulau Wisanggeni
10.	Kegiatan penunjang a. Rutin b. Dinamis	Tidak ada Cari kerang, mandi di laut, berkemah
11.	Manfaat obyek wisata	Pariwisata, olahraga, penelitian, kegiatan ritual, diklatsar
12.	Tempat-tempat yang bisa dikembangkan	Pulau Hanoman, Pulau Wisanggeni, areal parkir, areal <i>camping ground</i> , pendopo dan sekitarnya, stan makanan, dan hutan menuju Pantai Hanoman

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang Tahun 2006

a. Jenis Wisata dan Obyek Wisata

1) Wisata Alam

Pantai ini dipenuhi dengan karang yang timbul sewaktu air surut, karang tersebut sepanjang 2,5 km dan sejauh kurang lebih 2000 m ke arah laut. Pantai Balekambang dipenuhi dengan aneka ikan hias serta satwa laut yang lain yang juga sangat mengundang pesona. Pantai ini dengan pantai yang lain dihubungkan dengan jembatan yang lebar dan panjang. Pulau yang dihubungkan dengan Pantai Balekambang tersebut antara lain, yaitu : Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Hanoman. Selain itu, Pantai Wisata Balekambang tersedia pula bungalow dan penginapan yang sederhana serta perkemahan pramuka.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Suyono selaku Kasi Promosi PD Jasa Yasa, beliau mengatakan bahwa :

“Daya tarik Pantai Balekambang yang berupa wisata alam antara lain adalah pantainya banyak karang dan ikan hias yang bisa dilihat kalau pantai itu surut, pemandangan alamnya yang masih perawan, pasir putih dengan air yang jernih, sungai air tawar yang berada di bawah jembatan, dan terdapat tiga

pulau, yaitu Pulau Hanoman, Wisanggeni, dan Ismoyo. Hal ini semua yang banyak dicari oleh wisatawan yang datang kesana.” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.00 di ruang kerjanya).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Sarminah selaku salah satu staf di obyek wisata Pantai Balekambang bahwa :

“Bila dibandingkan dengan pantai yang lain, Pantai Balekambang kesannya lebih bagus. Kita bisa melihat pemandangan pesisir laut sampai ke timur lewat pura. Yang biasanya disenangi oleh pengunjung yaitu pandangan bisa leluasa, udaranya yang sejuk, karena terbawa angin laut (musiman). Kalau sekarang ini, air lautnya musim dingin” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.00 di ruang kerjanya).

2) Wisata Budaya

Setiap tahunnya penduduk Desa Srigonco melakukan upacara adat, yaitu upacara Suroan (upacara 1 Suro) dan upacara Jalanidhipuja. Kedua upacara ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang dianggap sakral. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Suyono selaku Kasi Promosi PD Jasa Yasa, bahwa :

“Di Pantai Balekambang, diadakan upacara larung sesaji 1 Suro yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Srigonco dan sekitarnya. Sedangkan pada hari raya Nyepi, ada upacara Jalanidhipuja yang dilaksanakan oleh umat Hindu Dharma wilayah Malang Raya dan sekitarnya” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.10 di ruang kerjanya).

a) Upacara Suroan (Upacara 1 Suro)

Setiap tahunnya penduduk Desa Srigonco melakukan upacara ini secara rutin. Upacara dilaksanakan sejak tahun 1910. Penduduk mengadakan upacara ini di tepi Pantai Balekambang. Mereka berduyun-duyun membawa bahan upacara berupa makanan dan beberapa sesaji yang dianggap sebagai makanan suci. Upacara ini dipimpin oleh seorang sesepuh desa, penduduk desa duduk diatas hamparan pasir di

tepi pantai serta menghadap laut, kemudian pemimpin upacara melalui prosesi upacara dengan membaca doa-doa khusus yang berisi meminta keselamatan dan kesejahteraan bagi penduduk desa dan keluarga masing-masing agar tidak terjadi bencana pada tahun ini dan tahun yang akan datang.

Setelah pembacaan doa, lalu sesajen yang dibawa sebagian dimakan dan sebagian lagi dilarungkan ke laut. Sejak tahun 1985, upacara labuhan ini dihidupkan kembali dan pelaksanaannya dilakukan dari Pulau Hanoman setelah dilaksanakan selamatan. Iringan peserta upacara berangkat dari depan pendopo untuk melaksanakan Labuhan Suran di Pulau Hanoman mulai pukul 10.00 sampai sore hari.

Kesenian setempat menyemarakkan upacara ini selama siang dan beberapa malam sebelumnya, antara lain ludruk, ketoprak, dan wayang kulit, disamping beberapa lomba ketangkasan bagi pengunjungnya.

b) Upacara Jalanidhipuja

Jalanidhipuja merupakan rangkaian upacara umat Hindu Dharma untuk menyambut datangnya Tahun Baru Saka/Hari Raya Nyepi, yaitu pada waktu matahari bergeser ke utara meninggalkan khatulistiwa dan dimulainya musim panas. Itulah saat-saat untuk membersihkan jiwa dan raga serta benda-benda upacara keagamaan di sanggar/pura dengan menerima air suci, yang pelaksanaannya sedapat mungkin di tepi laut.

Pelaksanaan pertama kali dilaksanakan di Pantai Balekambang oleh umat Hindu se-Kabupaten Malang. Dipilihnya Pantai Balekambang ini karena memiliki 3 buah pulau yang indah, selain itu Pantai Balekambang sudah tersedia bangunan pura dan lagi menurut sesepuh desa disana dikatakan bahwa seorang pertapa yang pertama

kali yang datang kesana adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Hari raya Nyepi biasanya jatuh pada bulan Sapar tahun Jawa. Upacara Jalanidhipuja ini biasanya disebut juga Mekiis/Yekiyes/Melis/Melasti dan dilaksanakan pada hari Minggu. Dipilih hari Minggu karena mempunyai pertimbangan agar masyarakat yang datang pada pelaksanaan upacara ini banyak. Upacara ini dilaksanakan dengan melarungkan jolen ke tengah laut pada pukul 09.00 yang dilakukan sampai sore hari.

b. Sarana dan Prasarana Wisata

Sesuai tabel diatas, sarana dan prasarana yang ada di Pantai Balekambang antara lain : penginapan, pendopo, kamar mandi dan WC umum, warung makanan, toko cinderamata (*souvenir shop*), kantor pengelola, loket masuk, tempat parkir, gardu pandang, listrik (diesel), air minum, musholla, pura, *shelter*, *camping ground*, tempat duduk, dan tempat sampah. Fasilitas yang ada di obyek wisata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Pantai Balekambang.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pengembangan

Tujuan diadakannya perencanaan pengembangan di kawasan wisata Pantai Balekambang adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, dalam hal ini potensi wisata pantai sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sejalan dengan program pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang dan Jawa Timur.

Sedangkan sasaran dari perencanaan pengembangan adalah kawasan wisata Pantai Balekambang yang berada di Desa Srigonco Kecamatan Bantur. Dalam sasaran ini, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk menata dan mengembangkan kawasan Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata yang menarik, indah dan nyaman didasarkan pada pandangan wisatawan.

b. Bentuk dan Langkah Perencanaan Pengembangan

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, telah dibuat rencana pengembangannya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zakaria selaku Kasi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Kawasan wisata Pantai Balekambang telah dibuat rencana pengembangannya. Rencana pengembangan dimaksudkan bahwa yang sudah ada itu dikembangkan, misal dari dua menjadi sepuluh. Dari rencana pengembangan kemudian dibuat rencana pembangunannya, dimana rencana pembangunan itu mengandung dua pemahaman, yaitu dari tidak ada dibuat menjadi ada, dan dari ada dibuat menjadi lebih baik” (Wawancara pada tanggal 18 April 2006 pukul 09.30 di ruang kerjanya).

Badan Perencanaan Kabupaten Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berwenang melaksanakan perencanaan, begitu juga perencanaan pariwisata. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Soewardi selaku Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencanaan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa :

“Badan Perencanaan Kabupaten Malang berwenang atau mempunyai fungsi dalam membuat perencanaan secara global, dengan infrastruktur yang menunjang, termasuk didalamnya perencanaan dalam bidang pariwisata. Bapekab disini juga melaksanakan studi kelayakan (*feasibility study*) pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang. Baru setelah itu dibuat

desain engineering detail (ded) dan nilai investasinya. Butuh dana berapa, terus mana yang mau dibangun terlebih dahulu” (Wawancara pada tanggal 18 April 2006 pukul 11.00 di ruang kerjanya).

Dalam pelaksanaan perencanaan pengembangannya, selain melibatkan Badan Perencanaan, juga mengikutsertakan berbagai pihak yang mempunyai fungsi masing-masing. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Zakaria selaku Kasi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan dan pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata, melibatkan berbagai pihak, antara lain :

- 1) Badan Perencanaan Kabupaten Malang memegang fungsi perencanaan pengembangan pariwisata. Jadi yang merencanakan adalah Bapekab dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dengan melibatkan bantuan dari Perguruan Tinggi
- 2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata memegang fungsi promosi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Malang
- 3) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) memegang fungsi sebagai pelaksana pengembangan fisik, dalam arti yang melaksanakan proyek pembangunan fisik, misal pembangunan jalan dan sarana prasarana
- 4) Perusahaan Daerah Jasa Yasa memegang fungsi pengelola, yaitu perencanaan operasionalisasi kegiatan sehari-hari dalam unit-unit wisata, termasuk Pantai Balekambang, misalnya kunjungan wisatawan tahun ini itu dari mana saja; promosi dan lain-lain. Jadi, PD Jasa Yasa disini mengambil tindakan untuk melaksanakan RIPP” (Wawancara pada tanggal 18 April 2006 pukul 10.00 di ruang kerjanya).

Bentuk dan langkah perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi :

- 1) Mempelajari kebijaksanaan dan peraturan yang ada, studi-studi yang telah dilakukan terhadap wilayah perencanaan**

Kebijaksanaan yang dipelajari antara lain yaitu kebijaksanaan nasional pengembangan pariwisata, kebijaksanaan pengembangan pariwisata Propinsi Jawa Timur, kebijaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Malang, dan

kebijaksanaan ketentuan umum Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang terhadap wilayah perencanaan Pantai Balekambang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

“Dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang tetap mengacu pada kebijakan yang ada di atasnya yaitu kebijaksanaan nasional pengembangan pariwisata, dalam artian diharuskan supaya berkesinambungan. Jadi harus mereview segala kebijakan pariwisata yang ada dalam wilayah perencanaan” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya).

a) Kebijakan Nasional Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pariwisata nasional disusun berdasarkan potensi, masalah dan peluang pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terlebih dahulu menyusun suatu kerangka kerja yang berupa strategi dasar kebijaksanaan pembangunan negara.

Dalam memajukan pariwisata nasional, Presiden Republik Indonesia telah menurunkan beberapa Keppres maupun Inpres, diantaranya Inpres tanggal 9 Maret 1983 Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan memberikan beberapa kemudahan, antara lain :

- a. Memberikan pembebasan visa masuk bagi wisatawan bisnis dari 29 negara
- b. Pembukaan jalan dan pintu masuk penerbangan dan pelabuhan laut
- c. Kemudahan untuk menunjang usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata, seperti perkreditan, keringanan pajak, bea masuk, perijinan pemerintah pusat dan daerah
- d. Meningkatkan pendidikan kepariwisataan untuk menciptakan tenaga profesional

e. Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sudah mulai mengadakan pembenahan maupun perencanaan pengembangan dengan menggali aset-aset wisata yang masih terpendam di wilayahnya untuk diangkat ke permukaan agar menjadi aset nasional.

b) Kebijakan Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam bidang kepariwisataan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari kebijaksanaan nasional. Hal ini telah dirumuskan dalam program pengembangan pariwisata Jawa Timur dalam setiap program pembangunan lima tahunannya, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata Jawa Timur merupakan bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Jawa Timur selalu didasarkan dan sejalan dengan kebijaksanaan, pola pengembangan dan tujuan-tujuan nasional.

Pembangunan pariwisata Jawa Timur dilakukan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan daerah menjadi kegiatan ekonomi yang diandalkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata, dibutuhkan upaya peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pariwisata dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembangunan Daerah Tujuan Wisata

- a. Secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu dengan sektor pembangunan yang lain serta tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan hidup. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merealisasikan kebijaksanaan tersebut antara lain :

- 1) Pembangunan produk wisata diarahkan untuk dapat mencerminkan nilai-nilai kepribadian dan karakter daerah serta upaya melestarikan lingkungan hidup
 - 2) Pembangunan daerah tujuan wisata diwujudkan dengan mengembangkan obyek-obyek wisata potensial yang dapat berperan sebagai pusat-pusat pengembangan pariwisata di daerah
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Berdasarkan potensi pembangunan, mengupayakan Jawa Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata Konvensi yang menarik dan mampu bersaing. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah :
- 1) Menumbuhkan iklim usaha yang sehat untuk peningkatan pengembangan sarana dan fasilitas konvensi
 - 2) Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja
 - 3) Meningkatkan dukungan dan peran serta instansi pemerintah dan swasta
- c. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur sangat dibutuhkan dalam upaya mengembangkan dan mendayagunakan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor pembangunan yang lain
- d. Kawasan wisata/obyek wisata yang telah dirintis pengembangannya akan ditingkatkan, baik penambahan fasilitas kepariwisataan maupun upaya pemeliharaan.

2. Pengembangan Usaha Pariwisata

Pengembangan dan pendayagunaan usaha pariwisata ditingkatkan dengan membentuk keterpaduan usaha pemantapan manajemen usaha dan peningkatan mutu pelayanan. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- a. Membentuk keterpaduan usaha pariwisata melalui keterkaitan dan terjalinnya sistem informasi antar jenis usaha agar terdapat iklim saing menunjang
- b. Meningkatkan ketrampilan tenaga operasional di bidang-bidang usaha pariwisata
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha pariwisata
- d. Peningkatan pelayanan di pintu-pintu masuk melalui peningkatan kelengkapan informasi, sarana dan prasarana
- e. Peningkatan kapasitas angkutan wisata dan saranawisata lainnya
- f. Mewujudkan citra positif produk wisata dengan :
 - 1) Memberikan keramahan dan suasana Indonesia
 - 2) Menumbuhkan rasa aman, tertib dan kesejukan lingkungan
 - 3) Ketertiban dan kenyamanan produk wisata
 - 4) Menciptakan kenangan bagi wisatawan terhadap pelayanan dan produk wisata
- g. Mengupayakan standar desain tentang jenis-jenis cinderamata menurut kelompok, teknis pengepakan dan pengiriman.

Disamping kebijaksanaan dan langkah tersebut diatas, ditetapkan pula langkah yang mencakup 3 sektor, yaitu :

1. Sektor pemerintah : mencakup sub sektor obyek/kawasan wisata, pemasaran, pembinaan industri dan pembinaan aneka wisata
2. Sektor pemerintah diluar sub sektor pariwisata : mencakup sub sektor kehutanan dan pengawasan perlindungan alam serta kebudayaan
3. Sektor industri/swasta, mencakup sub sektor obyek/atraksi wisata dan industri pariwisata.

Dikaitkan dengan usaha pemerintah daerah Jawa Timur untuk berpartisipasi meningkatkan penerimaan devisa negara melalui peningkatan arus wisata asing, diantara langkah-langkah dari ketiga sektor tersebut diatas yang penting artinya untuk menarik kedatangan wisatawan asing ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Timur adalah :

1. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi produk wisata Jawa Timur serta mengarahkannya dalam bentuk paket-paket wisata yang dapat dipasarkan pada wisatawan mancanegara
2. Meningkatkan citra Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata dengan memberikan paket-paket wisata tersebut pada berbagai sarana promosi dan pameran-pameran didalam maupun diluar negeri
3. Meningkatkan pelayanan serta kelancaran perjalanan arus wisatawan asing di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Timur

Dalam pengembangan pariwisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Timur, telah ditentukan 9 kawasan wisata, yaitu : Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Madura, Kawasan Banyuwangi, Kawasan Jember dan sekitarnya, Kawasan

Probolinggo – Lumajang, Kawasan Malang – Pasuruan, Kawasan Kediri dan sekitarnya, Kawasan Madiun dan sekitarnya, dan Kawasan Tuban – Bojonegoro.

c) Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat perlu dikembangkan atau ditingkatkan pembangunannya, sehingga dapat meningkatkan devisa daerah dan tidak kalah dengan sektor lainnya. Adapun tujuan pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang adalah :

- a. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat setempat, serta memperkenalkan nilai-nilai dan kebudayaan Kabupaten Malang
- b. Mengembangkan dan mendayagunakan industri pariwisata dalam meningkatkan penyerapan wisatawan nusantara maupun mancanegara sebagai sarana pendapatan daerah dan masyarakat serta mendorong perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha
- c. Meningkatkan usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan dan usaha-usaha lainnya guna ikut serta memelihara, memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan, dengan tetap menjaga kepribadian dan martabat bangsa
- d. Membina dan mengembangkan pariwisata daerah secara terpadu dan terencana, terutama mengenai sadar wisata di kalangan masyarakat serta promosi wisata dalam paket-paket wisata

Peningkatan pembangunan pariwisata tidak dapat lepas dari tujuan pembangunan pariwisata itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan pariwisata agar pengembangan pariwisata di Kabupaten

Malang tetap berwawasan lingkungan. Adapun langkah-langkah kebijaksanaan pariwisata yang ditempuh adalah :

1. Pembangunan kepariwisataan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan pengembangan dan pendayagunaan sumber serta potensi kepariwisataan daerah, sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai penerimaan devisa. Dalam pembangunan pariwisata, perlu dijaga kepribadian bangsa serta kelestarian dan motto lingkungan hidup.
2. Pariwisata dalam negeri terus dikembangkan dan diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan. Usaha pembinaan dan pengembangan kepariwisataan daerah perlu diimbangi dengan usaha kreatif dalam peningkatan kualitas kebudayaan bangsa yang ada di daerah, memperkenalkan peninggalan-peninggalan sejarah serta kekayaan dan keindahan alam, termasuk alam bahari yang terdapat di Kabupaten Malang. Sehubungan dengan itu, juga diusahakan pelayanan dan penyelenggaraan wisata dan kegiatan promosi serta pemasarannya
3. Diperlukan langkah-langkah yang terarah dan terpadu serta penanganan profesional dalam rangka pengembangan obyek-obyek wisata, kegiatan promosi serta pemasarannya
4. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan daerah masih perlu dibina secara intensif dan ditingkatkan, sehingga dapat dicegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara

Selain kebijaksanaan diatas, kegiatan pariwisata juga diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang, kebijaksanaan pariwisata yang ditetapkan berhubungan dengan kawasan lindung yang harus dilestarikan, karena kawasan wisata yang dikembangkan biasanya berada di dalam kawasan lindung tersebut. Jadi kebijaksanaan yang diambil sebagai dasar dari perencanaan kawasan wisata harus didasari pada kebijaksanaan yang ditetapkan bagi kawasan lindung.

d) Kebijakan Ketentuan Umum Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang terhadap Wilayah Perencanaan Pantai Balekambang

1. Strategi Pengembangan Obyek Wisata

Guna mencapai sasaran pengembangan obyek wisata di Kabupaten Malang, perlu dilakukan serangkaian penyusunan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan kegiatan pengembangan pariwisata, yang harus mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Karenanya, maka kebijaksanaan perencanaan pariwisata di Kabupaten Malang diarahkan pada strategi sebagai berikut :

- a. Mengaitkan strategi pengembangan wisata antara Kabupaten dan Kotamadya, terutama yang terkait dengan wisatawan mancanegara
- b. Mengaitkan pola tujuan wisata di wilayah Kabupaten Malang dengan pola tujuan wisata regional, minimal dalam lingkup Propinsi Jawa Timur
- c. Membuat Kabupaten Malang sebagai salah satu tujuan wisata dalam lingkup regional, minimal dalam lingkup Jawa Timur
- d. Pengembangan obyek dikaitkan dengan pengembangan ekonomi lainnya, terutama untuk penyediaan prasarana dan utilitas

- e. Meningkatkan hanya beberapa obyek untuk jadi andalan tujuan wisata, supaya target yang diinginkan dapat dicapai
- f. Membuat kegiatan spesifik di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang untuk dijadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan
- g. Pembenahan obyek dan peningkatan pelayanan wisata
- h. Menjajagi kemungkinan peningkatan partisipasi swasta dalam pengembangan obyek
- i. Pengelolaan manajemen dan pelayanan obyek harus mengarah ke profesional
- j. Promosi wisata ke calon wisatawan ditingkatkan, misalnya dengan mengencarkan iklan-iklan di media massa, penyebaran brosur, dan lain-lain
- k. Membuat paket wisata yang operasional, menarik dan terkait dengan wisata regional
- l. Pengadaan fasilitas di setiap obyek wisata, terutama pada obyek wisata prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang mendatangi obyek wisata tersebut, karakter pengunjung, kondisi bentang alam dan arah pandang yang baik di lokasi tersebut
- m. Pengadaan utilitas disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung, yang menunjang kenyamanan dalam berwisata
- n. Dalam pengembangan tata bangunan, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bentuk bangunan disesuaikan dengan budaya setempat, minimal bentuk atapnya

- 2) Peletakan bangunan tidak menutupi arah pandang (*view*) yang baik, terutama pada lokasi yang tidak membahayakan pengunjung maupun ekosistem setempat
 - 3) Tinggi bangunan tidak membahayakan menghalangi arah pandang yang baik, terutama pada lokasi-lokasi cagar budaya atau obyek wisata budaya
 - 4) Kerapatan bangunan tidak menyalahi aturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- o. Untuk menunjang pengembangan obyek-obyek wisata, perlu dilakukan pengembangan, pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana yang menuju obyek wisata, maupun penyediaan sarana penunjang, seperti angkutan umum

Adapun strategi pengembangan didasarkan pada pembagian Sub-SWP Kabupaten Malang yang meliputi Sub-SWP - Sub-SWP berikut ini :

- a. Malang Selatan, meliputi Kecamatan Kalipare, Donomulyo dan Pagak ditetapkan sebagai lokasi wisata pantai tropis. Upaya yang perlu dilakukan adalah pengadaan dan peningkatan jasa pariwisata, sarana dan prasarana penunjang, pengembangan zona wisata serta pengembangan industri cinderamata. Obyek wisata yang ada adalah Pantai Modangan, Jonggring Saloko, Ngliyep, Kondang Merak, Balekambang, Wonogoro dan Pantai Bajulmati
- b. Malang Tengah, meliputi Kecamatan Wagir, Wonogiri, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang dan Tajinan, ditetapkan sebagai lokasi wisata bendungan, pemandian dan pesarean/wisata makam. Upaya yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan kondisi dan

peningkatan fasilitas wisata pada obyek-obyek wisata andalan, serta pengembangan obyek wisata dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Obyek wisata yang ada adalah Bendungan Sutami-Lahor, Sengguruh, Pemandian Sumberjenon, Pemandian Metro, Coban Glotak dan Gunung Kawi.

- c. Malang Utara, meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Bumiaji, Batu, Junrejo, Dau, Karangploso, Singosari dan Lawang, yang ditetapkan sebagai kawasan wisata agro dan wisata budaya. Obyek wisata yang ada adalah Candi Singosari, Stupa Sumberjenon, Pemandian Sengkaling, Coban Rondo, Pemandian Dewi Sri, Candi Badut, Pemandian Lembah Dieng dan Bendungan Selorejo. Upaya yang perlu dilakukan adalah pengembangan obyek wisata dengan memperhatikan wilayah-wilayah konservasi bangunan-bangunan bersejarah.
- d. Malang Timur–Utara, yang meliputi Kecamatan Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, dan Wajak. Pengembangan obyek wisata pada Sub SWP ini adalah sebagai wisata agro. Pada wilayah ini, pengembangan dipadukan dengan Kawasan Wisata Bromo, Tengger, Semeru pada jalur Tumpang–Poncokusumo. Obyek wisata yang ada di lokasi ini adalah Coban Pelangi, Wendit, Candi Jago, dan Candi Kidal.
- e. Malang Timur Selatan, yang meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading dan Sumbermanjing Wetan, ditetapkan sebagai kawasan wisata Pantai Tambaksari, Pantai Lenggoksono, Pantai Sipelot dan Pantai Licin.

2. Kebijakan Ketentuan Umum Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang Terhadap Wilayah Perencanaan Pantai Balekambang

Ketentuan umum dan arahan pengembangan untuk obyek wisata Pantai Balekambang adalah :

- a. Sempadan pantai adalah 100 m dari titik tertinggi air
- b. Pengembangan terbatas dan tidak menimbulkan masalah lingkungan

Alternatif pengembangan yang direkomendasikan pada obyek wisata Pantai Balekambang adalah wisata pantai, lintas alam, penelitian, ritual, diklatsar, perkemahan, *jogging track*, penginapan dan kesenian. Pengaturan dalam kawasan yakni pada pengembangan terbatas, kepadatan bangunan rendah dengan tinggi bangunan maksimal 2 lantai. Bangunan diarahkan pada model bangunan Jawa dengan konstruksi semi permanen serta keberadaan bangunan tidak menutupi *view*. Pengaturan pada luar kawasan diarahkan pada daerah konservasi dan atau kawasan hutan lindung.

Sebagai penunjang pengembangan Pantai Balekambang diarahkan dengan :

- 1) Penetapan desa budaya yaitu Desa Srigonco
- 2) Perbaikan jalan Bantur – Balekambang (18 km)
 - a. Pengadaan angkutan wisata
 - b. Perbaikan dan pengadaan fasilitas sesuai dengan pengembangan yaitu air dan listrik
 - c. Penyediaan cinderamata dari karang atau binatang laut
 - d. Atraksi utama adalah Nyepi dan sedekah laut (larung sesaji) pada 1 Suro.

2) Membuat identifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitar dan dalam wilayah perencanaan

Tahap kedua yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang adalah membuat identifikasi karakter sosial ekonomi Kabupaten Malang dan masyarakat Kecamatan Bantur. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

“Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar dan dalam wilayah perencanaan perlu dilaksanakan dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, karena pariwisata itu tidak bisa lepas dari masyarakat sekitar. Turis mungkin saja tidak bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga nantinya harus ada sosialisasi. Mengingat budaya dan adat-istiadat orang luar jelas berbeda dengan masyarakat Kecamatan Bantur” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.05 WIB di ruang kerjanya).

a) Tinjauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Malang

1. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kabupaten Malang secara keseluruhan terdiri dari 33 kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci terdiri dari 12 kelurahan, 377 desa, 3.138 rukun warga dan 14.346 rukun tetangga. Kabupaten Malang memiliki luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Malang tersebut adalah 351.456,99 km². Dari seluruh total luas tersebut sekitar 54,93 % dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (tegalan, sawah, perkebunan), sedangkan pemanfaatan untuk permukiman penduduk baru sekitar 13,71 %.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang secara rata-rata tahun 2005 sebesar 681 jiwa per km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.393.959 jiwa yang

terdiri dari laki-laki sejumlah 1.190.105 jiwa dan perempuan sejumlah 1.203.854 jiwa. Kepadatan tertinggi ada pada Kecamatan Pakis dan Kepanjen, yaitu pada kisaran 1.900 jiwa per km². Sedangkan yang terendah di Kecamatan Ngantang, Donomulyo dan Sumbermanjing Wetan yaitu masih pada kisaran 400 jiwa per km².

Terdapat beberapa kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi (lebih dari 1.000 jiwa per km²) dan ternyata kecamatan-kecamatan tersebut juga merupakan kecamatan berpotensi di Kabupaten Malang, bahkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan sekitarnya, yaitu Kecamatan Turen, Bululawang, Gondanglegi, Sumberpucung, Pakisaji, Dau, Lawang, dan Singosari. Mata pencaharian penduduk di pusat kota masing-masing kecamatan tersebut yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan juga cukup tinggi.

Struktur umum penduduk Kabupaten Malang masih termasuk struktur umur muda dengan komposisi umur muda (20-39 tahun) sekitar 32,87 %. Sedangkan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 67,32 %. Dengan melihat komposisi ini, maka sumber daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

Di bidang ketenagakerjaan juga cukup potensial dengan laju penambahan tenaga kerja setiap tahunnya terus meningkat. Dalam tahun 2005, angkatan kerja mencapai 963.204 orang (usia 18 tahun keatas), angkatan kerja tertampung 931.012 orang (usia 18 tahun ke atas) dan pencari kerja 61.665 orang (usia 18 tahun ke atas). Untuk perkembangan bursa tenaga kerja pada lowongan kerja sebanyak 2.985 orang, penempatan tenaga kerja sebanyak 2.335 orang dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 377 orang. Sedangkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

untuk tahun 2005 sebanyak 2.335 orang, terdiri dari 2.310 perempuan dan 25 laki-laki. Sebagian besar berasal dari wilayah Malang Selatan, meliputi Kecamatan Donomulyo, Pagak, Bantur, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan.

Agama yang dipeluk oleh penduduk di Kabupaten Malang dalam tahun 2005 tercatat : Islam 2.250.321 orang, Kristen Protestan 107.728 orang, Katolik 20.349 orang, Hindu 9.576 orang, Budha 3.112 orang dan lain-lain 2.873 orang. Sedangkan perkembangan tempat ibadah sampai dengan tahun 2005 menunjukkan jumlah sebagai berikut : masjid 1.873 buah, langgar dan mushola 8.813 buah, gereja 242 buah, vihara 17 buah, pura/kuil 52 buah dan kelenteng 4 buah.

2. Kondisi Perekonomian

Penerimaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2005 mengalami kenaikan sekitar 5 % dibanding tahun sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan keuangan Kabupaten Malang meningkat, diantaranya adalah kenaikan PAD. Selain itu, berbagai penerimaan yang merupakan dana perimbangan mengalami kenaikan dari target anggarannya. Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar 586,721 miliar rupiah ternyata dapat terealisasi sebesar 599,928 miliar rupiah. Kenaikan penerimaan ini dapat dijadikan cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Subsidi/bantuan telah menjadi ketergantungan bagi pemerintah daerah dan cukup sulit untuk menghilangkannya. Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah pusat berupaya agar ketergantungan tersebut dihilangkan sedikit demi sedikit. Struktur penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang masih tergantung pada subsidi/bantuan. Hal ini terlihat dari besarnya porsi dana perimbangan, sebagai

contoh Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2005 mencapai 513.563.000.000,- dari seluruh penerimaan daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap total PDRB. Secara umum, peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok tersier, yaitu sekitar 47,4 %, kemudian kelompok primer sekitar 31,7 % dan sisanya kelompok sekunder sebesar 20,9 %.

Setiap kelompok memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian (primer), sektor perdagangan, hotel dan restoran (tersier) dan sektor industri (sekunder). Sektor-sektor tersebut menjadi pemicu roda perekonomian, karena sekitar 70 % kegiatan ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Pertumbuhan ini diukur dengan satu ukuran/satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar dan menggunakan ukuran daya beli atas dasar harga tetap (konstan).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama empat tahun terakhir secara umum cenderung meningkat, yaitu sebesar 3,64 % pada tahun 2002, 3,82 % pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 naik sebesar 5,14 %. Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, baik regulasi maupun kelembagaannya, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah kemampuan sumber daya manusia, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah

beberapa faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang tahun 2004 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 10.943.140.880,-. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 3.043.891.230,-.

Pendapatan perkapita (*income perkapita*) ADHB Kabupaten Malang tahun 2004 sebesar Rp 4.331.434,22. Sedangkan berdasarkan ADHK sebesar Rp 1.204.810,7.

3. Kondisi Sistem Pariwisata

Transportasi merupakan keperluan yang sangat pokok bagi kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dalam menciptakan atau meningkatkan kemudahan daya dukung (aksesibilitas) dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Sistem transportasi yang ada di Kabupaten Malang yaitu transportasi jalan raya, transportasi kereta api dan transportasi udara.

Sistem transportasi di Kabupaten Malang secara keseluruhan didominasi oleh transportasi jalan raya, dengan sarana dan prasarana yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan. Dalam pengembangannya sampai saat ini, prasarana transportasi jalan raya telah ditingkatkan antara lain dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang ada, maupun pembangunan-pembangunan jembatan yang dapat meningkatkan sektor perekonomian. Dalam rangka pembangunan daerah, maka terhadap aspek peningkatan jalan dan pengangkutan akan menentukan arah pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Malang.

a. Prasarana

Guna menunjang angkutan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, fungsi jalan raya sudah jelas sangat vital. Fungsi jalan di Kabupaten Malang memiliki jalan negara, propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa dengan jaringan jalan-jalan yang meliputi :

- 1) Malang – Singosari – Lawang (yang menuju Surabaya)
- 2) Malang – Turen – Dampit (yang menuju Lumajang)
- 3) Malang – Batu – Pujon (yang menuju Kediri)
- 4) Malang – Kepanjen – Sumberpucung (yang menuju Blitar)

Kondisi jalan yang ada secara keseluruhan menunjukkan keadaan baik, sedang dan buruk, sehingga perlu ditingkatkan prasarana perhubungan di Kabupaten Malang untuk menunjang pemerataan kegiatan pembangunan antar kecamatan dan antar kelurahan/desa, terutama di wilayah strategis. Untuk sektor pariwisata, tampaknya kondisi prasarana merupakan salah satu penunjang kegiatan yang utama. Saat ini, jalan-jalan yang menuju ke lokasi-lokasi wisata sudah memiliki kondisi yang buruk, sehingga para wisatawan enggan melaluinya, terutama jalan-jalan yang menuju ke Malang Selatan. Jembatan yang ada di Kabupaten Malang terdiri dari jembatan beton, jembatan gelogor baja dan jembatan kayu/bambu. Jembatan beton sebanyak 1.100 buah, jembatan gelogor baja sebanyak 124 buah dan jembatan kayu/bambu sebanyak 195 buah.

Dengan demikian, maka prasarana jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Malang masih memerlukan adanya peningkatan, baik itu berupa pemeliharaan

maupun perbaikan-perbaikan agar aspek perekonomian yang telah mengalami perkembangan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

b. Sarana

Jenis kendaraan di Kabupaten Malang terdiri dari empat jenis, yaitu : mobil penumpang, mobil pribadi, mobil barang dan sepeda motor. Untuk mobil penumpang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, mobil penumpang yang terbanyak digunakan yaitu jenis minibus (*station*). Kecenderungan pada kenaikan jumlah mobil penumpang ini disebabkan oleh semakin berkembangnya jumlah penduduk. Mobil penumpang jenis yang lain yaitu bus, tetapi penggunaan jenis bus ini jumlahnya kecil karena jika dilihat dari pemakaiannya juga lebih banyak membutuhkan jenis *colt* (minibus), mengingat medan dan kondisi jalan yang ada.

Jenis kendaraan umum yang lain berupa truk merupakan angkutan barang, jika ditinjau dari pengoperasiannya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu mobil barang/truk umum dan yang bukan umum. Mobil truk dalam kenyataannya, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan alat transportasi terus meningkat sepanjang tahun. Demikian juga untuk jenis sepeda motor yang merupakan alat angkut pribadi. Di Kabupaten Malang, jenis sepeda motor ada juga yang difungsikan sebagai ojek.

Di Kabupaten Malang juga terdapat jaringan jalan kereta api yang menghubungkan kota-kota Surabaya – Lawang – Malang – Blitar – Kediri – Madiun. Kereta api yang berhenti di Kabupaten Malang umumnya adalah kereta api barang dan penumpang. Kabupaten Malang juga merupakan lintasan kereta api yang sangat dominan karena penumpang yang bepergian ke Surabaya, Banyuwangi, Madiun dan

jakarta dapat naik kereta api. Untuk perkembangan perekonomian Kabupaten Malang lebih banyak dilayani oleh jalur jalan raya. Dalam jalur regional, kereta api belum menjadi salah satu faktor pembangkit untuk perkembangan wilayah Kabupaten Malang di bidang perekonomian, tetapi lebih berupa pembangkit perkembangan dibidang kependudukan dan lebih jauh lagi untuk perkembangan kepariwisataan.

Di Kabupaten Malang baru memiliki sistem transportasi udara pada tahun 1993. Lapangan udara Abdul Rahman Saleh yang terletak di Kecamatan Pakis dulu merupakan kawasan tertutup yang hanya dioperasikan untuk Angkatan Udara. Baru pada tahun 1993 dioperasikan untuk umum, dengan pelayanan untuk jalur penerbangan domestik/lokal dan mempunyai kapasitas tampung yang terbatas. Untuk itu, di tahun-tahun mendatang, hal ini perlu ditingkatkan lagi sehingga nantinya dapat meningkatkan devisa negara khususnya dalam hal pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Malang.

b) Tinjauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bantur

1. Kependudukan

Kecamatan Bantur adalah salah satu dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 10 desa, yaitu Desa Bandungrejo, Bantur, Karang Sari, Pringgodani, Rejosari, Rejoyoso, Srigonco, Sumberbening, Wonokerto, dan Wonorejo. Untuk jumlah penduduk Kecamatan Bantur di tiap-tiap desa pada tahun 2005, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Kecamatan Bantur Tahun 2005

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Bandungrejo	9.346
2.	Bantur	11.835
3.	Karangsari	7.530
4.	Pringgondani	7.169
5.	Rejosari	6.750
6.	Rejoyoso	7.477
7.	Srignonco	4.425
8.	Sumberbening	5.583
9.	Wonokerto	9.439
10.	Wonorejo	1.425

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang Tahun 2005

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah total penduduk di Kecamatan Bantur tahun 2005 adalah 70.979 orang. Dengan jumlah penduduk terbesar di Desa Bantur yaitu 11.835 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada pada Desa Wonorejo, yaitu sebesar 1.425 jiwa.

2. Perekonomian

Kecamatan Bantur mempunyai potensi dan produk unggulan di bidang pertanian antara lain : tanaman ketela pohon, padi, jagung, kedelai dan kacang tanah; perkebunan meliputi perkebunan kelapa, tebu, dan gula aren; industri antara lain industri gamping, alat dapur, genteng dan krupuk; serta obyek-obyek wisata, antara lain Pantai Kondangmerak berada di Desa Sumberbening dan Pantai Balekambang di Desa Srignonco.

Sedangkan profesi penduduk Kecamatan Bantur pada tahun 2005 terdiri dari : pedagang sejumlah 2.676 orang, PNS 452 orang, TNI/Polri 52 orang, buruh tani 2.598 orang, buruh bangunan 1.482 orang, jasa 882 orang, dan lainnya 10.970 orang.

3) Membuat identifikasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai karakteristik dan kondisi obyek dan daya tarik wisata Pantai Balekambang

Dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, tahap ketiga yang ditempuh adalah dengan membuat identifikasi mengenai kondisi obyek wisata Pantai Balekambang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

“Ketika kita akan melaksanakan pengembangan kawasan wisata, maka kita harus melihat karakteristik obyek wisata tersebut, sehingga nantinya akan diketahui apa yang akan ditonjolkan oleh obyek wisata tersebut dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan obyek wisata tersebut. Misal dalam bidang prasarana, untuk pulau dalam kawasan wisata itu perlu diberi penangkal gelombang. Analisa tapak juga dilaksanakan untuk mengatur sirkulasi dan keindahan dalam kawasan wisata” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.10 WIB di ruang kerjanya).

a) Fisik Dasar

a. Kondisi topografi dan geologi

Kondisi fisik Pantai Balekambang merupakan daerah pantai dengan pasir-pasir yang memanjang sepanjang garis pantai merupakan suatu wilayah pantai yang menarik, karena berbatasan langsung dengan Laut Selatan (Samudra Indonesia). Adapun kondisi pantainya adalah relatif landai dan tidak curam, sedangkan kawasan datar pada sektor pantai merupakan tanah dengan klasifikasi permeabilitas yang tinggi, peka terhadap erosi, bertekstur pasir, kandungan tanah liat sebesar 40 % serta memiliki tingkat kesuburan yang baik. Selain itu, kondisi alam yang ada telah banyak mempengaruhi tata lingkungannya, baik tata lingkungan pantai maupun tata

lingkungan aktivitas masyarakat setempat maupun pengunjung (wisatawan) yang dipengaruhi ekosistem yang ada.

b. Hidrologi

Kondisi hidrologi Pantai Balekambang selain dipengaruhi oleh keadaan air laut juga sangat dipengaruhi oleh adanya aliran sungai, air permukaan tanah yang dangkal, dan sumber mata air. Pantai Balekambang merupakan daerah muara sungai karena umumnya aliran sungai mengalir ke arah selatan. Kondisi hidrologi ini pada kenyataannya akan berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman yang tumbuh karena ekosistem dalam suatu lingkungan akan berlangsung dalam suatu mata rantai yang saling mempunyai ketergantungan. Kebutuhan air bersih bagi aktivitas yang ada di Pantai Balekambang dipenuhi oleh adanya dua mata air, yaitu yang ada di sebelah utara Pulau Hanoman dengan jarak sekitar 1 km dari pantai wisata.

c. Kelompok Vegetasi

Sejalan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dasar wilayah, maka dominasi kelompok vegetasi yang tumbuh (hutan campuran) dienuhi oleh kondisi fisik yang ada dan orientasi primer pola kerja penduduk di sekitar lokasi wisata, dimana pola kerja agraris masih menjadi jenis kegiatan yang dominan.

b) Analisis Tapak

Analisis tapak ini dilakukan terhadap fisik dasar, analisa view, kelayakan lahan untuk pengembangan, kesesuaian lokasi dan sirkulasi obyek wisata dalam rangka menyusun suatu perencanaan tapak terhadap obyek wisata.

1. Analisa Pengaturan

Analisa pengaturan obyek diawali dari pengelolaan pada lokasi-lokasi obyek wisata yang sudah ada dan berkembang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lokasi tersebut sudah dikenal, karenanya akan selalu menjadi tujuan pengunjung/wisatawan sehingga diperlukan peningkatan pelayanan terhadap pengunjung/wisatawan
- b. Adanya kemungkinan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengunjung maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Oleh karenanya, diperlukan cara-cara guna mencegah kemungkinan kerusakan lingkungan obyek wisata, antara lain :
 - 1) Pendirian bangunan penyangga
 - 2) Penanaman pohon pelindung
 - 3) Pengaturan sirkulasi dalam lokasi obyek
 - 4) Pengawasan oleh petugas terhadap pengunjung
- c. Adanya permasalahan-permasalahan sebagai akibat dari kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang tersedia, seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya dikarenakan kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memudahkan analisa pengaturan, obyek wisata Pantai Balekambang dibagi dalam 3 (tiga) lokasi yang sudah berkembang saat ini dan bagian lokasi yang belum berkembang.

2. Pengelolaan pada lokasi yang sudah berkembang

a. Lokasi I

Keadaan lokasi :

- 1) Kemampuan lahan cukup baik dengan kelengkapan atribut lansekap yang terdiri dari lahan yang relatif datar dengan pepohonan yang besar
- 2) Lokasi I saat ini digunakan sebagai tempat parkir kendaraan-kendaraan besar/umum
- 3) Kegiatan yang sudah ada dan berkembang adalah perkemahan dan piknik di sekitar pantai.

Pengaturan yang dapat dilakukan :

- 1) Pengaturan tempat parkir sehingga lebih rapi, teratur dan indah
- 2) Penyediaan tempat-tempat sampah disekitar obyek
- 3) Perbaikan tempat-tempat areal perkemahan
- 4) Peningkatan penyediaan tempat-tempat duduk untuk bersantai bagi para pengunjung

b. Lokasi II

Keadaan lokasi :

- 1) Kemampuan lahan cukup baik dengan kelengkapan atribut lansekap yang terdiri dari lahan yang relatif datar dengan pepohonan yang besar
- 2) Saat ini digunakan sebagai tempat perdagangan yang terdiri dari warung-warung makanan dan minuman serta fasilitas penunjang lainnya berupa kamar mandi/WC umum

- 3) Kegiatan yang sudah ada dan berkembang adalah perkemahan dan piknik di sekitar pantai.

Pengaturan yang dapat dilakukan :

- 1) Perbaiki jalan masuk ke lokasi sehingga pengunjung merasa nyaman saat berjalan-jalan di dalam lokasi
- 2) Perbaiki pengaturan warung-warung makanan agar lebih menarik
- 3) Pengaturan tempat-tempat khusus untuk kios/toko cinderamata
- 4) Pengaturan terhadap pedagang kaki lima sehingga tidak mengganggu pemandangan bagi wisatawan
- 5) Perbaiki areal perkemahan menjadi areal yang khas bagi wisatawan
- 6) Penyediaan tempat-tempat sampah
- 7) Peningkatan penyediaan tempat-tempat duduk untuk bersantai bagi para pengunjung.

c. Lokasi III

Keadaan lokasi :

- 1) Kemampuan lahan cukup baik dengan kelengkapan atribut lansekap yang terdiri dari lahan yang relatif datar dengan pepohonan yang besar
- 2) Fasilitas yang tersedia saat ini : tempat penginapan, kantor pengelola, tempat ibadah, warung makanan, kios/toko cinderamata, kamar mandi/WC umum dan tempat-tempat untuk bersantai
- 3) Kegiatan yang sudah ada dan berkembang adalah mandi di laut, piknik dan jalan-jalan santai di tepi pantai.

Pengaturan yang dapat dilakukan :

Untuk meningkatkan pelayanan umum maupun pencegahan terhadap penurunan kualitas lingkungan pada lokasi III ini, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah mengatur kembali penempatan fasilitas yang ada saat ini agar lebih menarik, antara lain dilakukan :

- 1) Pemindahan tempat penginapan di bagian selatan yang menutupi pemandangan laut bebas
 - 2) Peningkatan penyediaan tempat-tempat sampah di sekitar pantai yang sering digunakan pengunjung/wisatawan untuk duduk dan bersantai
 - 3) Peningkatan penyediaan tempat-tempat duduk untuk bersantai di sekitar pantai yang langsung menghadap ke laut, sehingga pengunjung/wisatawan tidak memanjat pepohonan di sekitar pantai.
3. Pengelolaan pada lokasi yang belum berkembang :

Berdasarkan penilaian lahan, terdapat beberapa fasilitas yang dapat dikembangkan antara lain pengembangan penginapan berupa *cottages*, *play ground* sebagai tempat bermain keluarga dan anak-anak serta taman-taman.

Dalam pengembangan areal baru ini, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu :

- 1) Pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan, perlu diusahakan agar sedikit sekali berdampak terhadap kerusakan fisik maupun pada sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya
- 2) Areal untuk pengembangan penginapan (*cottages*) dijaga agar tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan disertai pembangunan pertamanan.

c). *Pembagian Zoning*

Dalam perencanaan pengembangan obyek, obyek wisata Pantai Balekambnag dibagi dalam 8 (delapan) zona pengembangan, yaitu :

- 1) Zona I : Merupakan zona *entrance* dengan fasilitas yang tersedia, terdiri dari loket dan pintu masuk, dengan luas 4,2 ha.
- 2) Zona II : Zona prasarana penunjang. Penyediaan dan pengembangan fasilitas tempat parkir, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah. Zona ini memiliki luas 3,1 ha.
- 3) Zona III : Zona pengembangan kios cinderamata/souvenir kerajinan, pujasera dan kios makanan. Luas zona 2,7 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas warung/kantin makanan dan minuman, kios/toko cinderamata, kios/toko buah-buahan, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 4) Zona IV : Zona pengembangan *camping ground* dan lahan cadangan, dengan luas 1,4 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas areal perkemahan, tempat upacara, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 5) Zona V : Zona pengembangan fasilitas umum dengan kelengkapan fasilitas berupa kantor pengelola, penginapan, restoran, pendopo, shelter, tempat duduk, parkir dan lahan cadangan. Zona ini membutuhkan lahan seluas 2,7 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas penginapan, kantor pengelola, pendopo, tempat parkir, tempat-tempat ibadah, warung/kantin makanan dan minuman, tempat-tempat duduk untuk bersantai, *play ground*.

- 6) Zona VI : Zona pengembangan panggung panggung terbuka dan *play ground* dengan luas 4,1 ha.
- 7) Zona VII : Zona pengembangan *cottages*, *shelter*, dan fasilitas penunjang *cottages* serta lahan pengembangan, memiliki luas 2, 9 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas *cottages*, tempat parkir, warung/kantin makanan dan minuman, kios/toko cinderamata, tempat-tempat duduk untuk bersantai, taman bunga, kolam renang.
- 8) Zona VIII : Zona pengembangan volly pantai, dengan luas 1,9 ha.

d). Fasilitas dan Utilitas

1). Kebutuhan air bersih

Kebutuhan air bersih bagi para wisatawan untuk saat ini dirasa belum mencukupi, namun pihak pengelola sudah berusaha agar kebutuhan tersebut bisa ditingkatkan lagi. Pihak pengelola dalam hal ini PD Jasa Yasa telah membangun pipa jaringan air bersih sepanjang 2 km. Kebutuhan air bersih selalu meningkat, terutama pada hari-hari libur maupun hari besar nasional yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

2). Kebutuhan listrik

Kebutuhan akan penerangan juga sangat penting bagi para wisatawan, terutama wisatawan yang menginap di lokasi wisata Pantai Balekambang. Untuk sementara, jaringan listrik yang belum tersedia diganti dengan pengadaan generator genset pembangkit tenaga listrik. Sehingga pihak pengelola perlu mengusahakan pengadaan jaringan listrik untuk penerangan di kawasan Pantai Balekambang selain

untuk kebutuhan yang lain seperti kemah pramuka. Sehingga para wisatawan merasa dimanjakan oleh pihak pengelola, selain itu dengan adanya penerangan juga memudahkan pihak pengelola dalam mengadakan pengawasan terhadap lokasi yang dikelola, dan lagi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi suatu obyek wisata.

3). Telepon

Jaringan telepon yang tersedia sekarang adalah 1 unit telepon kantor. Menurut peneliti, pihak pengelola sebaiknya bekerjasama dengan pengelola telepon seluler untuk pemasangan jaringan tower pemancar sinyal. Hal ini untuk membantu wisatawan yang membawa telepon genggam untuk berhubungan dengan relasi atau keluarganya. Selain itu juga memudahkan para wisatawan dalam berkomunikasi.

4). Sistem pembuangan sampah

Pada saat ini, sistem pembuangan sampah yang ada adalah konvensional yaitu dengan menggunakan penyediaan tong sampah. Setelah sampah menumpuk, tiap 2 hari sekali diangkut untuk dibuang di tempat pembuangan akhir di sekitar hutan yang berjarak 5 km dari lokasi awal, sehingga perlu ditambah dengan penyediaan kontainer sampah, sehingga memudahkan dalam pengangkutan sampah. Sampah meningkat, terutama pada hari liburan sekolah dan upacara keagamaan yang diadakan di pantai wisata Balekambang.

5). Drainase

Untuk drainase di Pantai Balekambang dibuang secara alamiah, yaitu keseluruhan saluran air yang ada dialirkan pada sungai yang terdekat. Hal ini perlu

ditata ulang, karena sistem drainase yang ada sekarang dikhawatirkan akan mencemari pantai. Oleh karena itu, diperlukan sistem drainase tertutup disamping diberi filter pengolah limbah. Sehingga air yang dialirkan ke sungai tidak mencemari pantai dan kawasan pantai tetap terpelihara kebersihannya.

e). Konsep Pertamanan

Pengaturan pertamanan dikembangkan dengan menyesuaikan pada kondisi dan situasi obyek yang ditujukan untuk keindahan serta kelestarian lingkungan. Tanaman yang digunakan sebaiknya merupakan ciri khas obyek wisata Pantai Balekambang, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Jenis Tanaman Yang Dapat Ditanam di Pantai Balekambang

No	Jenis Tanaman	Kelompok Tanaman		
		Khas	Yang Ada	Penambahan
1.	Tanaman keras	Bakau	Bakau, Kelapa, Waru, Pandan, Semak	Palem Raja, Bambu, Flamboyan, Akasia
2.	Tanaman Hias	-	Penitian, Cemara	Bunga-bunga (palma botol, palma kuning, palma merah), Perdu

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

f). Prasarana dan Sarana Transportasi

- 1) Pasarana berupa jalan perlu peningkatan mutu mulai dari kecamatan Gondanglegi – Kecamatan Bantur sampai lokasi obyek wisata Pantai Balekambang

- 2) Perlu dikembangkan rute transportasi umum dari Kota Malang ke lokasi obyek wisata, sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung

4). Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi serta potensi dan peluang pengembangan yang dimungkinkan

Langkah keempat yang dilaksanakan yaitu membuat identifikasi permasalahan, potensi dan peluang pengembangan yang mungkin dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

”Dalam mengembangkan obyek wisata untuk menjadi lebih besar, maka harus dilihat potensi atau peluang beserta masalahnya. Untuk menentukannya, bisa memakai analisa SWOT, sehingga dapat dilihat potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Permasalahan perlu diidentifikasi, karena masalah itu ada untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.15 di ruang kerjanya).

1. Potensi dan Masalah

Dalam menyusun perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, Badan Perencanaan Kabupaten Malang membuat daftar potensi dan masalah obyek wisata Pantai Balekambang terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui masalah apa yang sedang dihadapi dalam wilayah perencanaan sekitar obyek wisata dan potensi-potensi apa yang nantinya dapat dikembangkan. Berikut tabel potensi dan masalah obyek wisata Pantai Balekambang :

Tabel 8
Potensi dan Masalah Obyek Wisata Pantai Balekambang

No.	Lokasi Obyek	Masalah	Potensi
1.	Pantai Balekambang	Jalan Bantur – Balekambang 18 km buruk, utilitas kurang	Pantai, <i>view</i> baik, upacara ritual

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa masalah yang ada dalam wilayah perencanaan sekitar Pantai Balekambang adalah kondisi jalan Bantur menuju obyek wisata Balekambang sejauh 18 km yang buruk dan utilitas yang kurang. Sedangkan potensinya adalah wisata pantai dengan view baik, serta upacara ritual tiap tahun sekali oleh masyarakat sekitar obyek wisata Pantai Balekambang.

2. Pengembangan yang dimungkinkan

Setelah diketahui potensi dan masalah yang ada di Pantai Balekambang, maka disusunlah pengaturan dan arahan pengembangan dan peluang pengembangan apa saja yang mungkin dilaksanakan pada obyek wisata Pantai Balekambang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Pengaturan dan Arahan Pengembangan
Obyek Wisata Pantai Balekambang

No	Ketentuan Umum dan Arahan Pengembangan	Pengaturan		Penunjang
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	
1.	Sempadan pantai 100 m dari titik tertinggi air. Pengembangan terbatas dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Alternatif pengembangan : wisata pantai, lintas alam, penelitian, ritual, diklatsar, perkemahan, <i>jogging track</i> , berenang, penginapan dan kesenian.	Pengembangan terbatas. Kepadatan bangunan rendah, tinggi bangunan maksimal 2 lantai. Bangunan Jawa, semi permanen, bangunan tidak menutupi <i>view</i> .	Konservasi, hutan lindung	Desa Budaya : Srigonco. Perbaikan Jalan Bantur Balekambang (18km). Angkutan wisata. Fasilitas sesuai pengembangan, listrik, air. Cinderamata dari karang / binatang laut. Atraksi utama : Nyepi dan Sedekah Laut (1 Suro)

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan dan arahan pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang diusahakan tidak menimbulkan masalah lingkungan, baik pengaturan dalam kawasan maupun luar kawasan. Alternatif pengembangan yang dapat dilaksanakan yaitu wisata pantai, lintas alam,

penelitian, ritual, diklatsar, perkemahan, *jogging track*, berenang, penginapan dan kesenian. Obyek wisata Pantai Balekambang ini ditunjang oleh Desa Budaya, yaitu Desa Srigonco dengan atraksi utama yang dilaksanakan pada hari raya Nyepi dan Sedekah Laut (1 Suro).

Sedangkan untuk obyek wisata Pantai Balekambang, pangsa pasar yang mungkin dikembangkan yaitu keluarga dan remaja (lokal dan regional). Kegiatan yang mungkin dilakukan disana adalah berkemah, *hiking*, berkuda, *jogging*, berenang, kesenian, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10
Pangsa Pasar dan Atraksi yang Mungkin Dikembangkan
Di Obyek Wisata Pantai Balekambang

No.	Jenis peluang pengembangan	Keterangan
1.	Pangsa Pasar (s/d 2004/2005)	Keluarga dan remaja (lokal dan regional)
2.	Kegiatan	a. Berkemah b. <i>Hiking</i> c. Berkuda d. <i>Jogging</i> e. Berenang f. Kesenian g. Lain-lain

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

5). Membuat identifikasi dan rencana teknik wilayah perencanaan yang meliputi rencana pengembangan fasilitas, utilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya

Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh yaitu membuat identifikasi dan rencana teknik wilayah perencanaan, baik rencana pengembangan fasilitas, utilitas dan sarana pendukung lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

”Dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata, fasilitas-fasilitas dalam obyek wisata harus ada sebagai pelengkap sebagai sarana dan prasarana

penunjang yang harus disediakan dalam suatu obyek wisata. Penataan ruang digunakan untuk memperindah kawasan tersebut supaya wisatawan tertarik untuk mengunjungi obyek dan untuk kenyamanan. Kalau kawasan wisata terkesan semrawut, wisatawan tentunya menjadi tidak nyaman” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.20 di ruang kerjanya).

1. Rencana Eksternal Kawasan

Rencana Eksternal kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi rencana penataan koridor serta rencana penataan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung kegiatan pariwisata di sepanjang koridor tersebut serta dapat mengakomodasikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat.

a) Rencana Penataan Koridor

Koridor yang dimaksud dalam kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi kawasan yang berada di sekitar Pantai Balekambang sendiri maupun daerah yang berada di sepanjang jalur menuju pantai wisata. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan harmonis secara estetika dan keteraturan bagi para wisatawan yang menuju Pantai Balekambang maupun secara tidak langsung menata tiap desa yang ada di jalur wisata Pantai Balekambang.

Kawasan yang masuk koridor dalam perencanaan ini adalah jalur wisata dari obyek wisata Pantai Balekambang sampai dengan kawasan di sekitar Desa Suwaru. Koridor atau lingkungan permukiman yang berada di pinggir jalan sepanjang jalur wisata Pantai Balekambang direncanakan memiliki jalur hijau berupa tanaman jenis cemara. Hal ini mengikuti kecenderungan yang ada sekarang dimana dominan jalur hijaunya berupa pohon cemara. Jenis jalur hijau berupa tanaman cemara ini dikembangkan di sekitar Desa Suwaru sampai sekitar Desa Bantur.

Adapun penataan koridor mulai sekitar Desa Bantur sampai Desa Srigonco dikembangkan model penataan dengan penyeragaman jenis vegetasi pagar halaman dengan menggunakan vegetasi berupa tanaman penitian. Disamping itu, perlu pengembangan jalur wisata antara Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep, dimana pada kawasan diantara dua obyek wisata Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep terdapat potensi wisata Kondang Merak serta Wonogoro. Arah pengembangan jalur wisata (*ecotourism*) ini dapat dikembangkan rute/jalan hiking Balekambang - Kondang Merak - Wonogoro - Ngliyep, yang dapat juga ditempuh dengan berkuda.

b) Rencana Pengembangan *Activity Support*

Activity Support dimaksudkan sebagai suatu kegiatan pendukung bagi pengembangan kegiatan yang ada di sekitar suatu kawasan. Terdapat berbagai macam *activity support* dalam suatu fungsi wilayah. Dalam hal ini antara lain dapat disebutkan kegiatan sektor informal seperti warung-warung makanan kecil dan sovenir, kegiatan jasa dan lain sebagainya. Rencana pengembangan *activity support* di sepanjang jalur koridor akan meliputi upaya mengakomodasikan usaha-usaha informal yang berkembang dan berkaitan langsung dengan pengembangan industri pariwisata secara umum maupun pengembangan pariwisata Balekambang sesuai dengan karakteristik potensi sekitar kawasan dan sepanjang koridor Pantai Wisata Balekambang.

Activity Support yang akan dikembangkan adalah mengadakan dan menata sentra sovenir adalah di pertigaan jalan menuju Balekambang dari Kecamatan Gondanglegi. Disamping itu, perlu juga dikembangkan pasar buah, khususnya buah pisang di Desa Srigonco, sehingga mampu mengakomodasikan usaha perdagangan

buah pisang pada masing-masing rumah. Rencana pengembangan sentra souvenir disamping secara langsung dan positif memberikan pelayanan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan juga dimaksudkan untuk mengembangkan sektor informal yang berkembang saat ini di sepanjang koridor tersebut, sehingga mampu memberikan efek ganda (*multiplier effect*) dalam hal usaha peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan.

2. Rencana Internal Kawasan

a) Rencana Pengembangan Zoning

Rencana pengembangan zoning di Pantai Balekambang diarahkan pada penentuan fungsi dan jenis kegiatan yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil analisa karakteristik serta potensi kawasan dan berdasarkan arahan dan penilaian terhadap arahan yang ada di Rencana Induk Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, maka Pantai Wisata Balekambang dapat dibedakan menjadi 8 zona, untuk memperjelas pola kegiatan dan pengembangan pada masing-masing kawasan. Rencana zoning di lokasi Pantai Balekambang didasari oleh beberapa aspek yang sangat mempengaruhi pola perkembangan kegiatan dan penataan fisik di kawasan, yaitu kondisi fisik dasar kawasan wisata Pantai Balekambang, analisa tapak, dan pola sirkulasi dan kegiatan wisatawan di lokasi wisata Pantai Balekambang

Zoning ini dimaksudkan untuk membagi tempat atau lokasi kegiatan berdasarkan jenis dan fungsi kegiatan wisatawan, sehingga menjadi jelas jenis penggunaan dan pemanfaatan lahan maupun fasilitas sesuai dengan kebutuhan tiap kegiatan yang ada.

- 1) Zona I : Merupakan zona *entrance* dengan fasilitas yang tersedia, terdiri dari loket dan pintu masuk, dengan luas 4,2 ha.
- 2) Zona II : Zona prasarana penunjang. Penyediaan dan pengembangan fasilitas tempat parkir, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah. Zona ini memiliki luas 3,1 ha.
- 3) Zona III : Zona pengembangan kios cinderamata/sovenir kerajinan, pujasera dan kios makanan. Luas zona 2,7 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas warung/kantin makanan dan minuman, kios/toko cinderamata, kios/toko buah-buahan, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 4) Zona IV : Zona pengembangan *camping ground* dan lahan cadangan, dengan luas 1,4 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas areal perkemahan, tempat upacara, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 5) Zona V : Zona pengembangan fasilitas umum dengan kelengkapan fasilitas berupa kantor pengelola, penginapan, restoran, pendopo, shelter, tempat duduk, parkir dan lahan cadangan. Zona ini membutuhkan lahan seluas 2,7 ha. Penyediaan dan pengembangan fasilitas penginapan, kantor pengelola, pendopo, tempat parkir, tempat-tempat ibadah, warung/kantin makanan dan minuman, tempat-tempat duduk untuk bersantai, *play ground*.
- 6) Zona VI : Zona pengembangan panggung panggung terbuka dan *play ground* dengan luas 4,1 ha.
- 7) Zona VII : Zona pengembangan *cottages*, *shelter*, dan fasilitas penunjang *cottages* serta lahan pengembangan, memiliki luas 2, 9 ha. Penyediaan dan

pengembangan fasilitas *cottages*, tempat parkir, warung/kantin makanan dan minuman, kios/toko cinderamata, tempat-tempat duduk untuk bersantai, taman bunga, kolam renang.

8) Zona VIII : Zona pengembangan volly pantai, dengan luas 1,9 ha.

b). Rencana Sirkulasi dan Jaringan Jalan

Sirkulasi dan jaringan jalan di Pantai Balekambang direncanakan terbagi menjadi 2 yaitu sirkulasi untuk pejalan kaki dan jaringan jalan untuk sirkulasi kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yang baik bagi pengunjung dan menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dengan menyatunya sistem sirkulasi orang dan kendaraan. Disamping itu secara teknis adalah untuk lebih menata kawasan wisata.

Rencana sistem sirkulasi dan jaringan jalan ini juga untuk membuka akses baru dan pengembangan kawasan secara utuh, sehingga lokasi-lokasi potensi untuk dikembangkan yang ada dalam kawasan wisata Pantai Balekambang terjangkau dan dapat dinikmati oleh para wisatawan.

c) Rencana Tapak

Rencana tapak dikembangkan berdasarkan hasil analisa tapak dan rencana pembagian zoning. Berdasarkan analisa tapak bahwa perlu adanya pengembangan dan pembukaan lokasi yang belum dikelola dan dikembangkan disamping pemantapan dan penataan tapak yang sudah ada. Rencana tapak ini diarahkan pada perluasan kawasan tepi pantai, terutama yang terdapat disekitar lokasi konsentrasi fasilitas yang ada sekarang. Di Kawasan Wisata Balekambang direncanakan untuk pemunduran tapak yang sudah ada karena kepentingan kebutuhan ruang terbuka dan

kebebasan view para pengunjung. Pemunduran tapak ini dilakukan melalui pentahapan, dimana direncanakan dan difungsikan dulu beberapa fasilitas yang baru kemudian fasilitas yang lama dihilangkan atau tidak difungsikan.

d) Rencana fasilitas dan penataan bangunan

1. Penginapan

Rencana penginapan di kawasan wisata Pantai Balekambang dibedakan menjadi 2 model yaitu penginapan dengan bentuk bangunan memanjang dan *cottages*. Penginapan direncanakan di zona IV dengan perletakan dimundurkan sampai 20 m dari kondisi eksisting dengan kapasitas tampung 10 kamar.

Penginapan ini menghadap ke pantai dengan *view* yang leluasa bagi wisatawan yang menginap. Spesifikasi bentuk dan lahan bangunan penginapan ini adalah :

- a. Tinggi bangunan satu lantai dan tidak melebihi ketinggian pohon-pohon yang menjadi salah satu unsur landsekap
- b. Sempadan muka bangunan ditentukan tidak berdasarkan kapling lahan, tetapi mengacu pada keleluasaan tampilan teras/serambi bangunan
- c. Tampilan bangunan bercorak tradisional dan bahan alami.

2. Warung makan dan restoran

Warung makan direncanakan pada lokasi dekat penginapan yang ada dan di lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi. Hal ini didasari oleh adanya 2 kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan pertimbangan bagi pedagang. Secara teknis, warung makan dikembangkan berdekatan dengan fungsi kegiatan yang lain, seperti penginapan, *play ground*, dan pusat fasilitas karena memiliki hubungan fungsional

yang cukup tinggi. Spesifikasi bangunan warung makan ini memiliki luasan yang cukup dengan bahan dan bentuk bangunan yang murah dan alami. Lokasi restoran adalah disekitar pendopo dengan pertimbangan sebagai pelayanan tamu penginapan dan aktivitas yang terjadi disekitar pendopo.

3. Fasilitas peribadatan

Untuk tetap mempertahankan dan terpeliharanya mental yang baik bagi para wisatawan, maka perlu disediakan fasilitas peribadatan. Fasilitas peribadatan yang perlu disediakan di lokasi wisata Pantai Balekambang adalah musholla dan pura yang sudah ada. Musholla direncanakan pemindahan lokasinya seiring dengan rencana pengembangan kawasan. Musholla yang direncanakan perlu diperluas lagi kapasitas tampungnya dan secara teknis memberikan nilai tambah bagi tampilan visualisasi kawasan secara utuh. Musholla direncanakan memiliki ketinggian bangunan satu lantai dengan sempadan depan bangunan 2-4 m dan terdapat langsung tempat wudhu disamping bangunan utama.

4. Fasilitas kesehatan

Mengingat semakin meningkatnya intensitas kunjungan wisatawan ke lokasi wisata Pantai Balekambang, maka perlu penyediaan fasilitas yang lebih lengkap. Salah satu jenis fasilitas yang belum ada tapi sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan di lokasi Pantai Balekambang adalah fasilitas kesehatan berupa Pos Kesehatan. Pos kesehatan direncanakan terletak di dekat pantai dengan tampilan bangunan tidak menghalangi *view* terhadap obyek lain yang menjadi obyek utama. Disamping itu, pos kesehatan ini perlu ditunjang dengan adanya tenaga medis dan

anggota Tim SAR yang selalu mengawasi keamanan kegiatan wisatawan di Pantai Balekambang.

5. Kios cinderamata

Kegiatan pariwisata perlu kiranya dibarengi dengan penyediaan barang berupa cinderamata yang menarik bagi pengunjung. Oleh karenanya, perlu dibarengi dengan penyediaan fasilitas berupa kios cinderamata. Kios cinderamata direncanakan penempatannya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, namun perlu penataan dan pemunduran lagi, baik bentuk maupun tampilan spesifikasinya sesuai dengan perencanaan dan penataan kawasan secara umum. Bangunan cinderamata ditata dalam 3 blok bangunan yang dilengkapi plaza. Dalam blok ini juga tersedia fasilitas bagi penjual jajan dan kue-kue.

6. Pendopo

Pendopo sebagai salah satu fasilitas umum yang sangat diperlukan dalam suatu kawasan wisata perlu dipertahankan keberadaannya. Namun demikian, perlu lebih ditata lagi tampilan bangunannya maupun lokasinya. Lokasi pendopo pada dasarnya tidak dipindahkan secara berarti, hanya dimundurkan lokasinya dan dayaampungnya diperbesar. Pendopo dikembangkan menjadi *landmark* kawasan.

7. Cottages

Cottages di wilayah perencanaan Pantai Balekambang direncanakan terletak pada zona pengembangan khusus *cottages* yang termasuk dalam zona VII dan zona VIII sesuai dengan arahan dari RIPPK dan kelayakan lahan maupun pertimbangan *view* dan aspek estetika lingkungan kawasan. Jumlah *cottages* yang direncanakan adalah sebanyak 20 unit, yaitu 12 unit di zona VIII dan 8 unit di zona VII. Spesifikasi

tampilan bangunan *cottages* berupa bentuk bangunan panggung yang dipadukan dengan dasar bangunan permanen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan utilisasi bangunan berupa kamar mandi dan WC dalam tiap unit *cottages* serta terpaan angin pantai. Namun demikian, penonjolan unsur tradisional dan konsep dasar yang alami tetap ditampilkan dengan model serambi *cottages* yang menggunakan desain bangunan panggung secara utuh.

Cottages merupakan suatu fasilitas yang tidak memiliki nilai *privacy* mutlak, tapi masih ada keterkaitan dengan fungsi kegiatan lain secara terbatas. *Gate* ke *cottages* tidak leluasa, tapi dihadapkan pada batas wilayah khusus untuk tetap mempertahankan nilai *privacy cottages*. Untuk mengembangkan *cottages* secara utuh, maka perlu dibarengi dengan kelengkapan fasilitas lain seperti area transisi. Hal ini dimaksudkan agar nilai lokasi pada tiap tapak *cottages* adalah sama, jadi tidak menimbulkan kesan perbedaan jarak antar *cottages* dalam kawasan. Usulan area transisi ini selain dengan maksud tersebut diatas, juga dengan tujuan penataan lingkungan secara keseluruhan. Secara teknis, desain area transisi akan mencakup : penataan dan disain lampu; taman yang dilengkapi dengan kebun binatang mini (dalam bentuk sangkar atau kandang) dan aquarium air laut; serta *sculpture*.

Pengembangan area transisi ini didukung dengan penggunaan bahan dasar dan potensi yang ada disekitar wilayah Pantai Balekambang dengan biaya perawatan yang minimal, bahkan bebas biaya perawatan (*free maintenance*). Adapun bahan tersebut meliputi batu-batu karang dan kulit-kulit kerang yang dapat ditata membentuk suatu desain area transisi yang secara visual menunjukkan nilai estetika.

Disamping itu, dalam pengembangan *cottages* di zona VIII ini didukung oleh adanya plaza terbuka yang mampu mengangkat potensi sungai disekitarnya, sehingga terdapat penonjolan nilai estetis dari keberadaan air sungai. Tiap unit *cottages* ditetapkan seluas 100 m² dengan ketinggian bangunan satu lantai dan jarak antar bangunan berkisar antara 5-7 m. Dalam tiap unit *cottages* terdapat 2 kamar tidur, 1 ruang santai/ruang makan dan dilengkapi dengan serambi santai, KM/WC dan teras belakang.

Tampilan teknis bangunannya adalah :

- a. Serambi santai dikembangkan dengan konsep bangunan panggung dengan bahan kayu dan papan serta dilengkapi dengan tangga naik yang juga terbuat dari bahan kayu. Lantai serambi santai lebih tinggi dari ketinggian lantai bangunan utama.
- b. Bangunan utama *cottages* merupakan bangunan semi permanen dengan bahan dasar dan lantai bangunan adalah semen/permanen, sedangkan dindingnya adalah dari bahan papan (panggung).
- c. Atap menggunakan bahan sirap dengan bentuk yang cukup miring, sehingga menghindari rembesan air jika terjadi hujan.

Cottages dalam zona VII ini juga didukung dengan ketersediaan areal parkir. Sedangkan untuk pola sirkulasi didukung oleh sirkulasi dalam lingkungan *cottages* dan sirkulasi di sekitar *cottages*. Sirkulasi di sekitar *cottages* dimaksudkan untuk pelayanan pada pengunjung yang bukan penghuni *cottages* untuk menikmati suasana dan potensi wisata disekitar *cottages*, namun tidak bisa masuk dan beraktivitas secara

bebas ke *cottages*, dimana pergerakan ke *cottages* dibatasi bagi pengunjung yang bukan penghuni *cottages*.

8. Panggung terbuka (*open stage*)

Pengembangan *stage* di Pantai wisata Balekambang dilatarbelakangi oleh adanya pengembangan atraksi kesenian dan budaya yang nampak semakin berkembang. Panggung terbuka (*stage*) direncanakan penataannya mampu mendukung keberadaan *cottages* tanpa mengurangi nilai *privacy cottages*. Disamping itu, fungsi *cottages* memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan plaza terbuka.

Rencana *stage* merupakan suatu bentuk bangunan yang semi permanen tanpa bangunan fisik yang luas. Panggung terbuka menggunakan bahan papan dengan pelindung merupakan pohon-pohon yang rindang dan tumbuh secara menyebar menutupi panggung. Tampilan *stage* pun mampu menonjolkan dan mengangkat potensi bukit yang apabila pada malam hari mampu memberikan nuansa estetika yang tinggi karena didukung oleh penyinaran lampu-lampu taman di plaza. *View* pengunjung yang berada di panggung terbuka langsung bisa pula menikmati potensi yang ada di sungai.

9. Kamar mandi dan WC umum

Kamar mandi dan WC umum direncanakan sebanyak 3 unit bangunan dengan kapasitas kamar sebanyak 30 kamar. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan pada wisatawan yang terus meningkat. KM/WC dipisahkan antara KM/WC untuk pria dan wanita dengan pintu masuk yang tidak berhadapan, melainkan bertolak belakang. Spesifikasi bahan bangunan unit KM/WC umum

menggunakan bentuk dan tampilan bangunan permanen dengan banyak menggunakan bahan porselin yang kedap air atau tidak meresap air pada dinding maupun lantai tiap bangunan. Sedangkan atap menggunakan material genteng.

10. Loket masuk

Pintu masuk suatu lokasi akan memberikan gambaran umum situasi dan kondisi lingkungan yang ada didalamnya. Untuk itu, desain pintu dan loket masuk Pantai Wisata Balekambang mampu memberikan gambaran mengenai situasi yang ada dalam lingkungan kawasan. Pintu masuk direncanakan menjadi dua bentuk berdasarkan fungsinya, yaitu pintu masuk pada loket untuk penarikan retribusi dan pintu masuk kawasan fasilitas umum yang tidak dikenakan biaya retribusi. Adapun bentuk dan bahan bangunan semi permanen, sedangkan pintu masuk dalam lokasi wisata menggunakan potensi vegetasi yang dikembangkan dengan mengatur dan menata pertumbuhan vegetasi sehingga membentuk suatu model pintu gerbang.

e). Rencana Ruang terbuka dan Lansekap

1. Taman dan *Play Ground*

Taman direncanakan untuk memenuhi beberapa fungsi yaitu fungsi estetika dan fungsi ekologis. Konsep pertamanan di Pantai Balekambang direncanakan didukung oleh beberapa vegetasi pendukung sebagai peneduh dengan jaringan pedestrian yang menghubungkan beberapa fungsi kegiatan menuju taman serta digabung dengan *play ground*. Pertamanan di kawasan wisata khususnya wisata pantai mempunyai fungsi antara lain :

- a. Fungsi estetis, sesuai dengan tujuan pengunjung yang ingin berekreasi.

Pemandangan yang asri dan alami akan memberikan suasana yang segar secara

psikologis dapat menghilangkan ketegangan pikiran atau suasana *urban* yang menjemukan dalam kesehariannya

- b. Fungsi ekologis, sebagai penahan longsor di areal perbukitan atau penahan abrasi di pinggir pantai. Kondisi penghijauan di kawasan pantai dan perbukitan pada saat ini masih cukup memadai, malah cenderung rimbun, sehingga *view* ke arah pantai dari dataran pinggir pantai terhalang oleh pohon-pohon besar.

Arahan untuk rancangan pertamanan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pada beberapa bagian/tempat antara bangunan maupun parkir digunakan tanaman perdu/semak/bunga sebagai elemen estetik
- b. Tanaman besar digunakan sebagai peneduh dan pemegang molekul tanah agar pada daerah yang berbukit tidak terjadi longsor
- c. Pada *play ground area* digunakan tanaman dan rerumputan yang asri dan bernuansa estetis
- d. Diusahakan pula melindungi pantai yang rawan terhadap abrasi dengan tanaman pelindung pantai pada lokasi tertentu yang tidak mengganggu kenyamanan berwisata.

Lokasi taman berada pada zona V dengan memanfaatkan lokasi pada sekitar pendopo dan sisa pemunduran fasilitas yang ada sebelumnya. Disamping itu, pada lokasi ini dilakukan tebang pilih terhadap pepohonan yang ada sekarang yang menjadi penghalang *view* para wisatawan yang berada di taman maupun sekitar fasilitas umum lainnya. Pada prinsipnya, dihindari penebangan pohon secara besar-besaran, meskipun ada sedikit pemangkasan tanaman yang menghalangi *view* ke panorama pantai.

Pengembangan *play ground* meliputi pengadaan tempat bermain, terutama bagi anak-anak, seperti ayunan dan papan seluncur dan fasilitas bermain lainnya. Pengadaan fasilitas bermain ini memanfaatkan bentuk vegetasi yang ada, seperti batang dan cabang pepohonan yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak membahayakan.

2. Ruang luar

Penataan ruang luar untuk kawasan wisata ini yang perlu diperhatikan adalah adanya lansekap alami yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Perairan depan pantai yang terbuka sebagai ruang luar utama yang menjadi pusat orientasi seluruh kegiatan wisata
- b. Garis sempadan pantai yang berjarak 100 m
- c. Lereng yang menghadap pantai. Pola ruang makro direncanakan sesuai dengan hierarki ruang alami tersebut. Penataan massa bangunan dibuat dengan orientasi ke ruang luar dataran tepi pantai, sementara ruang terbuka yang berupa dataran berpasir diolah dengan melakukan pembagian ruang-ruang luar mikro dengan pembatas *pedestrian* yang diberi pusat orientasi berupa *shelter*.

Ruang luar di kawasan Pantai Balekambang dikembangkan dengan penataan ruang pada sekitar tapak pada masing-masing lokasi fasilitas fisik terbangun. Tujuan dari rencana ruang luar ini adalah disamping untuk fungsi estetis, juga sebagai fungsi ekologi untuk mempertahankan kondisi tanah dan lingkungan sebagai dampak pembangunan fisik. Penataan ruang luar dilakukan dengan menata halaman maupun lingkungan sekitar bangunan dengan tidak mengembangkan dalam bentuk fisik terbangun yang mampu menghalangi resapan air, tapi dikembangkan secara alami

dengan menata batu-batuan dan tanaman. Disamping itu, dengan mengatur jarak antar bangunan, sehingga memberikan keleluasaan ruangan luar yang cukup disamping dengan penentuan batas tinggi bangunan, sehingga tidak memberikan kesan padat dan sumpek bagi lingkungan. Dengan demikian, sirkulasi udara maupun pencahayaan matahari cukup didapatkan di lingkungan dalam lokasi wisata Pantai Balekambang.

3. Signage

Signage adalah sistem tanda yang mengacu pada maksud tertentu, baik secara langsung sebagai indeks maupun yang bersifat tidak langsung sebagai simbol yang mengacu pada makna tertentu. Keseluruhan kawasan, khususnya bangunan utamanya dapat direkayasa sedemikian rupa, sehingga menjadi *landmark* atau tanda simbolis dari kawasan tersebut, sehingga mampu mengingatkan orang akan kawasan tersebut begitu melihat tampilan bentuk bangunan. Selanjutnya tanda sebagai indeks lebih berfungsi informatif, artinya memberikan segala keterangan, atau identitas obyek yang dituju.

4. Amenity/Street Furniture

Amenity dan *street furniture* disini dimaksudkan sebagai elemen-elemen yang dapat menguatkan kualitas lingkungan dari keseluruhan kawasan wisata. Direncanakan beberapa *shelter* dan gardu pandang, baik yang terletak di dataran tepi pantai berpasir maupun di lereng perbukitan yang dapat menyajikan pemandangan yang leluasa ke arah pantai. *Street furniture* yang diolah adalah tempat parkir dengan pot-pot bunga, sementara di *pedestrian* pada dataran berpasir dilengkapi elemen-elemen estetika berupa kursi-kursi taman, patung dan benda-benda lain yang dirancang spesifik, sehingga memberikan *image* khusus kawasan.

5. Gardu pandang

Gardu pandang di Pantai Balekambang direncanakan untuk fungsi khusus yaitu sebagai gardu pengamanan yang khusus ditempati oleh para petugas keamanan untuk tindakan darurat (*emergency*) terhadap kemungkinan kecelakaan yang terjadi. Secara teknis, gardu pandang memiliki ketinggian bangunan yang lebih dari bangunan lainnya yang ada di kawasan Pantai Balekambang, karena fungsi khusus tersebut. Ketinggian bangunan gardu pandang adalah antara 5-10 m. Gardu pandang memiliki garis muka bangunan terdepan garis sempadan pantai. Gardu pandang di Pantai Balekambang direncanakan sebanyak 5 unit dengan perletakan yang merata di seluruh kawasan dan menghadap pantai, terutama memberikan pengawasan terhadap lokasi tempat mandi di laut dan kawasan pantai yang tertutup bagi aktivitas seperti mandi di laut.

Bahan dan material yang digunakan adalah berupa bahan bangunan yang cukup murah berupa kayu, bambu dan papan. Disamping itu, dapat pula dikembangkan gardu pandang dengan memanfaatkan jenis vegetasi yang ada, dimana pada ketinggian vegetasi ditempatkan gardu dengan tangga naik berbentuk melingkar mengelilingi pohon. Hal ini sangat bergantung pada besaran diameter pohon yang bisa dipilih jenis pohon yang tegak lurus dan memiliki kekuatan menahan beban dan terpaan angin. Dalam hal ini, adalah pohon yang berakar tinggal.

6. Shelter

Shelter merupakan salah satu fasilitas wisata pantai yang kegunaannya sebagai tempat berteduh dan duduk santai di areal terbuka, terutama di daerah berpasir. *Shelter* dikembangkan dengan kemampuan melindungi orang yang berteduh

dibawahnya terhadap sengatan matahari maupun curah hujan secara langsung. Dalam pengadaan *shelter* ini bisa dengan memanfaatkan pola kerjasama dengan produk komersial tertentu dengan sistem tertentu. Secara teknis, spesifikasi usulan *shelter* adalah luasan tiap *shelter* 9 m², jarak antar lokasi *shelter* 20-30 m, bahan dan desain sederhana dan murah, tingkat perawatan rendah, tempat duduk langsung di pasir, serta tinggi *shelter* 2,5 m.

7. *Pedestrian*

Pedestrian merupakan unsur utama pembentuk pola aktivitas. Sesuai dengan sifat dan kondisi permukaan tanah yang datar, *pedestrian* pada area ini dirancang dengan pola bebas mengisi dan menghubungkan titik-titik pusat aktivitas (*nodes*). Untuk memperkuat garis pantai, dirancang *pedestrian* sepanjang garis pantai (pola linier) yang memungkinkan pengunjung dapat menikmati pemandangan ke arah laut. Pola *pedestrian* bebas dirancang menyatu dengan pola *pedestrian* linier sekaligus jalan-jalan pencapaian ke arah tepi pantai. Pada area perbukitan dirancang sebagai jalan pencapaian titik-titik *view* yang memungkinkan untuk menikmati keindahan pemandangan laut maupun sebagai tempat istirahat yang representatif. *Pedestrian* ini akan berupa jalan setapak yang berundak-undak mengikuti garis kontur tanah berbukit.

8. Parkir

Pada saat ini area parkir belum direncanakan secara khusus. Parkir pengunjung di bawah pohon-pohon besar yang tersebar di area yang datar. Hanya ada pemisahan zona yang tidak boleh ada parkir. Karena belum diatur dengan jalur-jalur

parkir, maka pengunjung memarkir kendaraannya secara acak. Cara parkir seperti ini apalagi cenderung mendekati pantai akan menimbulkan masalah, antara lain:

- a. Jajaran mobil yang diparkir di sepanjang garis pantai akan mengganggu pandangan (*view*) ke arah pantai
- b. Tidak terpisahnya sirkulasi kendaraan dan *pedestrian* pada saatnya akan menimbulkan tidak amannya pengunjung yang berjalan kaki
- c. Parkir kendaraan besar (bus/truk) diatas tanah tepi garis pantai dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada struktur permukaan tanah

Area parkir direncanakan merupakan area terbuka tanpa atap, sebagai peneduh digunakan pohon-pohon peneduh. Lantai parkir dipergunakan bahan *paving block* yang berlubang (*grass blok*) agar air hujan dapat meresap.

9. *Camping ground*

Camping direncanakan untuk pengembangan atraksi perkemahan yang ada di Pantai Balekambang. Pengembangan *camping ground* tetap mempertahankan nuansa alam yang asli dengan sedikit pengaturan dan penataan vegetasi, sehingga memberikan ruang cukup bagi aktivitas perkemahan.

10. *Jogging Track*

Rencana *jogging track* diarahkan pada lokasi yang melintasi keadaan alam yang asri dan sejuk, sehingga mampu mendukung atraksi *jogging* tersebut. Rencana jalur *jogging track* di Pantai Balekambang disusulkan cenderung mengikuti jalur sirkulasi yang ada dan jalur khusus sepanjang garis pantai.

11. Jalur *hiking*

Jalur *hiking* direncanakan cenderung melintasi alam pegunungan dan medan-medan yang memiliki rintangan dan tantangan seperti dalam hutan campur. Namun demikian, perlu juga direncanakan jalur *hiking* yang melintasi kawasan wisata Pantai Balekambang.

12. Atraksi lain

Volly pantai merupakan salah satu atraksi yang cukup potensial untuk dikembangkan di lokasi wisata Pantai Balekambang. Hal ini juga ditunjang oleh keadaan pantai yang relatif datar serta pasir yang halus dan bagus. Dengan dikembangkannya atraksi volly pantai, lebih menganeekaragamkan jensi atraksi yang berkembang, sehingga daya tarik Pantai Balekambang meningkat, dimana dapat dijadikan salah satu arena lomba volly pantai di Kabupaten Malang maupun tingkat yang lebih tinggi.

f). Rencana utilitas

1. Kebutuhan air bersih

Kebutuhan air bersih di Pantai Balekambang untuk saat ini belum mencukupi, terlebih untuk pengembangan di masa datang. Debit air yang dihasilkan masih belum mencukupi kebutuhan, apalagi jarak dari mata air ke tempat wisata cukup jauh, sekitar 2 km. dan dengan adanya sungai, perlu dimanfaatkan keberadaannya seperti dengan membuat bak penampung.

Kebutuhan air bersih bagi para wisatawan setiap orangnya diasumsikan 30 liter/jiwa, sehingga sampai akhir tahun perencanaan, kebutuhan air bersih di obyek ini adalah mencapai $6743,34 \text{ m}^3$. Pola pelayanan kebutuhan air bersih ini perlu dilakukan

dengan cara pipanisasi serta perlu adanya pemasangan sistem saringan (*filter*) air bersih guna meningkatkan mutu air bersih, sehingga memenuhi standar kesehatan. Sumber air bersih yang ada tetapi belum dimanfaatkan yaitu sumur pitu dan sumber air yang berupa sungai bawah tanah yang berada di sebelah utara lokasi pariwisata. Penyediaan volume air terbesar terutama pada hari-hari libur. Rencana distribusi air bersih dilakukan dengan sistem pipanisasi, terutama bagi pengembangan fasilitas umum dan *cottages*.

2. Kebutuhan listrik

Kebutuhan listrik di Pantai Balekambang diarahkan untuk memenuhi penerangan bagi pengembangan kawasan secara keseluruhan. Sampai tahun perencanaan, kebutuhan listrik di Pantai Balekambang adalah sebesar 20 KW. Dengan kondisi semacam ini, maka perlu adanya jaringan listrik yang masuk ke wilayah Pantai Balekambang, sehingga tingkat kebutuhan penerangan terlayani.

3. Kebutuhan telepon

Sebagai salah satu obyek wisata andalan, maka dalam pengembangannya perlu disediakan fasilitas utama wisata. Salah satunya adalah jaringan telepon. Kebutuhan fasilitas telekomunikasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah wartel dan telepon umum. Jumlah wartel yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan adalah satu unit dengan dilengkapi oleh sejumlah telepon umum.

4. Sistem pembuangan sampah

Produksi sampah sampai akhir tahun perencanaan diproyeksikan sebesar 13680,4 m³. Penyediaan fasilitas pembuangan sampah dialokasikan sesuai dengan lokasi konsentrasi kegiatan di obyek wisata. Rencana sistem pembuangan sampah di

Pantai Balekambang direncanakan dengan menempatkan tempat/bak sampah di sekitar pusat konsentrasi aktivitas wisatawan dan fasilitas umum sebagai tempat pembuangan sementara. Sistem pembuangannya adalah dikelola dengan pengambilan sampah sebanyak 2 kali sehari oleh petugas kebersihan obyek wisata Pantai Balekambang, sehingga kebersihan obyek tetap terjamin. Adapun tempat pembuangan akhir sampah direncanakan ditempatkan pada daerah sekitar hutan campuran untuk jenis sampah yang tidak merusak lingkungan secara kimiawi.

5. Drainase

Drainase di kawasan obyek wisata Pantai Balekambang dibuang secara alamiah, dimana saluran air secara keseluruhan akan dialirkan ke sungai terdekat. Hal ini perlu ada pengembangan sistem drainase sampai akhir tahun perencanaan dengan pola sistem drainase tertutup, sehingga lingkungan kawasan wisata tetap terpelihara kebersihan dan keindahannya.

6. Prasarana dan sarana transportasi

Pengembangan obyek harus didirungi dengan pengembangan sistem transportasi. Dalam hal ini, perlu perbaikan prasarana jalan dari Gondanglegi ke Kecamatan Bantur sampai Pantai Balekambang. Disamping itu, perlu penyediaan sarana angkutan yang menuju lokasi Pantai Balekambang.

Sedangkan rencana sistem jaringan jalan di wilayah perencanaan Pantai Balekambang dikembangkan untuk memisahkan fungsi jaringan jalan untuk kendaraan bermotor dan jalan khusus untuk pejalan kaki. Disamping itu, juga untuk menarik perkembangan baru dan perluasan kawasan serta kepentingan penataan kawasan secara menyeluruh.

Jalan kendaraan bermotor direncanakan menggunakan perkerasan aspal, sedangkan pedestrian menggunakan perkerasan jalan yang mampu meresap air, yaitu terbentuk dari susunan batuan yang halus maupun jalan setapak khusus di daerah yang berbukit. Lebar jalan utama direncanakan sekitar 4-7 m.

6). Membuat analisis makro perkiraan dampak pengembangan kegiatan pariwisata

Dalam pengembangan suatu kegiatan, pasti akan dijumpai akibat dari pembangunan dan pengembangan yang dilakukan. Demikian pula dalam pengembangan kegiatan pariwisata di obyek wisata Balekambang, pasti akan menimbulkan suatu dampak tertentu. Dampak ini dapat bersifat negatif dan dapat pula bersifat positif. Dampak negatiflah yang harus dicegah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mengenai dampak yang terjadi akibat dikembangkannya suatu kawasan wisata.

Perlunya dilaksanakan analisis dampak makro pengembangan kegiatan pariwisata dikemukakan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

”Dalam membangun suatu kawasan wisata, dampak positif maupun dampak negatif itu akan muncul. Misal dampak ekonomi yang berlipat ganda (*multiplier effect*) seperti masyarakat bisa menjual hasil bumi dan menyediakan penginapan di sekitar obyek wisata; dampak sosial yaitu terjadinya transformasi budaya. Untuk dampak negatif yang muncul bisa diantisipasi lebih dini. Bila dampak negatif lebih banyak, maka akan diketahui apa yang harus dilakukan untuk meminimalisirnya” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.25 di ruang kerjanya).

Analisis yang lebih tajam dilakukan pada tahapan studi kelayakan dari rencana pengembangan obyek wisata Balekambang. Untuk arahan pengembangan, dilakukan perkiraan dampak makro. Analisa dampak yang dilakukan adalah analisis

makro yang dapat digunakan untuk memberikan arahan pengembangan untuk lokasi wisata Balekambang pada masa yang akan datang. Analisis ini meliputi 3 aspek utama, yaitu dampak fisik, dalam hal ini dampak terhadap lingkungan hidup, dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak terhadap lingkungan hidup meliputi dampak fisik alami, dampak terhadap flora dan dampak terhadap fauna yang ada di lokasi wisata. Dampak sosial yang dianalisis adalah dampak yang nantinya dirasakan oleh penduduk di sekitar lokasi wisata. Sedangkan dampak ekonomi adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh penduduk setempat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat.

1. Analisis Makro Dampak Lingkungan Hidup

a. Dampak terhadap fisik dasar

1) Iklim

Unsur-unsur yang dianalisis adalah intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban, penguapan dan kecepatan angin. Kecepatan angin dan penguapan tidak akan terganggu karena dalam pengembangan pariwisata ini tidak dilakukan perombakan alam secara besar-besaran. Intensitas cahaya yang diterima oleh tanah akan relatif lebih besar dibandingkan sebelumnya, karena pada kawasan wisata akan terjadi pembukaan sebagian vegetasi untuk penambahan fasilitas yang dibutuhkan. Suhu udara dan kelembaban akan sedikit terpengaruh, karena adanya bukaan vegetasi yang akan dilakukan. Penambahan suhu udara dan kelembaban diperkirakan akan naik sekitar 1 % dan kelembaban udara akan sedikit naik.

2) Kualitas Udara

Kualitas udara akan sedikit tercemar karena adanya pengembangan wisata ini, terutama karena banyaknya kendaraan pengunjung yang akan mendatangi lokasi ini. Penurunan kualitas udara diperkirakan tidak akan melampaui ambang batas pengukuran pencemaran udara bila dikembangkan kegiatan wisata pada lokasi-lokasi prioritas pengembangan dan untuk kawasan yang tidak dikembangkan, diperkirakan tidak akan terjadi polusi udara yang tinggi.

3) Kebisingan

Kebisingan di lokasi wisata akan meningkat, terutama pada lokasi-lokasi prioritas pengembangan.

4) Hidrologi

Dalam menentukan kualitas air, hal-hal yang dapat dijadikan patokan adalah dari tes BOD (*Biochemical Oxygen Demand Test*). Kadar air yang baik adalah bila memiliki BOD kurang dari 2 ppm. Untuk kegiatan wisata, dampak yang paling mungkin adalah pada masalah sampah yang dibuang ke badan air. Berdasarkan analisis, aspek hidrologi tidak akan mengalami banyak pengurangan kualitas. Demikian pula dengan kuantitas air, karena kegiatan wisata ini tidak membutuhkan air dalam jumlah yang besar secara terus-menerus. Hal ini dapat dihindari dengan dibuatnya peraturan yang ketat.

b. Dampak Terhadap Flora

- 1) Perubahan, kehilangan dan kerusakan komunitas tumbuhan
- 2) Komunitas tumbuhan unik dan hutan lindung

- 3) Kerusakan tumbuhan yang berguna bagi kepentingan ekonomi dan ekologi

Kemungkinan dampak terhadap flora ini dapat terjadi, terutama pada kawasan-kawasan wisata prioritas.

c. Dampak terhadap fauna disekitar obyek wisata

- 1) Arah dan migrasi hewan

Berdasarkan analisis di lapangan, ternyata di obyek wisata Balekambang yang akan dikembangkan, tidak ada lokasi yang merupakan tempat yang dilalui oleh hewan tertentu untuk bermigrasi. Dengan demikian, maka dampak pengembangan obyek wisata terhadap arah dan migrasi hewan tidak ada.

- 2) Kematian hewan

Dampak pengembangan pariwisata terhadap kematian hewan dapat terjadi. Namun hal ini dapat dicegah apabila pengawasan yang ketat dapat dilakukan.

- 3) Gangguan terhadap satwa liar

Berdasarkan tinjauan pada lokasi, tampak bahwa satwa liar yang ada di lokasi wisata yang ada sudah tidak banyak. Apabila obyek wisata ini dikembangkan, binatang laut yang tersebar di pantai dapat dipastikan akan mengalami kepunahan. Hal ini pasti terjadi apabila penanganan dan pengelolaan di lokasi wisata tidak terkontrol. Untuk itu perlu pengawasan yang ketat terhadap para pengunjung. Alternatif lain adalah mengenakan peraturan yang memiliki sanksi untuk melindungi binatang-binatang laut tersebut dari gangguan manusia, dalam hal ini para wisatawan. Berikut dapat dilihat tabel analisa makro perkiraan dampak lingkungan hidup :

Tabel 11
Analisis Makro Perkiraan Dampak Lingkungan Hidup
Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang

No.	Jenis Dampak	Keterangan
1.	Dampak Fisik Dasar	
	a. Iklim	-
	b. Kualitas Udara	*
	c. Kebisingan	*
	d. Hidrologi	*
2.	Dampak Terhadap Flora	
	a. Perubahan	-
	b. Komunitas	*
	c. Kerusakan Tanaman Budidaya	-
3.	Dampak Terhadap Fauna	
	a. Migrasi Hewan	-
	b. Kematian Hewan	-
	c. Gangguan Pada Satwa Liar	*

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Keterangan :

- : Dampak negatif kecil

* : Dampak negatif sedang

Dari tabel diatas, perkiraan dampak fisik dasar negatif untuk unsur iklim adalah kecil, sedangkan untuk kualitas udara, kebisingan, dan hidrologi adalah sedang. Dampak negatif terhadap flora untuk perubahan dan kerusakan tanaman budidaya diperkirakan kecil, sedangkan untuk unsur komunitas dampak negatifnya sedang. Perkiraan dampak negatif terhadap fauna adalah kecil untuk unsur migrasi dan kematian hewan, dan sedang untuk gangguan pada satwa liar.

2. Analisis Dampak Sosial

Analisis dampak sosial didasarkan pada hasil kuesioner yang disebarakan pada masyarakat sekitar lokasi wisata. Berdasarkan kuesioner tersebut, dilakukan analisis berikut ini :

a. Solidaritas sosial masyarakat

Secara umum, tampaknya solidaritas sosial masyarakat tidak akan berubah, asalkan tidak ada pendatang baru yang menetap/tinggal di lokasi, karena lokasi wisata yang berada di kawasan lindung dengan pemukiman penduduk relatif jauh letaknya, dan di sekitar wilayah tersebut memang dilarang dibangun perumahan.

b. Budi pekerti dan Moral

Perubahan atau dampak terhadap budi pekerti dan moral penduduk di sekitar wilayah wisata tampaknya akan terjadi, terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk berkembangnya penginapan di sekitar lokasi wisata. Lokasi-lokasi yang mungkin mengalami kondisi ini adalah pada lokasi yang memiliki potensi alam yang indah. Sebenarnya hal ini dapat terjadi di semua lokasi wisata, karena mau tidak mau penduduk setempat akan melihat perilaku para wisatawan. Pada lokasi-lokasi yang akan dikembangkan akan banyak kegiatan yang mungkin dilakukan, sehingga apabila obyek tersebut dikembangkan akan mendatangkan banyak wisatawan, dengan segala perilakunya.

c. Pandangan terhadap kebendaan

Dampak pandangan terhadap kebendaan tampaknya pasti akan terjadi pada setiap lokasi wisata yang berkembang. Hal ini wajar terjadi karena mau tidak mau, penduduk setempat akan melihat apa saja yang dipakai oleh para wisatawan. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan timbulnya perilaku konsumtif pada penduduk disekitar lokasi wisata.

d. Tanggungjawab sosial

Tanggungjawab sosial yang dimaksud disini adalah tanggungjawab sosial terhadap masyarakat setempat dan para wisatawan. Karena hal ini sudah mengakar pada jiwa penduduk nusantara, pengembangan kegiatan wisata tidak akan mempengaruhi tanggungjawab sosial masyarakat terhadap dirinya sendiri maupun atas diri para wisatawan.

e. Gangguan terhadap peninggalan obyek wisata

Gangguan terhadap peninggalan obyek wisata dapat dilakukan oleh penduduk setempat dan oleh para wisatawan bila pihak pengelola bersikap tidak kooperatif pada penduduk setempat. Demikian juga gangguan yang dilakukan oleh pengunjung. Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat dari pihak pengelola. Dalam hal obyek wisata Balekambang, gangguan ini mempunyai dampak negatif kecil, karena lokasi wisata letaknya jauh atau tidak berbatasan langsung dengan permukiman penduduk.

f. Penyakit masyarakat

Penyakit yang dimaksud disini adalah penyakit kelamin. Hal ini berpotensi terjadi pada lokasi wisata yang memiliki lokasi penginapan dan berbatasan langsung dengan rumah penduduk. Berikut tabel analisis makro dampak sosial yang ditimbulkan akibat pengembangan wisata pada obyek wisata Pantai Balekambang :

Tabel 12
Analisis Makro Perkiraan Dampak Sosial
Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang

No	Solidaritas Sosial	Budi Pekerti dan Moral	Pandangan Terhadap Benda	Tanggung Jawab Sosial	Gangguan Terhadap Obyek	Penyakit Masyarakat
1.	-	*	*	-	-	*

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Keterangan :

- : Dampak negatif kecil

* : Dampak negatif sedang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dampak negatif terhadap solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, dan gangguan terhadap obyek adalah kecil. Sedangkan untuk budi pekerti dan moral, pandangan terhadap benda, dan penyakit masyarakat akan mempunyai dampak negatif yang sedang.

3. Analisis Dampak Ekonomi

Analisis makro dampak ekonomi pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Malang dibagi dalam 3 bagian, yaitu :

a. Dampak terhadap kesempatan kerja

Analisis yang dilakukan adalah perkiraan kesempatan kerja yang mungkin timbul dan dapat dikembangkan pada obyek wisata, yang dirumuskan berdasarkan kemungkinan kegiatan yang akan dikembangkan di lokasi obyek, dan kemungkinan kegiatan yang akan dikembangkan di lokasi obyek, dan kemungkinan pekerjaan yang dapat dimasuki oleh penduduk setempat. Analisis perkiraan kesempatan kerja yang mungkin timbul pada obyek wisata Pantai Balekambang akibat pengembangan wisata di Pantai Balekambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13
Analisis Perkiraan Kesempatan Kerja yang Mungkin Timbul
Pada Lokasi Wisata Pantai Balekambang

No	Atraksi yang mungkin dikembangkan	Kesempatan kerja yang mungkin timbul
1	Perkemahan, <i>jogging</i> , <i>hiking</i> , renang, kesenian, diklatsar	Pedagang toko, pedagang asongan, pemandu, industri kecil, kesenian, pegawai di obyek wisata (tukang parkir dan lain-lain)

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa atraksi yang mungkin dikembangkan pada obyek wisata Pantai Balekambang adalah perkemahan, *jogging*, *hiking*, renang, kesenian, dan diklatsar. Kesempatan kerja yang mungkin timbul nantinya adalah pedagang toko, pedagang asongan, pemandu, industri kecil, kesenian, dan pegawai di obyek wisata (tukang parkir dan sebagainya).

b. Perkiraan dampak terhadap pendapatan masyarakat

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan pada masyarakat setempat. Untuk memprediksikan peningkatan pendapatan masyarakat pada lokasi-lokasi yang sudah dikembangkan, digunakan proporsi kecenderungan kenaikan pendapatan masyarakat yang selama ini telah dirasakan penduduk karena adanya kegiatan pariwisata di sekitar desanya. Sedangkan untuk memprediksikan kenaikan pendapatan masyarakat pada desa sekitar lokasi wisata yang belum dikembangkan, digunakan kecenderungan yang terjadi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang, yang nantinya setelah dikembangkan memiliki karakter sama atau hampir sama dengan lokasi tersebut. Hal lain yang dipertimbangkan adalah kesempatan kerja yang mungkin timbul pada lokasi-lokasi perencanaan. Berikut tabel analisis perkiraan kenaikan tingkat pendapatan penduduk akibat pengembangan kegiatan pariwisata pada obyek wisata Pantai Balekambang :

Tabel 14
Analisis Perkiraan Kenaikan Tingkat Pendapatan Penduduk
Akibat Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pada Lokasi
Wisata Pantai Balekambang

No	% Penduduk yang dapat pekerjaan tambahan	% Kenaikan pendapatan
1.	100	66,67

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penduduk yang akan mendapat pekerjaan tambahan akan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 66,67 %.

c. Perkiraan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan survei pada instansi terkait, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari obyek-obyek wisata adalah terutama dari parkir dan karcis masuk lokasi untuk obyek wisata yang dikelola oleh PD Jasa Yasa. Perhitungan yang dilakukan disini adalah perkiraan pendapatan minimum yang mungkin dapat diberikan oleh obyek wisata bila seluruhnya dikembangkan.

Perhitungan kedatangan wisatawan didapat dari kecenderungan pertumbuhan kedatangan wisatawan. Metode yang digunakan adalah metode regresi linier, karena kedatangan pengunjung tidak tetap, dan menunjukkan fluktuasi yang sangat bervariasi. Dalam perhitungan pendapatan yang mungkin diperoleh, diambil asumsi bahwa masukan dari setiap pengunjung adalah dari karcis perorangan sebesar Rp 500,-. Dari karcis kendaraan, diasumsikan setiap 6 wisatawan membawa kendaraan sendiri, dan setiap kendaraan dikenai pungutan Rp 300,-. Analisis perkiraan dampak terhadap pendapatan asli daerah khusus untuk obyek wisata Pantai Balekambang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Analisis Perkiraan Pendapatan Daerah
Pada Obyek Wisata Pantai Balekambang

No	1999/2000			2004/2005		
	Jumlah Pengunjung	Jumlah Kendaraan	Pemasukan untuk PAD	Jumlah Pengunjung	Jumlah Kendaraan	Pemasukan untuk PAD
1.	215.778	53.945	124.072.350	273.608	68.402	157.324.600

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang 2006

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan daerah pada tahun 1999/2000 untuk jumlah pengunjung adalah 215.778 orang, jumlah kendaraan adalah 53.945 buah, dan untuk pemasukan ke PAD adalah Rp. 124.072.350,-. Sedangkan perkiraan untuk tahun 2004/2005 untuk jumlah pengunjung adalah 273.608 orang, jumlah kendaraan adalah 68.402 buah, dan untuk pemasukan ke PAD adalah sebesar Rp. 157.324.600,-.

7). Membuat penentuan aspek pengelolaan dan tahapan pelaksanaan rencana

Tahap terakhir yang ditempuh adalah membuat penentuan aspek pengelolaan dan tahapan pelaksanaan rencana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang, bahwa :

”Tahap perencanaan setelah identifikasi yaitu analisis sehingga keluar datanya, baru ditindaklanjuti dengan menentukan langkah-langkah atau tindakan apa saja yang perlu dilaksanakan untuk melaksanakan rencana pengembangan tersebut; program-program apa saja yang perlu dilaksanakan dan berapa biayanya; serta indikator program dan proyek yang merupakan tahap akhir dari perencanaan yang dilaksanakan” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 11.30 di ruang kerjanya).

1. Prioritas pelaksanaan pembangunan

Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Balekambang akan diarahkan pada dua bagian, yakni pelaksanaan dari rencana yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sehingga memenuhi standar kebutuhan yang layak dan kedua bersifat pengarah, hal ini terutama ditujukan pada zona-zona kawasan perencanaan yang belum berkembang.

Ada beberapa jenis kegiatan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan rencana pembangunan menjadi hasil pembangunan itu sendiri, yaitu :

- 1) Usaha rehabilitasi dan peningkatan kondisi obyek wisata yang diprioritaskan, baik pada obyek wisata maupun pada sistem jaringan jalan yang menuju ke obyek wisata tersebut
- 2) Pembangunan baru yang merupakan kegiatan mendirikan atau membangun bangunan pada areal baru yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana peruntukan dan pengembangan fasilitas, utilitas dan jaringan jalan dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan zona-zona pada kawasan rencana yang lain
- 3) Penyesuaian terhadap Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang merupakan tindakan teknis dalam rangka membuat rencana fisik sebagai upaya untuk mengisi Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata, baik pada areal yang terbangun maupun pada areal yang belum terbangun.
- 4) Evaluasi, merupakan usaha pengontrolan penggunaan lahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta merupakan usaha pengawasan pengembangan kawasan pada tiap tahapan
- 5) Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dan mengembangkan desa budaya pada lokasi-lokasi yang potensiil, yaitu pada desa di sekitar obyek wisata Pantai Balekambang
- 6) Peningkatan kemampuan administrasi dan manajemen aparat pengelola pada setiap obyek wisata merupakan segi-segi administrasi dan manajemen pengembangan obyek wisata guna tercapainya tujuan pengembangan obyek wisata tersebut.

Penentuan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan obyek wisata Pantai Balekambang pada dasarnya merupakan salah satu cara yang dinilai akan sangat membantu dalam keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata Pantai Balekambang merupakan rencana pengembangan jangka panjang jika dilihat dari segi waktu perencanaannya, yaitu jangka waktu sepuluh tahunan dalam periode 1994/1995 - 2004/2005. Untuk efisiensi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan jangka menengah lima tahunan. Rencana pembangunan lima tahun tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan : 1995/1996 - 1998/1999
- 2) Tahap pertama : 1999/2000 - 2003/2004
- 3) Tahap kedua : 2004/2005 - 2005/2006

Pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun ini disesuaikan dengan tahap pembangunan lima tahunan nasional maupun daerah, agar penjabaran program tahunan jangka pendek dapat dilakukan dengan mudah. Sebaiknya penyesuaian tahapan pelaksanaan rencana dengan pembangunan lima tahunan ini menyebabkan Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata ini sebagai rencana jangka menengah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penjabaran program-program pembangunan lima tahunan daerah. Dalam menentukan program-program yang harus dilaksanakan pada setiap tahap telah ditentukan beberapa pertimbangan pokok, antara lain :

- 1) Besarnya kebutuhan prasarana dan sarana pembangunan yang harus disediakan setiap tahapan adalah proporsional dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tiap tahapan pembangunan

- 2) Agar terdapat keteraturan tata ruang seperti yang diharapkan dan diperoleh kemajuan dalam pengembangan kepariwisataan, maka ditentukan obyek-obyek wisata prioritas yang harus dikembangkan lebih dahulu
- 3) Ada beberapa unsur pembangunan yang perlu didahulukan pembangunannya sebagai upaya merangsang kedatangan para wisatawan ataupun memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang membutuhkan dalam waktu relatif dekat.

2. Pentahapan Pelaksanaan Rencana Balekambang

Pengembangan wilayah perencanaan didasarkan pada sektor dan subsektor yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. Ditinjau terhadap urgensi dan tingkat permasalahannya, prioritas pembangunan pada Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata Pantai Balekambang disusun berdasarkan urutan sebagai berikut :

- a) Pembangunan mendesak, yaitu pembangunan sektor dan subsektor untuk menanggulangi masalah utama yang menyebabkan terjadinya masalah lainnya, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan makin bertambah besar secara kumulatif dan makin sulit diatasi.
- b) Pembangunan yang diprioritaskan, yaitu berupa pembangunan sektor dan subsektor yang diharapkan dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor utama wisata pada daerah perencanaan dan wilayah sekitarnya yang dapat memberikan dampak positif. Sektor-sektor yang diprioritaskan meliputi penginapan, perdagangan, perhubungan, atraksi wisata dan taman bermain.
- c) Pembangunan strategis, yaitu pembangunan sektor dan subsektor penting yang memberikan implikasi struktural dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan

pembangunan pariwisata. Sektor-sektor yang termasuk kategori ini adalah fasilitas umum, penertiban penggunaan tanah dan bangunan, pengadaan utilitas yang memadai dan lain-lain.

- d) Pembangunan pelengkap, yaitu pembangunan sektor dan subsektor yang tidak bersifat kebutuhan dasar tetapi dipandang perlu dibangun sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah wisata. Sektor-sektor yang terkait adalah pembangunan fasilitas rekreasi, *camping ground*, *hiking*, dan *jogging track*.

Pentahapan pelaksanaan Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan pendanaan dan potensi pengembangan kegiatan pada tiap zona dalam kawasan wisata Pantai Balekambang. Sehingga perlu penentuan prioritas pengembangan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan yang ada.

Berorientasi pada pertimbangan tersebut diatas, maka pentahapan pelaksanaan Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang dapat dilakukan dalam empat tahap yang secara garis besar terbagi menjadi dua tinjauan pokok, yaitu : pentahapan jaringan jalan dan pentahapan *blok plan* sebagai variabel utama dalam menilai dan menentukan pentahapan pelaksanaan.

a). Tahap I

Pengembangan jaringan jalan yang menjadi prioritas utama adalah pembukaan akses baru sesuai dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang ada untuk membuka dan mengembangkan potensi yang terdapat di zona VII. Disamping itu adalah untuk mengalihkan pola sirkulasi kendaraan bermotor sehingga lokasi wisata yang berada di pinggir pantai sehingga menjadi kawasan yang bebas polusi

serta untuk memperluas kawasan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan pariwisata Balekambang. Pengembangan jaringan jalan baru ini diikuti oleh adanya pengembangan pelataran parkir baru yang berada di sisi jalan tersebut. Setelah jalan tersebut dibuka, maka dengan sendirinya jalan eksisting yang ada tertutup dari kendaraan yang polutan dan dikembangkan menjadi *pedestrian* dan *jogging track*. Pada tahap I, selain jaringan jalan utama juga terdiri dari : *pedestrian*, pugasera, taman bermain dan kios souvenir pada zona III, kantor pengelola dan gardu pandang pada zona V.

b). Tahap II

Pelaksanaan pada tahap merupakan kelanjutan dari tahap I dimana jaringan jalan yang sudah dirintis pada tahap sebelumnya perlu dilanjutkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pelaksanaan pentahapan berikutnya. Pelaksanaan pembangunan tahap II terdiri dari jaringan jalan (*pedestrian*), *play ground* pada zona III, gardu pandang pada zona VIII, taman pada zona II, pendopo, restoran, parkir, fasilitas penunjang, taman dan penginapan pada zona V serta pada zona VII *cottages*.

c). Tahap III

Pelaksanaan pembangunan tahap III meliputi pembangunan pedestrian lanjutan, area *jogging track*, taman, sovenir dan tempat bermain pada anak zona III. Pengembangan area parkir pada zona II. *Camping ground* pada zona IV. Area parkir, tempat bermain anak dan fasilitas penunjang pada zona V. Cottages dan taman pada zona VII. Dalam proses pengembangan tersebut langsung dibarengi dengan pengembangan fasilitas pendukung seperti area transisi dan plasa sehingga

keberadaan *cottages* memiliki daya tarik yang lebih dengan adanya fasilitas pendukung dengan nuansa visual estetis yang tinggi. Disamping itu melengkapi pembangunan pusat souvenir dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tahap III merupakan persiapan akhir menuju kondisi eksisting Pantai Balekambang sesuai yang tertuang dalam perencanaan.

d). Tahap IV

Pada tahap ini, kondisi kawasan wisata Pantai Balekambang seperti yang tercantum dalam perencanaan tapak secara keseluruhan dan dibarengi dengan penataan vegetasi. Pembangunan jalan baru peningkatan kondisi jalan dan *pedestrian*. Parkir pada zona II. Area pengembangan pada zona III. *Camping ground* pada zona IV. Panggung terbuka pada zona VI. *Cottages* pada zona VII. Volly pantai pada zona VIII.

Pemantapan vegetasi, dimana vegetasi dikembangkan disamping sebagai bagian tata hijau juga difungsikan sebagai sarana kegiatan wisata seperti untuk ayunan, gardu pandang atau *shelter*. Vegetasi yang ada ditebang pilih untuk mendukung view ke obyek wisata pantai. Sementara sistem penanaman dilakukan antara lain melalui tahapan penanaman dengan melihat media tanam yang digunakan, misalkan media tanamnya adalah batu, maka batu pada batu tersebut dibuat lubang mirip pot bunga, kemudian membentuk pola pertumbuhan tanaman yang ditanam dengan mengikat tali pada pucuknya sehingga dapat membentuk pola pertumbuhan tanaman yang diinginkan.

3. Arahan Penanganan Lingkungan

Sesuai dengan hukum lingkungan yang ada, maka pihak yang mengakibatkan adanya dampak negatif diharuskan untuk mengeliminasi timbulnya dampak lingkungan (termasuk polusi). Disamping itu, ada prinsip bahwa investor yang melanggar peraturan hukum lingkungan dapat didenda sesuai dengan pasal yang tercantum dalam UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam PP No 29 tahun 1987 sendiri diberikan batas wilayah bahwa seluruh industri/kegiatan yang berdampak kimiawi penting, tahun 1990 sudah harus melakukan studi analisis dampak lingkungan dan studi evaluasi lingkungan. Disini, pemerintah daerah dalam hal ini biro bina KLH/Setwilda mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal menerapkan UU dan PP tentang lingkungan hidup yang sangat penting pengaruhnya bagi masyarakat banyak.

4. Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan

Pengelolaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan dikelola oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Malang. Sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Malang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a). Sumber yang datang dari Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Pendapatan Asli Daerah)
- b). Sumber yang datang dari subsidi/bantuan dari luar

Arahan analisis pembiayaan disini lebih ditekankan pada upaya pengendalian potensi dari dalam Kabupaten, untuk itu perlu ditelaah secara mendalam tentang sektor-sektor dan pos-pos pendapatan yang masih mungkin dikembangkan dan masih memiliki konstruksi yang besar dan pos-pos yang mempunyai kecenderungan

peningkatan. Perubahan terhadap sektor ini menunjukkan bahwa potensi penggalian sumber dana terutama dari pajak retribusi daerah. Untuk subsidi bantuan instansi yang lebih tinggi lebih banyak proyek sektoral yang secara keseluruhan menunjang pembangunan ibukota-ibukota kecamatan, dimana obyek-obyek wisata tersebut terdapat.

Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi Kabupaten Malang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terus-menerus, walaupun dari pos yang berbeda. Sumber keuangan yang berasal dari luar daerah yang paling potensial untuk digali di Kabupaten Malang adalah dengan menggali peran serta sektor swasta, investor dapat ikut serta dalam pembangunan, misalnya dengan merangsang partisipasi melalui kemudahan yang diberikan sebagai timbal baliknya.

5. Aspek Kelembagaan dan Hukum Pembangunan

Pada dasarnya pengaturan merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dengan demikian, maka ada kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan mengenai kedudukannya, peranannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Peraturan yang hendak disusun hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Mempunyai jangkauan yang jauh ke depan akan tetapi realistis
- b) Dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan yang rinci, sehingga mudah dipahami dan hanya memiliki satu penafsiran
- c) Tidak berbenturan dengan peraturan dari sektor lainnya

- repository.ub.ac
- d) Dapat menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan yang terarah, terkoordinasikan dan terkendali.

Kebijaksanaan nasional ditetapkan dengan menggariskan arah dan tujuan pembangunan. Maka selanjutnya pemerintah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan dalam peraturan pemerintahan, Keputusan/Instruksi Presiden, dan Keputusan/Peraturan Menteri. Beranjak dari peraturan tersebut, maka ditetapkan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional oleh Direktur Jendral. Di tingkat daerah, keputusan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional dan Undang-Undang.

Dalam pengaturan sektor pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan dua komponen utama, yaitu :

- a) Kegiatan pariwisata itu sendiri dan kegiatan pengembangannya
- b) Pelaku, yaitu pemerintah, kalangan usahawan dan masyarakat umum

Sebagai acuan, peraturan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Undang-undang ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam :

- a) Peraturan Pemerintah yaitu yang berkenaan dengan :
 - 1) Ketentuan mengenai pengusaha obyek dan daya tarik wisata
 - 2) Pelaksanaan pembinaan kepariwisataan oleh pemerintah
 - 3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan
- b) Keputusan Pemerintah yang dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Parpostel, yaitu yang berkenaan dengan :

- 1) Jenis obyek dan daya tarik, selain yang telah tercantum di Undang-undang
- 2) Jenis usaha sarana pariwisata selain yang telah tercantum dalam Undang-undang
- 3) Jenis usaha sarana pariwisata selain yang telah tercantum dalam Undang-undang
- 4) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan wisata

2. Pengembangan Pariwisata yang Telah dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Upaya pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi :

- 1). Peningkatan daya tarik wisata di bidang seni budaya

Pantai Balekambang mempunyai beberapa daya tarik wisata terhadap wisatawan untuk datang mengunjungi dan menikmati wisata alam dan budaya masyarakat setempat juga acara-acara keagamaan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi selaku Kepala Unit Wisata Balekambang, beliau mengatakan bahwa :

“Daya tarik yang paling disukai pengunjung adalah panorama laut yang indah diikuti ombak yang besar, selain itu upacara Suroan dan upacara Jalanidhipuja yang diadakan setiap tahun menjadi agenda tetap PD Jasa Yasa untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung. Hal ini berdampak pada pendapatan yang diperoleh, mulai dari karcis masuk, parkir, penginapan, dan kamar kecil, serta retribusi yang diperoleh dari kios-kios yang berjualan di area obyek wisata” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.00 WIB, di ruang kerjanya).

Berdasarkan pengamatan peneliti, selain mendapatkan pendapatan dari karcis masuk, sumbangan yang besar berasal dari pengelolaan penginapan. Pengunjung yang berasal dari luar kota kebanyakan menyewa penginapan untuk bermalam beberapa hari untuk menikmati panorama yang indah. Rata-rata pengunjung yang menginap disana antara 1-3 hari.

Selain itu, daya tarik yang disuguhkan berupa pertunjukan musik yang dilakukan 2 minggu sekali setiap akhir pekan, sehingga para pengunjung yang sedang menikmati obyek wisata juga dapat menikmati hiburan musik, biasanya musik yang disuguhkan adalah musik dangdut. Pengelola obyek wisata Balekambang memilih musik dangdut, karena hiburan musik dangdut sangat disukai rakyat banyak, sehingga pengunjungpun yang datang juga banyak.

2). Pelaksanaan pengembangan kawasan wisata

Berdasarkan pentahapan pelaksanaan Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang, sampai sekarang ini pengembangan yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang belum semuanya bisa berjalan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rakhmat Hermawan sebagai Plt. Direktur Utama PD Jasa Yasa Kabupaten Malang, bahwa :

“Pengelolaan dan pengembangan Pantai Balekambang dikoordinir oleh PD Jasa Yasa, dimana pengembangan salah satunya ditunjukkan dengan adanya bangunan baru, sehingga pengunjung tidak merasa jenuh. Dengan berpedoman pada Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang, pengembangan yang sudah dilaksanakan pada kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi tahap 1 dan 2 yang sudah mulai berjalan. Sedangkan untuk tahap 3 dan 4 belum bisa berjalan. Sebenarnya untuk beberapa fasilitas seperti tempat untuk panggung terbuka dan *camping ground* sudah ada, tetapi

belum dilakukan penataan, sehingga tinggal dilakukan penataan saja“ (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 10.00 WIB, di ruang kerjanya).

Sedangkan dengan mengacu pada perencanaan pengembangan obyek, zona pengembangan yang telah dikembangkan pada obyek wisata Pantai Balekambang, yaitu :

- 1) Zona I : Zona *entrance* dengan fasilitas yang tersedia, terdiri dari loket dan pintu masuk.
- 2) Zona II : Zona prasarana penunjang. Penyediaan dan pengembangan fasilitas tempat parkir, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 3) Zona III : Zona pengembangan kios cinderamata/sovenir dan kios makanan.
- 4) Zona IV : Zona pengembangan *camping ground*. Penyediaan dan pengembangan fasilitas areal perkemahan, tempat upacara, kamar mandi/WC, tempat-tempat pembuangan sampah.
- 5) Zona V : Zona pengembangan fasilitas umum dengan kelengkapan fasilitas berupa kantor pengelola, penginapan, restoran, pendopo, shelter, tempat duduk, tempat parkir, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat duduk untuk bersantai.
- 6) Zona VI : Zona pengembangan panggung panggung terbuka dan *play ground*.

Berdasarkan prioritas pembangunan seperti yang tercantum dalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata Pantai Balekambang, pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan urgensi dan tingkat permasalahannya meliputi :

- a) Pembangunan mendesak, yaitu pembangunan aksesibilitas jalan.

- b) Pembangunan yang diprioritaskan, meliputi pembangunan penginapan, perdagangan, perhubungan, atraksi wisata dan taman bermain.
- c) Pembangunan strategis, yaitu fasilitas umum, penertiban penggunaan tanah dan bangunan, serta pengadaan utilitas yang memadai.
- d) Pembangunan pelengkap, yaitu pembangunan fasilitas rekreasi.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Prasarana penunjang atau yang mendukung Pantai Balekambang adalah jalan raya yang dapat memudahkan pengunjung untuk datang dan berekreasi ke Pantai Balekambang sangat mudah walaupun keadaan jalannya dalam kondisi tidak begitu bagus dan dapat ditempuh melalui dua arah, yaitu dari Kepanjen – Pagak – Bantur-Balekambang dan Gondanglegi – Bantur – Balekambang. Untuk pinggir pantai sekarang jalan telah beraspal. Sebentar lagi jalan lintas selatan yang sedang dibangun akan segera terealisasi dengan jalan yang melewati Balekambang berarti akan semakin lengkap prasarana jalan untuk mencapai Pantai Balekambang.

Sarana transportasi menuju lokasi wisata Pantai Balekambang untuk hari biasa memang ada, namun tidak seramai pada hari libur. Umumnya ada mikrolet jurusan Gadang – Bantur. Karena dari Bantur sampai pada lokasi wisata yang berbukit-bukit dan jalan yang dilalui tidak terlalu lebar, sehingga kiranya pihak pengelola perlu kiranya memperbaiki jalan yang ada untuk memudahkan wisatawan dalam melewati jalan menuju obyek wisata Pantai Balekambang. Dan lagi perlu adanya penyediaan sarana transportasi yang siap mengantar para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Balekambang ke arah Bantur.

Untuk prasarana lain seperti penerangan untuk sementara masih sangat minim saat ini dan menggunakan tenaga diesel, itupun digunakan tidak setiap hari, tetapi hanya pada hari-hari tertentu saja, misalnya pada hari Minggu atau Tahun Baru. Untuk saat ini, kebutuhan air bersih di Pantai Balekambang belum mencukupi karena jarak sumber air cukup jauh sekitar 2 km. Untuk lebih jelasnya, penyediaan sarana dan prasarana di kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi :

a). Sarana

Sarana yang ada pada Pantai Balekambang yaitu gardu pandang, kantor pengelola, rumah makan, toko tempat penjualan cinderamata khas pantai, mushola, pendopo, tempat parkir yang luas, kamar kecil dan penginapan.

1). Penginapan

Keberadaan penginapan adalah hal yang sangat vital bagi suatu obyek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, terutama wisatawan yang berasal dari luar Kota Malang. Untuk meningkatkan kapasitas penginapan, pihak pengelola telah merenovasi penginapan yang ada dengan dibuat lebih besar dari keadaan semula tanpa meninggalkan nilai estetika bangunan yang lama. Renovasi yang telah dilakukan sekarang menambah kesan yang alami atau natural. Pembangunan fasilitas penginapan ini diharapkan dapat menambah daya tampung yang ada sekarang menjadi lebih banyak, sehingga pendapatan yang diperoleh juga akan bertambah.

2). Warung makan

Warung makan yang ada sekarang, tempatnya kurang menguntungkan. Dalam upaya peningkatan fasilitas tersebut, pihak pengelola memindahkan warung makan menjadi berdekatan dengan penginapan. Sehingga memudahkan wisatawan yang menginap untuk mencari makanan dan minuman. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman, telah ditambah warung makan masakan tradisional Jawa.

3). Fasilitas peribadatan

Para wisatawan yang berkunjung memerlukan fasilitas peribadatan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pihak pengelola dalam hal ini sudah membangun muholla dan pura.

4). Kios cinderamata

Penyediaan cinderamata bagi wisatawan perlu juga diperhatikan, karena cinderamata merupakan suatu barang yang dapat dijadikan kenangan, dimana wisatawan tersebut pernah mengunjungi obyek wisata Pantai Balekambang. Kios cinderamata yang ada sekarang dirubah penempatannya sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Wisata Pantai Balekambang. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, juga merupakan tuntutan warga sekitar agar diperbolehkan berjualan cinderamata untuk penghasilan mereka. Cinderamata ini berupa gantungan kunci, kalung, maupun kaos bergambar Pantai Balekambang.

5). Pendopo

Pendopo sebagai salah satu fasilitas yang tersedia berfungsi untuk pertemuan di kawasan tersebut dipertahankan keberadaannya. Hal ini dikarenakan pendopo dapat berfungsi ganda, dimana selain untuk pertemuan juga digunakan untuk upacara ritual Suroan. Renovasi pendopo ini memperluas daya tampung serta mempercantik bangunan tanpa menghilangkan bentuk aslinya.

6). Kamar mandi dan WC umum

Penyediaan kamar mandi dan WC umum juga sangat dibutuhkan di lokasi obyek wisata. Keberadaannya dipisah, antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Saat ini, kamar mandi dan WC yang ada dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

7). Loket Masuk

Pintu masuk merupakan tempat pertama yang dilihat oleh pengunjung ketika pertama kali masuk ke obyek wisata. Loket masuk berfungsi ganda, dimana selain sebagai loket pelayanan, juga berfungsi sebagai tempat melihat laut dari atas loket, sehingga wisatawan diberikan kebebasan dalam menikmati pemandangan yang ada.

b). Prasarana

1). Kebutuhan air bersih

Kebutuhan air bersih bagi para wisatawan untuk saat ini dirasa belum mencukupi, namun pihak pengelola sudah berusaha agar kebutuhan tersebut bisa ditingkatkan lagi. Pihak pengelola dalam hal ini PD Jasa Yasa telah membangun pipa

jaringan air bersih sepanjang 2 km. Kebutuhan air bersih selalu meningkat, terutama pada hari-hari libur maupun hari besar nasional yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

2). Kebutuhan listrik

Kebutuhan akan penerangan juga sangat penting bagi para wisatawan, terutama wisatawan yang menginap di lokasi wisata Balekambang. Untuk sementara, jaringan listrik yang belum tersedia diganti dengan pengadaan generator genset pembangkit tenaga listrik. Sehingga perlu kiranya agar pihak pengelola mengusahakan secepatnya pengadaan jaringan listrik untuk penerangan di kawasan Pantai Balekambang selain untuk kebutuhan yang lain seperti kemah pramuka. Sehingga para wisatawan merasa dimanjakan oleh pihak pengelola, selain itu dengan adanya penerangan juga memudahkan pihak pengelola dalam mengadakan pengawasan terhadap lokasi yang dikelola, dan lagi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi suatu obyek wisata.

3). Telepon

Jaringan telepon yang tersedia sekarang adalah 1 unit telepon kantor.. Menurut peneliti, pihak pengelola sebaiknya bekerjasama dengan pengelola telepon seluler untuk pemasangan jaringan tower pemancar sinyal, hal ini untuk membantu wisatawan yang membawa telepon genggam untuk berhubungan dengan relasi atau keluarganya, baik luar kota maupun di dalam kota. Selain itu juga memudahkan para wisatawan dalam berkomunikasi.

4). Sistem pembuangan sampah

Sistem pembuangan sampah yang ada saat ini adalah konvensional yaitu dengan menggunakan penyediaan tong sampah. Setelah sampah menumpuk, tiap 2 hari sekali diangkat untuk dibuang di tempat pembuangan akhir di sekitar hutan yang berjarak 5 km dari lokasi awal. Hal ini perlu ditambah dengan penyediaan kontainer sampah, sehingga memudahkan dalam pengangkutan sampah.

5). Drainase

Untuk drainase di Pantai Balekambang dibuang secara alamiah, yaitu keseluruhan saluran air yang ada dialirkan pada sungai yang terdekat. Hal ini perlu ditata ulang, karena sistem drainase yang ada sekarang dikhawatirkan akan mencemari pantai. Oleh karena itu, diperlukan sistem drainase tertutup disamping diberi filter pengolah limbah. Sehingga air yang dialirkan ke sungai tidak mencemari pantai dan kawasan pantai tetap terpelihara kebersihannya.

Fasilitas lain yang tersedia di Balekambang saat ini adalah :

- a. Taman bermain yang terdiri dari hewan buatan (gajah, jerapah, badak, burung), ayunan, kursi berputar, papan luncur, tempat duduk di sepanjang pantai, jembatan penghubung antara pulau
- b. Gardu pandang berfungsi untuk menjaga dan mengawasi wisatawan yang mandi di laut dan memberikan peringatan jika berenang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan agar tidak terseret ombak, yaitu dengan cara memberikan tanda bendera merah pada laut

- c. Tempat parkir sangat luas dan terjamin keamanannya, karena dikelola oleh desa dengan dibantu oleh keamanan, baik dari Muspika Kecamatan Bantur maupun dari marinir pusat latihan tempur Purboyo.

Sedangkan bagi wisatawan yang ingin menginap juga telah disediakan sarana penginapan yang murah yang disesuaikan dengan jenisnya dengan fasilitas sederhana, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16

Nama dan Jumlah Harga Kamar Penginapan yang Dioperasikan

No	Nama Penginapan	Jumlah Kamar	Harga Penginapan
1.	Wibisono	6 buah	Rp 100.000,-
2.	Losmen Bambu	5 buah	Rp 50.000,-

Sumber : PD Jasa Yasa Sub Unit Wisata Pantai Balekambang 2006

Dari tabel diatas, ada dua penginapan yang beroperasi di obyek wisata Pantai Balekambang, yaitu Losmen Bambu yang terdiri dari 5 buah dengan harga per kamar yaitu Rp 50,000,- dan Wibisono yang terdiri dari 6 buah dengan harga per kamar yaitu Rp 100.000,-.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1). Pengembangan internal melalui pembinaan tentang pentingnya pelayanan

Pengelola obyek wisata Pantai Balekambang berusaha menjadikan para wisatawan merasa nyaman menikmati obyek wisata Balekambang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Rakhmat Hermawan selaku Plt. Direktur Utama

PD Jasa Yasa Kabupaten Malang tentang kesediaan petugas dalam menerima tamu, beliau mengatakan bahwa :

”Untuk pengembangan sumber daya manusia, sebagai pihak pengelola, PD Jasa Yasa telah berusaha melakukan pengembangan internal, dengan diadakannya pembinaan tentang pentingnya pelayanan kepada pengunjung. Sebagai penyedia jasa wisata, kita menyadari bahwa orang berwisata itu menginginkan rasa aman dan nyaman dalam kegiatannya selama di obyek wisata” (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 11.00 WIB, di ruang kerjanya).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Sunardi sebagai Kepala Unit Wisata

Pantai Balekambang seperti berikut :

”Setiap ada kesempatan luang, seluruh petugas pengelola dikumpulkan serta dimotivasi tentang bagaimana melayani wisatawan dengan baik, bertanya keluhan-keluhan apa yang ditemui para wisatawan, sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi petugas di lapangan, dan berusaha untuk memecahkan bersama-sama. Disamping itu, diberikan juga pengarahan pada pemilik toko dan warung makan untuk selalu dapat melayani kebutuhan wisatawan, bersikap ramah dan tidak menjual barang yang harganya terlalu memberatkan wisatawan, sehingga barang dagangan mereka bisa laku“ (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.00 WIB, di ruang kerjanya).

2). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia yang lainnya ditempuh dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Diklat kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bisa dikatakan sudah lengkap. Diklat biasanya dilaksanakan dalam satu tahun sekali yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur, dimana pegawai unit wisata juga ikut serta didalamnya. Materi diklat yang sudah pernah dilaksanakan mengenai bagaimana pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, cara menyusun paket wisata, strategi pemasaran wisata (promosi), dan diklat tentang bagaimana seharusnya menjadi aparat

kepariwisataan yang profesional” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 10.00 WIB, di ruang kerjanya).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Yasdi selaku Staf Bendahara

Pembantu Unit Wisata Pantai Balekambang, bahwa :

“Selama ini, diklat yang dilaksanakan terutama ditujukan untuk Kepala Unit Wisata Pantai Balekambang. Diklat untuk staf, terutama bagi Kepala Seksi (Kasi), yaitu Kasi Tata Usaha dan Kasi Bendahara. Untuk staf, diklat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan menghadirkan masing-masing unit wisata. Materi diklat yang diberikan yaitu mengenai pelayanan wisata, antara lain penyambutan tamu dan pelayanan di losmen, misalnya dengan menunjukkan tempat-tempat yang menarik dan petugas SAR laut yang memantau pengunjung yang mandi di laut” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2006 pukul 11.00 WIB, di ruang kerjanya).

Upaya pengelolaan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat melalui penempatan personil di Pantai Balekambang yang didasarkan atas tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh masing-masing karyawan. Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat personil Pantai Balekambang yang pernah mengikuti diklat kepariwisataan.

Tabel 17
Diklat Personalia Unit Wisata Pantai Balekambang

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan	Diklat
1.	Sunardi	SMA	Kepala Unit	Pernah
2.	Sarminah	SMA	Staf	-
3.	Pujo Supriadi	STM	Staf	-
4.	Nyari	SMA	Staf	-
5.	Yasdi	SMA	Bendahara Pembantu	Pernah
6.	Ari Sucipto	SMA	Staf	-
7.	Gemi Sugiarto	SMP	Staf	-
8.	Kariman	SMA	Kasi PAM	-
9.	Tukirin	SMP	Staf	-
10.	Bejantono	SD	Staf	-
11.	Sumadi	SMP	Staf	-
12.	Harti	SD	Staf	-
13.	Mujianto	SD	Staf	-
14.	Mulyadi	SD	Staf	-
15.	Siyardi	SD	Staf	-
16.	Misemi	SD	Staf	-
17.	Suhayat	SMA	Kasi TU	Pernah
18.	Marsid	SMP	Staf	-
19.	Muda Sutrisno	SMA	Staf	-

Sumber : PD Jasa Yasa Sub Unit Wisata Pantai Balekambang 2006

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa diklat kepariwisataan sangat kurang bagi petugas pengelola Pantai Wisata Balekambang. Pegawai yang diikutsertakan hanya Kepala Unit Wisata Pantai Balekambang, Kasi Tata Usaha dan Bendahara Pembantu. Staf-staf yang berada dibawahnya belum ada yang pernah mengikuti diklat. Padahal, diklat kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bisa dikatakan sudah lengkap. Tapi pelaksanaannya belum merata untuk pegawai di unit wisata Pantai Balekambang.

d. Upaya Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang berusaha menarik para wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan jalan meningkatkan berbagai macam fasilitas di obyek wisata Balekambang, baik itu fasilitas penunjang seperti penyediaan fasilitas umum atau fasilitas yang berfungsi untuk menambah daya tarik wisata dalam agenda Kabupaten Malang, ataupun dalam pembuatan buku tentang kepariwisataan Kabupaten Malang. Selain itu, kegiatan promosi juga bekerjasama dengan Departemen Pariwisata, media cetak maupun elektronik untuk mempromosikan keindahan Pantai Balekambang, salah satunya dengan perusahaan rokok PT Djarum yaitu pembuatan iklan rokok Djarum 76 dengan *setting* paralayang yang mengambil lokasi di dekat Pulau Wisanggeni. Dengan promosi yang gencar, diharapkan semakin banyak wisatawan yang berkunjung yang berdampak pada peningkatan pendapatan, sehingga kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten juga akan semakin meningkat.

Upaya yang ditempuh oleh PD Jasa Yasa untuk memperkenalkan obyek wisata Pantai Balekambang pada masyarakat luas diperjelas dengan pernyataan Bapak Suyono selaku Staf Promosi PD Jasa Yasa bahwa :

“Upaya promosi dan pemasaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan hotel, *Tourist Information Service* (TIS), dan dengan media cetak. Brosur-brosur tentang obyek wisata dititipkan ke Depo Oen yang sering didatangi oleh wisatawan mancanegara. PD Jasa Yasa juga bekerjasama dengan pihak sponsor untuk pengembangan wisata bahari Pantai Balekambang. Jika ada even-even tertentu, PD Jasa Yasa memberitahu terlebih dahulu pada media elektronik lokal untuk datang meliput even-even tersebut, misal ATV, Malang TV, dan JTV. Khusus untuk obyek wisata Pantai Balekambang pernah masuk acara Mlaku – Mlaku di JTV dan Piknik di RCTI. Pantai Balekambang juga pernah dipakai untuk *shooting* iklan rokok Djarum 76 dengan *background* berupa Pura dan pantainya. Semua usaha itu dilakukan sebagai sarana untuk memperkenalkan Pantai Balekambang pada wisatawan nasional dan mancanegara. Pantai Balekambang juga diprogramkan untuk paket wisata. Kalau obyek wisata itu tidak dipromosikan, maka orang tidak akan tahu. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya kalau sudah pulang, lalu timbul rasa kangen, dan bisa sampai lima kali datang kesana“ (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 09.30 WIB, di ruang kerjanya).

Selain itu, PD Jasa Yasa Kabupaten Malang berusaha menampilkan keindahan dan daya tarik wisata Pantai Balekambang. Upaya untuk meningkatkan promosi agar kunjungan wisatawan meningkat diperjelas dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Rahmat Hermawan selaku Plt. Direktur Utama PD Jasa Yasa Kabupaten Malang bahwa :

“Dalam berbagai kesempatan seperti pembuatan pamflet, buku agenda tentang potensi wisata Balekambang, PD Jasa Yasa berusaha dan menampilkan tentang keindahan dan daya tarik wisata pantai Balekambang serta fasilitas yang ada disana, adanya tiga buah pulau yang dihubungkan dengan jembatan, fasilitas umum, fasilitas ibadah, panorama yang indah, fasilitas penginapan dan lain sebagainya. PD Jasa Yasa juga memasang papan petunjuk jalan mulai dari Gondanglegi sampai menuju lokasi obyek wisata Balekambang” (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 11.15 WIB, di ruang kerjanya).

Usaha lain yang dilakukan oleh PD Jasa Yasa dalam upaya meningkatkan pendapatan yaitu dengan membuat stiker, mengadakan lomba memancing dan lintas alam yang berakhir (*finish*) di Pantai Balekambang, sehingga dengan usaha-usaha tersebut, diharapkan wisatawan menjadi tahu akan keberadaan Pantai Balekambang. Selain itu, juga menambah daya tarik tersendiri dengan diadakannya berbagai lomba yang diselenggarakan.

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan Dishubpar dalam hal mempromosikan obyek wisata di Kabupaten Malang, termasuk juga Pantai Balekambang adalah :

- a. Dengan membuat brosur, leaflet dan majalah tentang obyek-obyek wisata potensial yang banyak dipromosikan
- b. Bekerjasama dengan pihak pengelola obyek wisata, pengelola sarana dan prasarana wisata, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal promosi
- c. Mengikuti even-even wisata seperti pameran wisata, baik lokal maupun tingkat nasional. Misalnya mengikuti pameran wisata di Yogyakarta, Pameran MTF, Festival Bali nusa Dua, Pameran Otonomi daerah Expo Jakarta. Kemudian bekerjasama dengan majalah wisata dan dengan radio-radio swasta. Semua kegiatan tersebut diatas sangat berguna untuk menyebarluaskan informasi kepariwisataan Kabupaten Malang kepada masyarakat luas untuk membangkitkan minat berkunjung ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Malang

- d. Membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah yang potensi kepariwisataanya tinggi,. Anggota dari Pokdarwis ini meliputi segenap lapisan masyarakat, mulai dari pengelola obyek wisata, pengrajin, tokoh masyarakat, karang taruna, wartawan dan para pengusaha jasa.

Adapun dalam melakukan usaha-usaha promosi diatas, yang menjadi pedoman adalah terciptanya program Sapta Pesona. Seperti program yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kesan yang mendalam dan suasana yang nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke setiap obyek wisata yang ada di kabupaten Malang.

Wawasan yang diberikan adalah tentang Sapta Pesona, yaitu mewujudkan rasa Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan. Sedangkan contoh dalam memasyarakatkan Sapta Pesona pada kalangan tokoh-tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. AMAN : Mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dalam menerima wisatawan maupun menjaga lingkungan
- b. TERTIB : Mengajarkan dan memberi contoh teladan kepada masyarakat dalam ketertiban, keteraturan dan disiplin dalam semua segi kehidupan.
- c. BERSIH : Mengajarkan dan memberi contoh untuk memelihara lingkungan hidup yang sehat
- d. SEJUK : Memelopori dan mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana sejuk, misalnya menanam pepohonan.

- e. INDAH : Memelopori dan mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian dan penataan lingkungan.
- f. RAMAH TAMAH : Memelopori dan mengajak masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik
- g. KENANGAN : Bersama-sama masyarakat turut serta menggali seni budaya antara lain melalui adat-istiadat kesenian tradisional.

Disamping Sapta Pesona, hal lain yang juga diberikan adalah wawasan tentang kepariwisataan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat menjadi sadar akan potensi wisata dalam pembangunan nasional.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Pengembangan non fisik yang dilaksanakan yaitu dengan promosi dan pembinaan masyarakat. Promosi ditempuh dengan mengikuti even-even pariwisata, seperti Gelar Seni di Jakarta, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus dan diikuti oleh seluruh Kabupaten di Indonesia. Disamping itu, adanya pemilihan duta wisata dari Kabupaten Malang (Joko-Roro) untuk memperkenalkan dan mempromosikan Kabupaten Malang di tingkat regional. Biasanya disyaratkan bisa bahasa asing dan mengetahui obyek-obyek yang ada dan belum siap jual dalam rangka menggaet investor. Jadi promosi disamping dilaksanakan untuk mengundang wisatawan, juga bertujuan untuk mengundang investor. Sedangkan pembinaan masyarakat ditempuh dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam rangka sosialisasi Sapta Pesona yang merupakan jiwa dari pariwisata. Tapi pelaksanaan Pokdarwis tidak efektif karena kendala utamanya adalah masalah dana. Untuk mengatasi dana untuk promosi yang kurang memadai, ditempuh dengan melaksanakan promosi yang efektif, yaitu dengan mengikuti pameran-pameran yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Misal, pameran dalam skala nasional dengan menggunakan dana

secara efisien.“ (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya).

Cara promosi lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mempromosikan Pantai Balekambang adalah dengan melalui *website* di internet. Hal ini ditegaskan lagi oleh Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar) melakukan studi kelayakan pemasaran dengan melihat apa potensi dan sarana yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut. Kemudian dikemas sesuai dengan selera wisatawan, yang dapat dipelajari melalui data kunjungan wisatawan. Lalu Dishubpar mengirimkan data obyek wisata yang siap atau layak jual ke Bagian Pusat Data Elektronik (PDE). Kemudian Bagian PDE menampilkannya di *website* Kabupaten Malang, yaitu www.kabmalang.go.id.” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 11.15 WIB di ruang kerjanya).

4. Faktor Pendukung dan Kendala-Kendala dalam Pengembangan Pariwisata yang dilaksanakan di Kawasan Pantai Balekambang

a) Faktor-Faktor Pendukung

1). Karakteristik obyek

Obyek wisata Pantai Balekambang merupakan salah satu andalan obyek wisata yang ada di kabupaten Malang. Kelebihan yang dimiliki oleh obyek wisata Balekambang yang tidak dimiliki oleh obyek wisata alam lainnya adalah menyangkut keindahan dan kesejukannya.

Hal Bapak Rahmat Hermawan selaku Plt. Direktur Utama PD Jasa Yasa Kabupaten Malang bahwa :

“Pantai Balekambang itu sangat eksotik, sehingga para wisatawan tidak akan bosan. Yang kita jual adalah pantai dengan kesejukannya, dimana ada nilai tersendiri yaitu potensi alami yang dimiliki oleh obyek wisata pantai ini

antara lain kondisi pantai yang landai, berpasir putih, dan Pantai Balekambang bisa dikatakan satu-satunya pantai yang sejuk di wilayah Kabupaten Malang dengan kerimbunan pohonnya dan pemandangannya yang indah. Pulau yang ada di di obyek wisata Pantai Balekambang dengan fasilitas pura di atasnya merupakan setengah adopsi dari Tanah Lot di Bali“ (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 11.35 WIB, di ruang kerjanya).

Ada beberapa daya tarik yang dimiliki oleh kawasan wisata Pantai Balekambang, dimana daya tarik tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan obyek. Jenis dan kondisi obyek wisata yang mendukung pengembangan kawasan ini antara lain :

a. Obyek wisata alam

Dari segi wisata alam, kawasan wisata Pantai Balekambang mempunyai cukup banyak daya tarik berupa pantai dengan segala keindahan alamnya yang dapat diberikan kepada wisatawan yang berkunjung. Hal ini dapat menjadi aset yang besar dalam rangka pengembangan yang dilakukan terhadap kawasan wisata Pantai Balekambang.

b. Obyek wisata budaya

Obyek wisata ini biasanya lebih banyak menyedot wisatawan nusantara, namun ada juga beberapa atraksi wisata yang dapat dijual untuk wisatawan mancanegara.

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan even-even tradisonal, seperti misalnya upacara Jalanidhipuja dan upacara Suroan yang diadakan sekali dalam setiap tahunnya. Dengan kelebihan ini, diharapkan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung, walaupun letaknya cukup jauh dari pusat kota.

2). Dibukanya jalur Malang Selatan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yaitu yang mengarah pada penggalian potensi Malang Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan rencana jangka pendek dan menengah sedang melaksanakan beberapa program pembangunan sebagai pendukung pengembangan Malang Selatan, seperti pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang kegiatan pariwisata. Hal ini dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mengarah pada pengembangan kawasan Jawa Timur bagian selatan.

Dengan dibukanya jalur Malang Selatan untuk mempermudah akses menuju lokasi, diharapkan akan memberi kemudahan pada wisatawan dalam melakukan perjalanannya menuju lokasi dimana obyek wisata Pantai Balekambang berada. Aksesibilitas atau daya jangkau yang mudah ditempuh juga menjadi pertimbangan bagi wisatawan, sehingga dalam rencana tahap I, pengembangan jaringan jalan menuju obyek menjadi pentahapan pertama dari pelaksanaan rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang.

3). Peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar obyek wisata

Masyarakat tahu betul dampak positif apa yang akan mereka terima apabila pengembangan kawasan obyek wisata ini dijalankan. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka pengembangan wisata yang sedang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan yang penjelasan dari Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf Seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Pariwisata bisa menghasilkan dampak yang berlipat ganda (*mutiplier effect*), dimana masyarakat di sekitar obyek bisa merasakan dampak positif dari pariwisata itu sendiri dengan bertambahnya pendapatan yang mereka peroleh akibat pengembangan pariwisata yang dilaksanakan. Misalnya para penjual makanan yang membuka warung makanan dan penjual cinderamata disekitar obyek wisata, dimana mereka sudah merasakan penghasilan yang meningkat pada saat banyak wisatawan yang berkunjung kesana. Masyarakat sekitar obyek juga bisa menyediakan rumah penduduk untuk disewakan (*homestay*)“ (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 10.20 WIB,diruang kerjanya).

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Zakaria selaku Kasi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Pengembangan obyek wisata, termasuk juga untuk Pantai Balekambang dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun ekonomi, karena beberapa hal seperti komoditi pariwisata ini tidak habis pakai, mampu menggerakkan sektor-sektor lain, dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat pada lapisan paling bawah sekalipun, karena sektor pariwisata mampu membuka usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya sektor informal“ (Wawancara pada tanggal 18 April 2006 pukul 09.55 di ruang kerjanya).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Yanto, masyarakat sekitar obyek wisata yang juga menjadi pedagang yang berjualan di obyek wisata Pantai Balekambang, bahwa :

“Dengan ramainya wisatawan yang berkunjung, maka pendapatan pedagang akan ikut bertambah. Jadi pihak pengelola hendaknya lebih memperhatikan bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Balekambang. Jika kunjungan wisatawan ke Pantai Balekambang meningkat, maka secara tidak langsung, pendapatan saya juga akan meningkat” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 11.30 WIB diruang kerjanya).

4). UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Dengan adanya UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola segala potensi, termasuk dalam

bidang kepariwisataan, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini PD Jasa Yasa untuk mengembangkan potensi dan mengerahkan segala sumber daya yang ada yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas obyek wisata, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata.

5). Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan

Jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Balekambang yang terus meningkat membuat Pemerintah Kabupaten mengandalkannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut data jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Balekambang :

Tabel 18
Data Pengunjung Unit Wisata Pantai Balekambang
1 Januari 2003 – 30 Juni 2006

No	Bulan	2003	2004	2005	2006
1.	Januari	799	1.907	961	2.580
2.	Februari	721	727	269	420
3.	Maret	802	603	427	804
4.	April	902	528	549	1.338
5.	Mei	1.636	1.374	944	1.002
6.	Juni	2.108	1.047	1.182	9.372
7.	Juli	1.608	1.451	2.735	-
8.	Agustus	851	614	1.543	-
9.	September	1.299	892	1.705	-
10.	Oktober	1.066	466	652	-
11.	November	2.063	4.616	6.208	-
12.	Desember	2.732	827	694	-
Jumlah (orang)		16.587	15.052	17.869	15.876

Sumber : PD Jasa Yasa Unit Wisata Pantai Balekambang Tahun 2006

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada tahun baru dan lebaran. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Suyono selaku Kasi Promosi PD Jasa Yasa sebagai berikut :

”Jumlah wisatawan terbanyak terjadi pada saat tahun baru, hari raya lebaran, dan liburan sekolah. Karena sekarang yang lagi tren adalah wisata alam yang pangsa pasarnya adalah semua umur. Hal ini jelas berbeda bila dibandingkan dengan wisata buatan yang mereka rata-rata sudah jenuh dan pangsa pasarnya adalah anak kecil. Pada saat upacara Jalanidhipuja, yang datang kesana sekitar 5000 orang, tetapi mintanya gratis, jadi tidak dimasukkan dalam data pengunjung. Data yang masuk hanya berdasarkan tiket pengunjung. PD Jasa Yasa hanya menyediakan tempat bagi mereka untuk melaksanakan upacara. Wisatawan yang datang ke Bali biasanya juga datang kesana” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.20 WIB di ruang kerjanya).

b). Kendala-Kendala

1). Keterbatasan dana

Dana merupakan masalah pokok setiap usaha pengembangan. Apapun jenis pengembangan itu, pastilah memerlukan biaya atau dana, baik itu sedikit atau banyak. Masalah dana masih menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam mengembangkan obyek wisata Balekambang, dimana alternatif pemecahan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengembangan secara bertahap sambil terus mencari investor yang mau atau bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan obyek wisata Balekambang ini.

Dana merupakan suatu hal yang penting dalam suatu program pembangunan, karena kesuksesan suatu program sangat ditentukan oleh ada tidaknya dana yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang

diberikan oleh Bapak Zakaria selaku Kasi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, beliau mengatakan bahwa :

“Masalah dana bukan merupakan hal yang baru. Dengan adanya keterbatasan dana, pengembangan yang dilaksanakan tidak bisa cepat karena anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang itu tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, dan untuk pariwisata tidak hanya digunakan untuk membiayai pengembangan Pantai Balekambang saja, tetapi untuk obyek wisata lainnya juga memerlukan dana” (Wawancara pada tanggal 18 April 2006 pukul 10.25 WIB di ruang kerjanya).

Pihak pengelola obyek wisata Pantai Balekambang berusaha mengatasi keterbatasan ini dengan melakukan pentahapan dalam pembangunan sambil berusaha mencari alternatif sumber dana yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rahmat Hermawan selaku Plt. Direktur Utama PD Jasa Yasa Kabupaten Malang bahwa :

“Karena biaya yang tidak sedikit dalam pembangunan kawasan wisata Pantai Balekambang, pemerintah berusaha mengatasinya dengan membagi pembangunan dalam empat tahap pelaksanaan rencana pengembangan. Pengembangan obyek wisata kan tidak bisa langsung ‘disulap’, tapi melewati suatu proses secara bertahap. Misal, untuk tahap pertama, dibangun gapura pada pintu masuk, penginapan, gardu pandang, pemasangan paving dan jalan aspal yang lebih baik, yang bisa dijangkau oleh kendaraan besar” (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 11.35 WIB, di ruang kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas, alternatif yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan dana adalah dengan melakukan pembangunan secara bertahap sambil terus mencari investor yang mau atau bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan obyek wisata Balekambang.

2). Kondisi jalan menuju obyek yang rusak

Kondisi jalan yang rusak dan berkelok-kelok membuat wisatawan mengeluhkan kondisi jalan yang tidak rata, sehingga mereka ada yang enggan

kembali untuk mengunjungi pantai wisata Balekambang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf Seksi Pengembangan Obyek wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, beliau mengatakan bahwa :

“Kondisi jalan yang berkelok-kelok menyebabkan para wisatawan enggan untuk berkunjung ke Pantai Balekambang. Hal ini menjadi penghambat utama bagi para wisatawan. Infrastruktur berupa aksesibilitas jalan yang rusak antara Gondanglegi – Balekambang harus dibenahi, karena merupakan sarana dan prasarana yang vital dalam mendukung pengembangan yang sedang dilaksanakan. Mengingat bahwa pariwisata sebagai wadah untuk membentuk pasar itu tidak bisa berdiri sendiri (multisektoral). Sehingga pariwisata itu tidak bisa berjalan tanpa adanya akses jalan yang bagus” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 10.30 WIB, di ruang kerjanya).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa jalan yang tidak bagus menyebabkan wisatawan enggan untuk kembali mengunjungi pantai Balekambang, sehingga harus dilakukan pembenahan, karena merupakan sarana dan prasarana yang vital dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang.

3). Belum adanya biro perjalanan yang bekerjasama dengan pihak pengelola

Sebagaimana peneliti melakukan pengamatan, bahwa belum ada biro perjalanan (*travel agent*) yang bekerjasama dengan pihak pengelola, dimana keberadaannya sangat vital dibutuhkan, karena mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan bagi para wisatawan. Sehingga wisatawan mancanegara jarang mengunjungi pantai ini. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suyono selaku Kasi promosi PD Jasa Yasa, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini, masih belum ada biro perjalanan (*travel agent*) yang bekerjasama dengan pihak pengelola Pantai Balekambang. Hanya ada satu

saja yang pernah langsung datang dengan mengantarkan wisatawan mancanegara dan itupun bukan *travel agent*, melainkan pihak pengelola Hotel Elmi Surabaya yang kebetulan memang dicarter oleh wisatawan yang berkunjung ke Hotel tersebut, dan merupakan bagian dari servis Hotel Elmi” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.30 WIB, di ruang kerjanya).

4). Kurangnya investor

Berdasarkan pengamatan peneliti, sedikit sekali minat investor yang mau melirik potensi yang ada di Balekambang, sehingga tidak dapat dilakukan pengelolaan yang maksimal. Untuk mengatasi kendala dalam hal kurangnya minat investor dalam pengelolaan kepariwisataan, khususnya Pantai Balekambang dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku Staf Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Kabupaten Malang bahwa :

“Produk wisata hasil pengembangan Pantai Balekambang pada akhirnya akan dijual pada investor. Investor kalau mau masuk kan melihat untung ruginya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Malang ke depannya akan menyusun rencana pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang secara menyeluruh beserta rencana bisnisnya (*business plan*), baru kemudian ditawarkan pada investor” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.00 WIB, di ruang kerjanya).

5). Suasana yang kurang kondusif

Keadaan politik dalam negeri yang tidak stabil membuat wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara kurang yakin atas jaminan keamanan yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga hal ini membuat mereka membatalkan kunjungan mereka ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suyono selaku Kasi promosi pada PD Jasa Yasa, beliau mengatakan bahwa :

“Keadaan politik negara kita yang sering terjadi kekacauan (*chaos*) membuat para wisatawan yang akan berkunjung akan berpikir kembali jika akan mengunjungi Indonesia, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan mancanegara ke negara kita, sehingga mau tidak mau kita harus menanggung resiko yang ada. Dikhawatirkan jika keadaan seperti

ini berlangsung lama, maka kepariwisataan di Indonesia akan terpuruk, demikian halnya dengan pariwisata di Kabupaten Malang, khususnya Pantai Balekambang” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.45 WIB, di ruang kerjanya).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Bapak Bendut Isriyanto selaku Staf seksi Pengembangan Obyek Wisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bahwa :

“Banyak tidaknya wisatawan yang datang mengunjungi obyek wisata tergantung pada faktor keamanan. Dengan adanya tragedi bom Bali kemarin, tentu membawa dampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk ke obyek wisata Pantai Balekambang. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Australia dan Presiden George Bush pernah “mem-protect” para wisatawan dari negara mereka agar tidak masuk ke negara Indonesia” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2006 pukul 11.00 WIB, di ruang kerjanya).

Penjelasan dari Ibu Sarminah sebagai salah satu staf di kantor pengelola obyek wisata Pantai Balekambang juga mendukung pernyataan diatas, bahwa :

“Ada beberapa wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi obyek wisata Pantai Balekambang karena mendengar ada isu dari sopir-sopir di terminal bahwa Pantai Balekambang itu tutup. Pengelola obyek menduga isu itu berasal dari saingan bisnis obyek wisata yang lain. Padahal mulai dari Pantai Balekambang itu dibuka menjadi salah satu obyek wisata sejak tahun 1985 dulu sampai sekarang, Pantai Balekambang itu belum pernah tutup” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.30 WIB, di ruang kerjanya).

Dengan demikian, dapat dikatakan dalam pengelolaan Pantai Balekambang banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pengelolaan, termasuk didalamnya kondisi politik yang kurang kondusif, sehingga pemerintah harus bisa menumbuhkan suasana yang kondusif agar dapat menumbuhkan kepercayaan pada wisatawan untuk kembali berkunjung ke obyek wisata.

6). Faktor bencana alam

Faktor alam yang kurang mendukung dalam pengembangan obyek wisata yang dilaksanakan sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Suyono selaku Kasi Promosi PD Jasa Yasa, beliau mengatakan bahwa :

“Penyebab penurunan wisatawan yang terkait dengan bencana alam antara lain berupa adanya gempa (tsunami) dan terjadinya longsor merupakan kendala bagi pengunjung yang datang kesana. Pantai Balekambang memang pernah kena tsunami. Sebagian Pantai Sendang Biru juga. Tetapi kebetulan Pantai Balekambang itu jauh dari pemukiman penduduk. Media-media elektronik seperti televisi sering menyiarkan bencana yang terjadi tersebut, sehingga hal itu membuat para wisatawan trauma dan enggan berkunjung kembali ke Pantai Balekambang. Untuk obyek wisata pantai, pengaruh-pengaruh seperti itu tetap ada, seperti hujan yang terlalu lama dan menyebabkan banjir pada tanah yang gundul” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2006 pukul 10.45 WIB, di ruang kerjanya).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Sarminah selaku staf di obyek wisata Pantai Balekambang, beliau mengatakan bahwa :

“Tsunami yang terjadi di Aceh mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik menurun drastis. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa Pantai Balekambang merupakan bagian dari pantai selatan yang terkenal dengan ombaknya besar. Ditambah lagi dengan menyaksikan berita di televisi, bahwa daerah khusus Jatim harus berhati-hati. Gempa yang baru-baru ini terjadi di Jogja juga membuat mereka semakin takut untuk berwisata ke pantai. Setelah itu, semburan lumpur di Porong, Sidoarjo yang dikabarkan terjadi akibat kelalaian PT Lapindo dalam eksplorasi bahan tambang, tentunya membuat kemacetan untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Malang. Jadi wisatawan akan berpikir dua kali untuk datang ke obyek wisata Pantai Balekambang” (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 11.00 WIB, di ruang kerjanya).

Faktor bencana alam merupakan kendala yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang. Oleh karena itu, pihak pengelola Pantai Balekambang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini.

7). Status tanahnya masih dikelola oleh Perhutani

Karena berada pada kawasan penyangga yang kepemilikan lahannya adalah milik Dinas Perhutani dan pengawasannya sangat ketat, maka obyek wisata Pantai Balekambang mengalami kendala dalam pengembangannya karena sangat sulit untuk dipindahtangankan. Sehingga PD Jasa Yasa tidak dapat dengan leluasa untuk mengelola lahan tersebut sebagai suatu kawasan wisata. Yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kawasan tersebut hanya dengan mengarah kembali ke alam saja (*back to nature*). Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rahmat Hermawan selaku Plt. Direktur Utama PD Jasa Yasa Kabupaten Malang bahwa :

“Status kepemilikan lahan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian atau tukar menukar tanah dengan pihak Perhutani, masih belum sampai pada keputusan final” (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 10.15 WIB, di ruang kerjanya).

8). Air bersih di lokasi wisata belum memenuhi syarat

Kebutuhan air bersih pada obyek wisata Pantai Balekambang untuk saat ini belum mencukupi. Saat ini, mata air yang terdekat dengan lokasi obyek wisata, debit airnya sangat kurang. Sebenarnya ada sumber mata air yang dapat dimanfaatkan, tetapi lokasinya agak jauh dari lokasi, yaitu sekitar 2 km ke utara.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sarminah selaku salah satu staf di obyek wisata Pantai Balekambang bahwa :

“Air bersih yang ada di obyek wisata Pantai Balekambang sampai saat ini masih belum memenuhi syarat, baik bagi pengunjung yang bermalam di penginapan maupun diluar penginapan, karena sumber mata air jauh dari lokasi. Untuk mendapatkannya harus melalui beberapa proses, pertama harus memakai genset besar, dialirkan biar naik ke tower atas, naik lagi memakai

genset, baru disalurkan ke pos-pos penginapan dan tempat lain. Kalau musim hujan, mata air keruh karena sumber mata air terbuka dan langsung dialiri dari luar (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2006 pukul 10.45 WIB, di ruang kerjanya).

B. Analisa Data

1. Kondisi Potensi Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Jenis Wisata dan Obyek Wisata

Pantai Balekambang mempunyai daya tarik yang berupa wisata alam dan budaya. Wisata alam berupa pantai yang dipenuhi dengan aneka ikan hias serta satwa laut yang lain. Disamping itu, pulau yang dihubungkan dengan Pantai Balekambang tersebut antara lain, yaitu : Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggan, dan Pulau Hanoman.

Sedangkan wisata budaya yang dimiliki oleh Pantai Balekambang yaitu upacara ritual yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh penduduk Desa Srigonco, yaitu upacara Suroan (upacara 1 Suro) dan upacara Jalanidhipuja. Kedua upacara ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang dianggap sakral.

Yoeti (1982:158) mengemukakan bahwa atraksi wisata (*tourist attractions*) merupakan segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam literatur yang berbeda, Yoeti (1997:60) mengatakan bahwa atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan melalui suatu pertunjukan (*shows*) yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan. Jadi, atraksi wisata dibedakan dengan obyek wisata (*tourist objects*). Dalam atraksi wisata, untuk menyaksikannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan obyek wisata dapat

dilihat tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, seperti misalnya pantai dan pemandangan. Kesenian rakyat tradisional merupakan atraksi wisata yang sangat potensial untuk konsumsi wisatawan. Hal ini termasuk ke dalam wisata budaya (*cultural tourism*). Jadi wisata alam yang berupa pantai dengan segala keindahan alam yang terdapat di Pantai Balekambang termasuk ke dalam obyek wisata, karena dapat disaksikan tanpa harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan upacara Suroan dan Jalanidhipuja termasuk dalam atraksi wisata, karena untuk menyaksikannya harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Wisata alam dan wisata budaya yang ada di Pantai Balekambang menjadi modal dalam pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (1982:164), bahwa hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam bermacam-macam pasar, maka haruslah memenuhi syarat, dimana daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai "*something to see*", artinya di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai "*entertainment*" bila orang biasa kesana. Kawasan wisata Pantai Balekambang juga mempunyai daya tarik yang berupa upacara ritual yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh penduduk Desa Srigonco, yaitu upacara Suroan (upacara 1 Suro) dan upacara Jalanidhipuja. Jadi, kedua upacara ritual tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Pendit (1986:18), bahwa suatu daerah wisata, disamping mempunyai akomodasi (tempat menginap sementara) akan disebut 'daerah tujuan wisata' apabila memiliki atraksi-atraksi yang memikat sebagai tujuan kunjungan wisata. Dalam kegiatan-kegiatan pariwisata, atraksi-atraksi ini harus dikoordinasikan dalam suatu paduan penyajian atraksi yang harmonis, menarik, dan mengagumkan. Dengan kata lain, berbagai ragam atraksi disajikan secara terpadu, dengan latar belakang panorama keindahan alam dan pantai serta upacara adat/ritual yang dikemas dalam satu paket wisata yang ditangani secara baik dan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan masyarakat setempat sebagai upaya pelestarian tata cara hidup (*way of life*) yang harus dihormati. Jauh-jauh hari telah dipelajari hari, tanggal, waktu, lokasi, jenis, sifat dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan seluruhnya serta acara-acara yang akan diselenggarakan, sehingga paket penyajian atraksi wisata ini dapat dipelajari oleh wisatawan sebelum memutuskan untuk mengadakan perjalanan wisata. Pemaduan paket penyajian atraksi wisata tahunan dalam penerbitan buku-buku panduan wisata ini secara teknis disebut 'penanggalan atraksi' (*calender of events*).

Obyek dan atraksi wisata itu sendiri sebenarnya termasuk dalam produk industri pariwisata. Motivasi untuk datang ke daerah tujuan wisata tentunya ingin mendapatkan manfaat dan kepuasan (*satisfaction*). Salah satu faktor yang menentukan manfaat dan kepuasan itu yaitu *tourism resources*. Hal ini biasa juga disebut oleh Prof. Mariotti dengan istilah '*attractive spontanee*' (Yoeti, 1982:160), yang merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Hal-hal

yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata antara lain adalah benda-benda yang tersedia di alam semesta (*natural amenities*) yang berupa iklim dan pemandangan; hasil ciptaan manusia (*man-made supply*) yang berupa kebudayaan dan benda bersejarah; serta tata cara hidup masyarakat (*way of life*). *Attractive spontanee* yang terdapat di Pantai Balekambang antara lain yaitu pantai dengan pemandangan alamnya dan udara yang sejuk (*natural amenities*) serta upacara ritual yang berupa Upacara Suroan dan Jalanidhipuja (*way of life*).

b. Sarana dan Prasarana Wisata

Sarana dan prasarana yang ada di Pantai Balekambang pada saat ini adalah loket masuk, kantor pengelola, pendopo, penginapan, mushola, warung, gardu pandang, pura, kamar mandi dan WC umum, serta tempat parkir. Tersedianya sarana dan prasarana minimal sangat diperlukan sebagai modal dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal ini juga dijelaskan oleh Yoeti (1982:164), hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata adalah daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut "*something to do*", artinya ditempat tersebut selain banyak yang dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lama di tempat tersebut.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pengembangan

Dalam suatu program perencanaan pengembangan, pastinya memuat suatu tujuan. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, pembangunan kawasan wisata Pantai Balekambang ditujukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, dalam hal ini potensi wisata pantai sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan program pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Hal ini selaras dengan tujuan pengembangan kepariwisataan yang tercantum dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Syahroni (2001:16) bahwa beberapa tujuan dari pembangunan di daerah adalah mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang/berkelanjutan (*sustainable*). Dengan adanya pengembangan suatu kawasan wisata, maka penduduk di sekitar Pantai Balekambang dapat menjual hasil bumi, menyediakan penginapan dan menjadi tenaga kerja di unit obyek wisata. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk desa setempat yang kehidupannya kebanyakan

rakyat miskin, mengingat kondisi areal pertanian di Malang Selatan tidak begitu baik, dimana sebagian tanahnya adalah berupa kapur, yang kurang baik untuk pertanian. Sehingga dengan dikembangkannya obyek wisata Pantai Balekambang, nantinya juga akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah Malang Selatan, khususnya masyarakat setempat yang berada di sekitar obyek. Hal ini sejalan dengan pendapat Yoeti (1997:19) bahwa salah satu tujuan dari perencanaan industri kepariwisataan tidak lain adalah adanya pengaruh pelipatgandaan (*multiplier effect*) dalam kegiatan perekonomian. Dengan ditetapkannya tujuan tersebut, diharapkan perencanaan yang dilaksanakan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dapat mewujudkan suatu kawasan wisata sesuai dengan yang direncanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:15) bahwa suatu daerah yang berkeinginan untuk mengembangkan suatu industri di daerahnya, kiranya perlu mengambil kebijaksanaan dalam hal sebelum mengambil suatu keputusan, harus ditentukan secara tegas mengenai apa tujuan pengembangan pariwisata sebagai suatu industri di daerah tersebut. Kemudian diberikan beberapa pertimbangan ditinjau dari segi ekonomi, apakah keuntungan dari pengembangan pariwisata akan baik bagi daerah tersebut, dimana kegiatan kepariwisataan itu dikembangkan maupun bagi perekonomian secara keseluruhan.

Menentukan sebuah sasaran pada setiap program pengembangan merupakan suatu hal yang penting, sehingga dalam melaksanakan program pengembangan tidak salah sasaran dan akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam program

pengembangan, yang menjadi sasaran adalah kawasan wisata Pantai Balekambang yang berada di Desa Srignonco Kecamatan Bantur. Dalam sasaran ini, disebutkan bahwa maksud pengembangan yang nantinya akan dilaksanakan adalah pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk menata dan mengembangkan kawasan Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata yang menarik, indah dan nyaman didasarkan pada pandangan wisatawan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:2) bahwa perencanaan pariwisata hendaknya harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai.

Jadi, dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan dan sasaran dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, diharapkan nantinya pengembangan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dan dapat mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan Yoeti (1997:9), bahwa alasan-alasan untuk merencanakan pengembangan kepariwisataan ialah agar perkembangannya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dan yang lebih penting ialah agar dapat mencapai sarannya.

b. Bentuk dan Langkah Perencanaan Pengembangan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian yang luas kepada daerah tentunya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diatur mengenai pendekatan dalam perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah pendekatan teknokratik yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Untuk Pemerintah Pusat dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan untuk Pemerintah Daerah dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Dalam hal menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata pada kawasan wisata Pantai Balekambang, instansi yang berwenang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

Sistem pendekatan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pantai Balekambang ini lebih difokuskan pada perencanaan yang bersifat khusus, teknis, fungsional dan operasional. Rencana ini disusun berdasarkan beberapa pendekatan. Pertama yaitu pendekatan kebijaksanaan pariwisata regional, yang dijadikan langkah awal dalam penyusunan rencana teknik kawasan wisata Pantai Balekambang. Hal ini dilakukan supaya rencana yang disusun dapat terintegrasi dengan rencana-rencana pengembangan pariwisata yang sudah ada di kawasan perencanaan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pelayanan wisata yang maksimal bagi para wisatawan yang pada akhirnya dapat menghasilkan masukan yang maksimal dalam pengembangan pariwisata. Pendekatan kedua yaitu pendekatan *supply*, yang dilakukan dengan menggali semaksimal mungkin potensi wisata yang dimiliki, supaya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam mengembangkan obyek wisata tersebut untuk menjadi

bahan pemberian variasi atraksi yang dapat digelar untuk wisatawan. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan *demand* (kebutuhan) yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara (*interview*) langsung kepada wisatawan. Pertanyaan yang diajukan terutama mengarah pada preferensi pengunjung terhadap obyek-obyek wisata yang digemari, atraksi yang diminati, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Hal ini dijadikan masukan dalam pengembangan atraksi dan penambahan kelengkapan fasilitas yang akan dikembangkan pada lokasi obyek wisata pada wilayah perencanaan. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan lingkungan, mengingat obyek wisata yang ada pada wilayah perencanaan berada pada kawasan hutan lindung yang harus dilindungi. Kesalahan penanganan pada obyek wisata akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam perencanaan dan pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata, melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Perencanaan Kabupaten Malang memegang fungsi perencanaan pengembangan pariwisata yang dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang yang kemudian diperinci dalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Balekambang.

Dinas Perhubungan dan Pariwisata memegang fungsi promosi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Malang. Tim yang telah dibentuk dari dalam Dinas membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dibuat per bidang. Kemudian RASK tersebut diajukan ke Badan Perencanaan. Dalam pengajuan tersebut, rencana yang diajukan tidak selalu dapat disetujui oleh Badan Perencanaan. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan ke Dinas dengan memperhatikan beberapa pertimbangan.

Kemudian dari dalam Dinas diadakan perubahan seperlunya terhadap RASK tersebut, yang selanjutnya setelah diadakan perubahan, maka diajukan kembali ke Badan Perencanaan. Apabila RASK mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan, akan berubah menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja.

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) memegang fungsi sebagai pelaksana pengembangan fisik, dalam arti yang melaksanakan proyek pembangunan fisik, misal pembangunan jalan dan sarana prasarana.

Perusahaan Daerah Jasa Yasa memegang fungsi pengelola, yaitu perencanaan operasionalisasi kegiatan sehari-hari dalam unit-unit wisata, termasuk Pantai Balekambang, misalnya kunjungan wisatawan tahun ini itu dari mana saja, promosi dan lain sebagainya. Dengan kata lain, PD Jasa Yasa mengambil tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).

Jadi, diperlukan koordinasi antar instansi dalam lingkup Kabupaten Malang untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan Pantai Balekambang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2005:310) bahwa koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, dimana ada institusi, badan dan lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya koordinasi, maka diharapkan akan terciptanya suatu aktivitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini tujuan dan sasaran dari perencanaan pembangunan

daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang.

Menurut Arsyad (1999:127), perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah serta meningkatkan kemampuan sektor swasta dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya tersebut secara maksimal dalam upaya menambah nilai daerah. Perencanaan pengembangan wisata yang dilaksanakan di kawasan Pantai Balekambang ditujukan untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya atau potensi yang dimiliki daerah, dalam hal ini potensi wisata pantai sehingga diharapkan dapat menambah nilai daerah, dalam artian mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut, yaitu Desa Srigonco Kecamatan Bantur dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang, dimana hal ini sejalan dengan program pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang dan Jawa Timur.

Dengan tercapainya tujuan perencanaan pengembangan dalam kawasan wisata Pantai Balekambang, maka diharapkan adanya perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi komunitas masyarakat sekitar Pantai Balekambang, pemerintah Kabupaten Malang, dan lingkungan dalam wilayah Jawa Timur tentunya, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dalam kawasan wisata maupun dari luar kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) yang memberikan definisi bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu

komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dengan berpegang pada azas prioritas. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya. Dalam Rencana Induk Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang, untuk kawasan wisata prioritas, yaitu pantai Balekambang, diperinci lagi dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Balekambang. Didalamnya memuat perencanaan komunitas, dalam hal ini dilakukan identifikasi terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitar dan dalam wilayah perencanaan Pantai Balekambang, yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sistem pariwisata di Kabupaten Malang. Untuk masyarakat disekitar wilayah perencanaan, juga dilakukan identifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi Kecamatan Bantur, yang meliputi kependudukan dan perekonomiannya.

Bentuk dan langkah perencanaan pengembangan yang dilakukan meliputi :

1). Mempelajari kebijaksanaan dan peraturan yang ada dan studi-studi yang pernah dilakukan terhadap wilayah perencanaan

Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini Badan Perencanaan yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan perencanaan, termasuk dalam perencanaan wisata. Dalam merencanakan pengembangan Balekambang, langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari kebijaksanaan dan peraturan yang ada dan studi-studi yang pernah dilakukan terhadap wilayah perencanaan, antara lain : kebijaksanaan nasional pengembangan pariwisata, kebijaksanaan pengembangan

pariwisata Propinsi Jawa Timur, kebijaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Malang, dan kebijaksanaan ketentuan umum Rencana Induk Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang terhadap wilayah perencanaan pengembangan Pantai Balekambang. Kebijakan pariwisata nasional disusun berdasarkan potensi, masalah dan peluang pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia yang merupakan kerangka kerja yang berupa strategi dasar kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Selanjutnya, kebijakan pariwisata nasional dijabarkan dalam kebijakan pariwisata Propinsi Jawa Timur. Hal ini telah dirumuskan dalam program pengembangan pariwisata Jawa Timur dalam setiap program pembangunan lima tahunannya, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata Jawa Timur merupakan bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional secara keseluruhan. Kebijakan pariwisata Propinsi Jawa Timur kemudian dijabarkan dalam kebijaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Malang. Kegiatan pariwisata juga diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang. Selanjutnya, guna mencapai sasaran pengembangan obyek wisata di Kabupaten Malang, perlu dilakukan serangkaian penyusunan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan kegiatan pengembangan pariwisata, yang harus mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang yang berisi alternatif pengembangan yang direkomendasikan pada obyek wisata Pantai Balekambang.

Hal ini sesuai dengan pendapat Yoeti (1997:23), bahwa dalam sektor kepariwisataan, suatu perencanaan pengembangannya dapat melalui tahap-tahap antara lain : perencanaan secara menyeluruh di tingkat nasional, rencana induk

(*master plan*) tingkat nasional, dan perencanaan secara regional dan atau secara sektoral. Dalam hal perencanaan secara regional, pengembangan suatu daerah tujuan wisata secara geografis di daerah yang dianggap mempunyai potensi kepariwisataan dengan prospek baik, disini yaitu Jawa Timur. Sedangkan dalam hal perencanaan secara sektoral, pengembangan yang dilaksanakan dalam suatu sektor saja, seperti halnya pembangunan fasilitas di kawasan wisata Pantai Balekambang. Menurut Kaiser dan Helber dalam Yoeti (1997:29), tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah (*regional tourism development*), yang mencakup pembangunan fisik obyek dan atraksi wisata, dan perencanaan promosi yang akan dilakukan.

2). Membuat identifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitar dan dalam wilayah perencanaan Pantai Balekambang

Tahap kedua yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan yaitu membuat identifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitar dan dalam wilayah perencanaan Pantai Balekambang, yaitu Kabupaten Malang dan Kecamatan Bantur. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sjafrudin (1993:49), bahwa salah satu langkah utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk. Dengan begitu, dapat diketahui karakteristik komunitas yang ada dalam wilayah perencanaan. Jadi perencanaan yang dibuat benar-benar didahului studi tentang masyarakat di sekitar obyek wisata yang akan direncanakan pengembangannya.

3). Membuat identifikasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai karakteristik dan kondisi obyek dan daya tarik wisata Pantai Balekambang

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Balekambang, langkah ketiga yang dilakukan oleh Badan Perencanaan adalah membuat identifikasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai karakteristik dan kondisi obyek dan daya tarik wisata Pantai Balekambang. Karakteristik dan kondisi obyek ini meliputi fisik dasar, analisa tapak, pembagian zoning, fasilitas dan utilitas, pola sirkulasi, serta prasaran dan sarana transportasi. Fisik dasar meliputi kondisi topografi dan geologi, hidrologi, dan kelompok vegetasi. Analisis tapak meliputi analisa pengaturan, pengelolaan pada lokasi yang sudah berkembang, serta pengelolaan pada lokasi yang belum berkembang. Pembagian zoning dalam perencanaan pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang dibagi dalam 8 (delapan) zona pengembangan. Fasilitas dan utilitas meliputi kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, telepon, sistem pembuangan sampah, drainase, serta prasarana dan sarana transportasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:7) bahwa salah satu tahap dalam perencanaan pariwisata adalah melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki.

4). Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi serta potensi dan peluang pengembangan yang dimungkinkan

Langkah keempat yang dilaksanakan dalam perencanaan pengembangan Pantai Balekambang adalah membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi serta potensi dan peluang pengembangan yang dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sjafrudin (1993:49), bahwa salah satu langkah

yang perlu ditempuh dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah melakukan analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah. Permasalahan yang ada dalam perencanaan pengembangan Balekambang adalah jalan Bantur – Balekambang 18 km dalam kondisi buruk dan utilitas yang kurang. Sedangkan potensi yang dimiliki oleh obyek wisata Pantai Balekambang adalah obyek wisata alam yang berupa pantai dengan pemandangan (*view*) yang indah serta upacara ritual yang berupa upacara Suroan dan Jalanidhipuja. Dengan melihat masalah dan potensi yang ada di obyek wisata Pantai Balekambang, maka dapat diketahui alternatif cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut serta bagaimana cara memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan membuat atraksi yang mungkin dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Malang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2005:11) bahwa potensi dan masalah merupakan dua hal yang penting dan perlu diketahui oleh setiap perencana dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan daerah. Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Bahkan hal tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:2) bahwa salah satu aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah wisatawan (*tourist*), dimana kita harus tahu lebih dahulu mengenai karakteristik wisatawan yang

diharapkan datang, misalnya dari daerah mana mereka datang, anak muda atau orang tua. Dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, pangsa pasar yang mungkin dikembangkan yaitu keluarga dan remaja, baik lokal maupun regional.

5). Membuat identifikasi dan rencana teknik kawasan yang meliputi rencana eksternal kawasan dan rencana internal kawasan

Langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima adalah membuat identifikasi dan rencana teknik kawasan yang meliputi rencana eksternal kawasan dan rencana internal kawasan. Rencana eksternal kawasan meliputi rencana penataan koridor dan rencana pengembangan *activity support*. Sedangkan rencana internal kawasan meliputi rencana pengembangan *zoning*, rencana sirkulasi dan jaringan jalan, rencana tapak, rencana fasilitas dan penataan bangunan, rencana ruang terbuka dan lansekap, serta rencana utilitas. Jadi rencana teknik kawasan dibuat selengkap mungkin, baik rencana eksternal kawasan maupun rencana internalnya, sehingga dengan penataan dan penambahan fasilitas, diharapkan akan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hadinoto (1996:207) bahwa, salah satu prinsip dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata adalah dibuatnya rencana fisik detail untuk pengembangan kawasan untuk menentukan fasilitas tambahan yang diperlukan.

Menurut Yoeti (1997:3), salah satu aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah pengangkutan (*transportations*), dimana kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, bagaimana fasilitas transportasi lokal yang tersedia, yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan wisata di daerah tujuan

wisata yang dikunjungi. Aspek lain yang perlu diketahui yaitu fasilitas pelayanan (*service facilities*), dimana fasilitas apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut, bagaimana akomodasi, penginapan yang tersedia, rumah makan, serta pelayanan umum di daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi wisatawan.

6). Membuat analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata

Langkah keenam yang dilaksanakan yaitu membuat analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata yang meliputi analisis fisik atau analisis makro dampak lingkungan hidup, analisis dampak sosial, dan analisis dampak ekonomi. Seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:2), bahwa dalam pengembangan pariwisata sebagai industri, perlu dipertimbangkan dalam segala macam segi tanpa terkecuali, karena pariwisata sebagai suatu industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Masing-masing analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata yang dibuat memakai faktor penilaian tersendiri. Pertama, analisis fisik atau analisis makro dampak lingkungan hidup meliputi dampak terhadap fisik dasar, dampak terhadap flora, dan dampak terhadap fauna disekitar obyek wisata. Yang termasuk unsur-unsur yang dinilai dalam dampak terhadap fisik dasar yaitu iklim, kualitas udara, kebisingan, hidrologi. Dampak terhadap flora meliputi perubahan, kehilangan dan kerusakan komunitas tumbuhan, komunitas tumbuhan unik dan hutan lindung, serta kerusakan tumbuhan yang berguna bagi kepentingan ekonomi dan ekologi. Sedangkan dampak terhadap fauna disekitar obyek wisata meliputi arah dan migrasi hewan, kematian hewan, dan gangguan terhadap satwa liar. Kedua, analisis dampak

sosial yang meliputi solidaritas sosial masyarakat, budi pekerti dan moral, pandangan terhadap kebendaan, tanggungjawab sosial, gangguan terhadap peninggalan obyek wisata, dan penyakit masyarakat. Ketiga, analisis dampak ekonomi yang meliputi dampak terhadap kesempatan kerja, perkiraan dampak terhadap pendapatan masyarakat, serta perkiraan dampak terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Yoeti (1997:13) mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan kepariwisataan, dimana dua hal diantaranya adalah perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus pula berdasarkan studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam, dan budaya di daerah sekitarnya; serta perencanaan pengembangan kepariwisataan tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial yang mungkin ditimbulkannya. Dengan membuat perkiraan analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata, maka dapat diketahui dampak terhadap lingkungan hidup, dampak sosial, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang yang nantinya akan dilaksanakan. Hal seperti ini juga dikemukakan oleh Murphy dalam Ross (1998:177) bahwa meskipun pemerintah umumnya memusatkan perhatian terutama pada keuntungan ekonomi yang positif, kini sudah banyak diakui kemungkinan timbulnya biaya sosial dan lingkungan akibat perkembangan pariwisata, dan perlunya penyelidikan seksama dampak non ekonomi menganjurkan perencanaan pariwisata yang seksama yang bertujuan mengurangi sesedikit mungkin pengaruh negatif pariwisata dan meningkatkan keuntungan bagi warga negara tuan rumah.

Pembuatan analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Spillane (1990:55), bahwa pengembangan daerah pariwisata pasti menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk mencegah perubahan itu menuju ke arah yang negatif, perencanaan yang mencakup aspek sosial merupakan cara yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian itu, dirancang beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak negatif diminimalkan.

7). Membuat penentuan aspek pengelolaan dan tahapan pelaksanaan rencana

Langkah ketujuh adalah langkah yang terakhir dilaksanakan yaitu membuat penentuan aspek pengelolaan dan tahapan pelaksanaan rencana, yang meliputi prioritas pelaksanaan pembangunan, pentahapan pelaksanaan rencana Balekambang, arahan penanganan lingkungan, indikasi program dan proyek serta pendanaan, dan aspek kelembagaan dan hukum pembangunan. Prioritas pelaksanaan rencana pembangunan ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi obyek wisata sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan yang layak dan bersifat pengarah, hal ini terutama ditujukan pada zona-zona kawasan perencanaan yang belum berkembang. Penentuan prioritas ini dimaksudkan untuk membantu keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pentahapan pelaksanaan rencana Balekambang perlu dilaksanakan, karena mengingat bahwa rencana pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang merupakan rencana pengembangan jangka panjang jika dilihat dari segi waktu perencanaannya, yaitu jangka waktu sepuluh tahunan dalam periode 1994/1995-2004/2005. Untuk efisiensi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan jangka menengah lima tahunan, maka rencana pembangunan lima tahun tersebut dibagi menjadi tahap persiapan, yaitu tahun 1995/1996-1998/1999; tahap pertama yaitu tahun 1999/2000-2003/2004; dan tahap kedua yaitu tahun 2004/2005-2005/2006. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2005:13) bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah. Sebagai suatu tahapan, tentunya akan terikat oleh suatu dimensi yang disebut dengan dimensi ruang dan waktu. Ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan-tahapan berikutnya, dan bahkan dapat menjadi landasan awal bagi pelaksanaan tahapan berikutnya. Pembatasan ruang dan waktu dalam hal ini bukan berarti sebagai batasan yang bersifat mutlak yang dipandang secara parsial, melainkan suatu kenyataan yang harus dipahami oleh setiap perencana, bahwa hasil-hasil rumusan/keputusan yang disusunnya harus diimplementasikan dalam bentuk aksi/kegiatan untuk kurun waktu tertentu, di wilayah atau daerah tertentu. Aspek ruang dan waktu ini harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam timing yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, serta untuk berapa lama masa pemberlakuannya.

Arahan penanganan lingkungan dilakukan dalam bentuk studi analisis dampak lingkungan dan studi evaluasi lingkungan, karena dampak pengembangan pariwisata sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar obyek wisata. Indikasi program dan proyek serta pendanaan bersumber dari dua arah, yaitu sumber yang datang dari Kabupaten Malang (Pendapatan Asli Daerah) dan sumber yang datang dari subsidi/bantuan dari luar. Untuk sumber yang datang dari Pemerintah Kabupaten Malang, perlu ditelaah secara mendalam tentang sektor-sektor dan pos-pos pendapatan yang masih mungkin dikembangkan. Sedangkan untuk sumber keuangan yang berasal dari luar daerah yang paling potensial untuk digali adalah dengan menggali peran serta sektor swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syahroni (2001:17), bahwa demi kepentingan praktis, perencanaan pembangunan daerah dapat pula melibatkan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (*actors*), baik umum (*public*) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, investor dapat ikut serta dalam pembangunan, dalam hal ini dalam pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang.

Aspek kelembagaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan meliputi dua aspek, yaitu aspek pengaturan dan aspek organisasi. Sebagai acuan, peraturan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, dimana undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan.

3. Pengembangan Pariwisata yang Telah Dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata ditempuh melalui peningkatan daya tarik wisata di bidang seni budaya dan pelaksanaan pengembangan kawasan wisata. Peningkatan daya daya tarik wisata di bidang seni budaya perlu dilaksanakan secara kontinyu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prajogo dalam Spillane (1990:130) bahwa pengembangan pariwisata merupakan usaha yang terus-menerus. Pengembangan itu harus mampu memberikan daya saing terhadap daerah tujuan wisata lain, baik dari segi pelayanan, atraksi, maupun obyek wisata, sehingga dapat menyesuaikan dengan selera wisatawan.

Sedangkan pelaksanaan pengembangan yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang berdasarkan pentahapan pelaksanaan Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang, sampai sekarang ini belum semuanya bisa berjalan. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pengembangan yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi :

1. Pelaksanaan rencana tahap I

Pengembangan jaringan jalan dengan pembukaan akses baru sesuai dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang ada untuk membuka dan mengembangkan potensi yang terdapat di kawasan wisata Pantai Balekambang. Pengembangan jaringan jalan baru ini diikuti oleh adanya pengembangan pelataran parkir baru yang berada di sisi jalan tersebut. Pada tahap I, selain jaringan jalan utama juga telah dibangun taman bermain dan kios souvenir, kantor pengelola dan gardu pandang.

2. Tahap II

Pelaksanaan pada tahap II merupakan kelanjutan dari tahap I, dimana jaringan jalan yang sudah dirintis pada tahap sebelumnya perlu dilanjutkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pelaksanaan pentahapan berikutnya. Pelaksanaan pembangunan tahap II terdiri dari gardu pandang, pendopo, kios makanan, parkir, fasilitas penunjang, dan penginapan.

Sedangkan dengan mengacu pada perencanaan pengembangan obyek, zona pengembangan yang telah dikembangkan pada obyek wisata Pantai Balekambang, yaitu : zona I – zona VI. Sedangkan berdasarkan prioritas pembangunan seperti yang tercantum dalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata Pantai Balekambang, pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan urgensi dan tingkat permasalahannya meliputi : pembangunan mendesak (aksesibilitas jalan), pembangunan yang diprioritaskan (penginapan, perdagangan, perhubungan, atraksi wisata dan taman bermain), pembangunan strategis (fasilitas umum, penertiban penggunaan tanah dan bangunan, serta pengadaan utilitas yang memadai), serta pembangunan pelengkap (fasilitas rekreasi, *camping ground*, *hiking*, dan *jogging track*).

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana yang ada pada Pantai Balekambang yaitu penginapan, warung makan, kios tempat penjualan cinderamata khas pantai, fasilitas peribadatan yang berupa mushola dan pura, pendopo, tempat parkir yang luas, loket masuk, kamar kecil, gardu pandang, taman bermain dan penginapan. Sedangkan prasarana yang ada meliputi

aksesibilitas jalan, sarana transportasi, kebutuhan air bersih dengan pipanisasi, kebutuhan listrik dengan pengadaan generator genset pembangkit tenaga listrik, telepon kantor, sistem pembuangan sampah dengan tong sampah, dan drainase yang dialirkan ke sungai terdekat.

Pihak pengelola Pantai Balekambang sudah berusaha menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke obyek, dimana penyediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal ini juga dijelaskan oleh Yoeti (1982:164), hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata adalah daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut "*something to do*", artinya ditempat tersebut selain banyak yang dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lama di tempat tersebut. Pendapat ini didukung oleh Spillane (1990:123) bahwa sistem pelayanan umum yang memadai sangat penting artinya bagi pengembangan pariwisata yang layak. Pelayanan umum maksudnya adalah persediaan air, tenaga listrik, pembuangan air, dan saluran telepon. Di daerah-daerah wisata yang belum ada, sistem-sistem itu harus diperbaiki dan ditingkatkan, baik kapasitas maupun kualitasnya atau harus dibangun yang baru.

Di kawasan Pantai Balekambang sudah disediakan sarana penginapan bagi pengunjung yang datang dari luar Kota Malang, yaitu losmen bambu dan Wibisono. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pendit (1986:72) bahwa salah satu syarat minimal yang dibutuhkan suatu daerah tujuan wisata (*tourist destination area*)

adalah tersedianya tempat tinggal sementara bagi pengunjung yang datang ke daerah tujuan wisata tersebut.

Troisi dalam Pendit (1986:118) mengemukakan bahwa fasilitas-fasilitas pariwisata yang tersedia sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pada wisatawan merupakan persediaan (*supply*) dalam industri pariwisata yang dapat ditawarkan di pasaran wisata. Selaras dengan pendapat tersebut, Yoeti (1982:164) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan manfaat dan kepuasan yang diperoleh dari suatu daerah tujuan wisata adalah *tourist services* yang biasa disebut oleh Prof. Mariotti sebagai '*attractive derivee*', yang merupakan semua fasilitas yang dapat digunakan di daerah tujuan wisata. Sesungguhnya *tourist services* bukanlah merupakan daya tarik dalam kepariwisataan, tetapi kehadirannya diperlukan bila hendak mengembangkan kepariwisataan pada suatu daerah. Begitu juga dengan penyediaan sarana dan prasarana wisata di kawasan Pantai Balekambang merupakan bentuk pelayanan yang ditawarkan pada wisatawan yang berkunjung ke obyek oleh pihak pengelola, yaitu PD Jasa Yasa dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan akan kenyamanan saat berwisata ke Pantai Balekambang.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk pengembangan sumber daya manusia, sebagai pihak pengelola, PD Jasa Yasa telah berusaha melakukan pengembangan internal, dengan diadakannya pembinaan tentang pentingnya pelayanan kepada pengunjung. Hal ini selaras dengan pendapat McIntosh dan Gupta dalam Pendit (1986:31) bahwa pariwisata merupakan gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis,

pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Jadi, pelayanan pada wisatawan sangat memegang peranan penting dalam menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke suatu obyek wisata.

Pengembangan sumber daya manusia yang lainnya ditempuh dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Diklat kepariwisataan sangat kurang bagi petugas pengelola Pantai Wisata Balekambang. Pegawai yang diikutsertakan hanya Kepala Unit Wisata Pantai Balekambang, Bendahara Pembantu, dan Kasi TU. Sedangkan staf-staf yang berada dibawahnya belum ada yang pernah mengikuti diklat. Padahal, diklat kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bisa dikatakan sudah lengkap. Tetapi pelaksanaannya belum merata untuk pegawai di unit wisata Pantai Balekambang.

Pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan ini sesuai dengan misi kedua dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata, yaitu mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Malang sebagai daerah tujuan wisata dengan salah satu tujuannya yaitu menempatkan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kepariwisataan dengan sasaran meningkatkan sumber daya manusia dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Malang.

d. Upaya Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

Suatu obyek dan daya tarik wisata dalam pengembangannya tidak terlepas dari peran promosi, karena promosi merupakan cara untuk memperkenalkan suatu produk wisata kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk memiliki produk tersebut. Dalam hal pengembangan kawasan wisata Pantai

Balekambang, promosi dilaksanakan untuk memperkenalkan daya tarik atau potensi yang dimiliki oleh Pantai Balekambang agar wisatawan mengetahui keberadaan obyek tersebut dan akhirnya tertarik untuk berkunjung ke obyek.

Penyebaran informasi melalui kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam rangka pengembangan obyek wisata. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat luar menjadi kenal atau tahu, paham dan tertarik akan potensi wisata yang ada, khususnya di Kabupaten Malang, sehingga jumlah pengunjung yang datang dan berekreasi ke obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Malang dapat ditingkatkan dan tentunya perolehan PAD dapat lebih besar lagi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Wahab (1992:27) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan, salah satu strategi dasar yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam suatu daerah tujuan wisata adalah pemasaran wisata. Hal ini penting untuk daerah tujuan wisata, dimana diperlukan kebijakan tentang pemasaran pariwisata yang berorientasi pada pengunjung dan wisatawan.

Kegiatan promosi dan pemasaran kawasan wisata Pantai Balekambang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Departemen Pariwisata, media cetak maupun elektronik untuk mempromosikan keindahan Pantai Balekambang. Upaya lain dalam promosi dan pemasaran juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan hotel dan *Tourist Information Service* (TIS). Pemerintah Kabupaten Malang juga telah mengikuti pameran wisata di tingkat regional maupun nasional dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam memperkenalkan obyek wisata di

Kabupaten Malang juga telah dilaksanakan dengan pemilihan duta wisata, dimana selain ditujukan untuk mengundang wisatawan, juga untuk menggaet investor. Hal ini selaras dengan misi kedua dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata, yaitu mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Malang sebagai daerah tujuan wisata dengan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dalam skala pembangunan Kabupaten Malang dengan sasaran meningkatkan pemasaran obyek dan daya tarik wisata.

Menurut Spillane (1990:116), salah satu prinsip paduan pemasaran (*marketing mix*) yang dapat digunakan dalam promosi dan pemasaran wisata yaitu prinsip paduan komunikasi dan penerangan yang dapat ditempuh melalui pendekatan *sales promotion*, *image promotion*, dan pemberian jasa penerangan. Mengingat bahwa tanpa komunikasi, konsumen tidak akan sadar tentang tersedianya produk wisata yang menarik. Konsumen itu harus diberitahu, diperkenalkan, ditarik, dan didorong agar mau mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Pendekatan *sales promotion* meliputi berbagai kegiatan komunikasi yang diarahkan pada wisatawan, baik melalui media umum, seperti surat kabar, TV, radio dan sebagainya atau melalui saluran-saluran perantara biro perjalanan. Sedangkan pendekatan *image promotion* merupakan kegiatan yang bersifat pembujukan secara halus/tidak langsung. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesan, gambaran suatu daerah tujuan wisata melalui cara-cara yang mampu menumbuhkan suasana yang tepat, yaitu suasana yang menumbuhkan rasa simpati, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba dan rasa ingin mengenal, misalnya melalui pengiriman misi-misi kesenian. Pendekatan terakhir, yaitu pemberian jasa penerangan melalui adanya kantor-kantor penerangan

pariwisata dan penerbitan buku-buku petunjuk. Dalam melaksanakan upaya promosi dan pemasaran obyek wisata Pantai Balekambang, pendekatan *sales promotion* yang ditempuh adalah melalui pemberitaan di media cetak yaitu surat kabar seperti Surya dan Radar Malang; melalui TV seperti ATV, Malang TV, acara Mlaku-Mlaku di JTV dan Piknik di RCTI; dan radio swasta. Pendekatan *image promotion* dilaksanakan melalui pameran wisata. Sedangkan pendekatan dengan cara pemberian jasa penerangan ditempuh melalui kerjasama dengan *Tourist Information Service* (TIS) pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta penerbitan brosur dan buku agenda wisata.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:3) bahwa salah satu aspek yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata adalah informasi dan promosi (*information*), dimana calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Untuk itu, perlu dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi yang akan dilakukan. Ke mana brosur harus disebar, sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata, dengan maksud agar calon wisatawan mudah dan cepat mengambil keputusan, berangkat atau tidak ke daerah tujuan wisata yang ditawarkan. Hal ini didukung oleh Spillane (1990: 89) bahwa rangkaian jasa-jasa yang diberikan dalam pelayanan wisata merupakan suatu produk wisata, karena hal ini merupakan suatu kesatuan, maka bisa disebut suatu paket (*package*). Paket wisata (*package tour*) adalah suatu rencana atau acara perjalanan wisata yang telah tersusun secara tetap, dengan harga tertentu yang telah termasuk pula biaya-biaya untuk pengangkutan, penginapan, darmawisata dan sebagainya yang telah tercantum dalam acara itu. Mengingat pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti

(1982:154) bahwa industri pariwisata itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan bermacam-macam jasa, yang dibeli oleh wisatawan dalam bentuk paket (*package*). Yoeti (1982:79) menambahkan, kesan mengenai bagaimana bentuk perjalanan yang akan diselenggarakan akan sangat mempengaruhi pilihan diantara beberapa alternatif dari kesempatan melakukan perjalanan (*travel opportunities*) yang ditawarkan. Kesan itu hendaknya tercermin dalam pesan promosi (*promotion messages*) dalam brosur, iklan, poster, dan leaflets yang dilaksanakan dengan memberikan kesan yang baik, sehingga promosi yang dilakukan hasilnya lebih efektif lagi. Pendit (1986:202) juga menambahkan bahwa publisitas atau promosi yang dilaksanakan itu hendaknya didasarkan pada kenyataan, bersifat informatif dan ringkas.

Yoeti (1982:339) memberikan pendapat dalam upaya promosi dan pemasaran obyek wisata dengan sebuah rumus AIDA'S yang merupakan singkatan dari *Attention, Interest, Desire, Action, dan Satisfaction*. Rumus AIDA'S dapat dikatakan sebagai rumus daya tarik untuk memikat. *Attention* berarti suatu obyek dan daya tarik wisata harus dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian orang. Bila konsumen dalam hal ini adalah wisatawan sering melihatnya, maka timbul dalam hatinya suatu perhatian (*Interest*) akan produk wisata itu. Dengan menggunakan semboyan atau kata-kata yang cocok untuk produk wisata tersebut, maka konsumen/wisatawan akan timbul keinginan (*Desire*) untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Kalau keinginan itu sudah timbul sedemikian besarnya, maka diharapkan akan terjadi suatu tindakan (*Action*) untuk mengunjunginya. Biasanya konsumen/wisatawan tidak hanya puas dengan keempat faktor tersebut, tetapi

menghendaki agar produk wisata tersebut dapat memberikan kepuasan (*Satisfaction*). Oleh karena itu, Rumus AIDA'S merupakan rumus daya tarik untuk memikat wisatawan agar berkunjung ke daerah tujuan wisata secara memuaskan.

4. Faktor-Faktor Pendukung dan Kendala-Kendala dalam Pengembangan Pariwisata yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Balekambang

a. Faktor-Faktor Pendukung

1). Karakteristik obyek

Seperti kita ketahui bahwa kondisi alam merupakan salah satu faktor pendukung di dunia kepariwisataan, begitu juga di Balekambang. Kondisi alam yang baik terutama di lokasi yang akan menuju Balekambang sangatlah bagus. Jalan yang akan masuk lokasi wisata dikelilingi hutan jati dan pinus. Menurut peneliti, pihak pengelola hendaknya mempertahankan keadaan ini dengan koordinasi dengan pihak Perhutani yang mengelola hutan tersebut. Karena hal ini akan menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Balekambang.

Kondisi alam di Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang baik dan subur serta mempunyai iklim yang sejuk. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari gunung-gunung dan perbukitan. Melihat potensi yang dimiliki daerah ini, maka dapat dikatakan wilayahnya mempunyai berbagai pemandangan dan panorama alam yang sangat indah dengan berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, Pantai Balekambang dikelilingi oleh hutan jati. Pada tepi pantai, terdapat hutan bakau yang memanjang ke arah selatan. Sehingga mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Sedangkan obyek wisata budaya yang berupa upacara Suroan dan Jalanidhipuja lebih banyak menyedot wisatawan nusantara, sehingga pihak pengelola perlu mengoptimalkan dan memanfaatkan even-even tradisonal untuk menambah minat wisatawan agar lebih tertarik untuk mengunjungi obyek.

2). Dibukanya jalur Malang Selatan

Aksesibilitas atau daya jangkau yang mudah ditempuh juga menjadi pertimbangan bagi wisatawan. Dengan dibukanya jalur Malang Selatan untuk mempermudah akses menuju lokasi, diharapkan akan memberi kemudahan pada wisatawan dalam melakukan perjalanannya menuju lokasi obyek wisata. Hal ini selaras dengan pendapat Spillane (1990:92) bahwa kemajuan pariwisata sebagai industri sebenarnya ditunjang oleh aksesibilitas dan transportasi yang lancar.

3). Peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar obyek wisata

Pariwisata bisa menghasilkan dampak yang berlipat ganda (*multiplier effect*), dimana masyarakat di sekitar obyek bisa merasakan dampak positif dari pariwisata itu sendiri dengan bertambahnya pendapatan yang mereka peroleh akibat pengembangan pariwisata yang dilaksanakan. Jadi hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, dalam hal ini potensi wisata pantai sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Spillane (1990:59) bahwa industri pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang. Pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan jangkauan yang amat luas. Sejumlah tenaga kerja terserap ke dalam kegiatan

pariwisata sebagai tenaga kerja yang langsung maupun yang bekerja di sektor pendukung. Semua ini akan memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menyebarkan pemerataan. Dengan demikian, industri pariwisata juga dapat memajukan dan pemeratakan perekonomian aegara karena kegiatan pariwisata merupakan sektor yang amat padat karya, dalam artian mempunyai daya serap yang besar terhadap pengangguran; serta meningkatkan pendapatan penduduk.

Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi perekonomian itu dapat terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik. Dalam hal ini, pariwisata sebagai industri jasa cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan tentang kesempatan kerja. Aspek lain yang dianggap penting dalam kebijaksanaan ekonomi ialah pembangunan daerah secara regional melalui kegiatan kepariwisataan. Pariwisata bisa ditinjau sebagai sesuatu yang dapat memberi kesejahteraan bagi penduduk di sekitarnya (Spillane, 1990:46).

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Murphy dalam Ross (1998:177) mengemukakan bahwa perubahan sosial yang berkaitan dengan penambahan jumlah wisatawan dapat mengakibatkan perkembangan yang memperlihatkan kemajuan sosio-ekonomi masyarakat, suatu perbaikan taraf hidup, serta pertumbuhan sosial dan budaya kehidupan suatu daerah yang melahirkan persepsi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal senada juga dikemukakan oleh Pendit

(1986:29) bahwa pariwisata adalah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

4) UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Dengan adanya UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan telah mendorong adanya berbagai usaha dari pemerintah dalam hal ini PD Jasa Yasa untuk mengelola potensi pariwisata yang ada di daerah, salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan Pantai Balekambang. Hal ini sesuai dengan pasal 34 UU No 9 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

5). Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tentunya merupakan tantangan bagi PD Jasa Yasa untuk mempertahankan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan cara meningkatkan pelayanan, terutama pada hari lebaran, tahun baru, dan pada saat upacara Jalanidhipuja dan upacara Suroan; serta membuat paket wisata yang menarik untuk mengundang minat wisatawan untuk berkunjung kesana. Hal ini tentunya akan mendukung pengembangan yang dilaksanakan di Pantai Balekambang, karena pendapatan yang diperoleh dari karcis masuk dan karcis parkir nantinya akan dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

b). Kendala-Kendala

1). Keterbatasan dana

Dana memang sangat diperlukan dalam suatu bentuk pengelolaan dan pengembangan, baik usaha swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula dengan pengelola Pantai Balekambang, sehingga mereka membagi tahap pelaksanaan menjadi empat tahap pengembangan. Pemerintah telah berusaha mencari investor untuk membantu dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan pengembangan, tetapi pemerintah mengalami kesulitan dalam mencari investor yang mau bekerjasama. Mereka merasa perlu memperhitungkan untung rugi, apakah sebanding dengan modal yang mereka keluarkan. Sampai saat ini, pemerintah masih berusaha mencari investor yang mau untuk diajak bekerjasama dengan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan dana yang dihadapi.

2). Kondisi jalan menuju obyek yang rusak

Kondisi jalan yang ada sekarang kurang mendukung bagi pengelolaan. Menurut peneliti, pihak PD Jasa Yasa sesegera mungkin melakukan pembenahan terhadap jalan yang rusak tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Bina Marga. Karena jika dibiarkan, akan mengganggu wisatawan yang berkunjung, sehingga wisatawan enggan kembali ke Balekambang dengan alasan jalan yang kurang baik. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pendit (1986:21) bahwa faktor pengangkutan dalam dunia pariwisata membutuhkan syarat-syarat tertentu, antara lain jalan-jalan yang baik dan lalu lintas yang lancar.

3) Belum adanya biro perjalanan yang bekerjasama dengan pihak pengelola

Sebagaimana peneliti melakukan pengamatan, untuk saat ini masih belum ada agen perjalanan yang langsung bekerjasama dengan pihak PD Jasa Yasa dalam mengantarkan wisatawan yang berkunjung, terutama wisatawan mancanegara. Padahal keberadaannya sangat vital dibutuhkan, karena mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan bagi para wisatawan. Sehingga wisatawan mancanegara jarang mengunjungi pantai ini.

Menurut peneliti, PD Jasa Yasa harus bertindak cepat dalam mengatasi masalah ini. Jika tidak, maka akan terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Balekambang. Oleh karena itu, pihak Jasa Yasa harus mengantisipasinya dengan bekerjasama dengan pihak agen perjalanan yang ada sekarang.

Pentingnya biro perjalanan didukung oleh pendapat Yoeti (1982:227) bahwa biro perjalanan (*travel agent*) menduduki tempat yang penting dalam industri pariwisata. Sehingga dapat dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan suatu daerah, dalam hal ini yaitu daerah tujuan wisata, karena peranannya dalam sektor perekonomian cukup berarti, terutama bagi daerah-daerah tujuan wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Biro perjalanan merupakan mata rantai yang amat penting untuk mendorong atau merangsang agar orang-orang melakukan perjalanan wisata.

4). Kurangnya investor

Sedikit sekali minat investor yang mau melirik potensi yang ada di Balekambang, sehingga tidak dapat dilakukan pengelolaan yang maksimal. Untuk mengatasi kendala dalam hal kurangnya minat investor dalam pengelolaan

kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Malang ke depannya akan menyusun rencana pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang secara menyeluruh beserta rencana bisnisnya (*business plan*), baru kemudian ditawarkan pada investor. Investor dalam suatu pengelolaan usaha yang besar memang sangat perlu dibutuhkan, hal ini juga yang dirasakan oleh pihak pengelola Pantai Balekambang. Tanpa adanya investor, dirasa kurang dalam mengelola Pantai Balekambang, sehingga kurang maksimal dalam pembangunan maupun pengembangan obyek wisata. Untuk itu, perlu kiranya pihak PD Jasa Yasa secepatnya menggaet pihak investor dalam mengelola Pantai Balekambang, dan lagi dengan adanya investor beban yang ditanggung semakin berkurang.

5). Suasana yang kurang kondusif

Suasana yang kurang kondusif membuat wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara kurang yakin atas jaminan keamanan yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga hal ini membuat mereka membatalkan kunjungan mereka ke Indonesia. Pemerintah harus bisa menumbuhkan suasana yang kondusif agar dapat menumbuhkan kepercayaan pada wisatawan untuk kembali berkunjung ke obyek wisata. Suasana yang kurang mendukung di negara kita akhir-akhir ini kurang mendukung, dimulai dari krisis moneter sampai terjadinya bom Bali mengakibatkan wisatawan yang berkunjung sangat khawatir akan keselamatan mereka. Oleh karena itu, pihak PD Jasa Yasa harus mengantisipasi dengan gencar mengadakan promosi dan melakukan pengamanan yang sangat ketat bagi wisatawan yang

berkunjung ke Pantai Balekambang, sehingga wisatawan yang berkunjung merasa aman.

6). Faktor bencana alam

Faktor bencana alam merupakan kendala yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang, misalnya tsunami dan tanah longsor. Faktor alam yang kurang mendukung dalam pengembangan obyek wisata yang dilaksanakan sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan.

7). Status tanahnya masih dikelola oleh Perhutani

Status kepemilikan lahan obyek wisata Pantai Balekambang adalah milik Dinas Perhutani dan pengawasannya sangat ketat, maka obyek wisata Pantai Balekambang mengalami kendala dalam pengembangannya karena sangat sulit untuk dipindahtangankan. Status kepemilikan lahan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian atau tukar menukar tanah dengan pihak Perhutani, masih belum sampai pada keputusan final.

8). Air bersih di lokasi wisata belum memenuhi syarat

Kebutuhan air bersih pada obyek wisata Pantai Balekambang untuk saat ini belum mencukupi. Saat ini, mata air yang terdekat dengan lokasi obyek wisata, debit airnya sangat kurang. Sebenarnya ada sumber mata air yang dapat dimanfaatkan, tetapi lokasinya agak jauh dari lokasi, yaitu sekitar 2 km ke utara. Untuk itu, perlu dilakukan pipanisasi dalam pengembangan obyek, sehingga kebutuhan wisatawan akan air bersih dapat tercukupi.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Obyek wisata Pantai Balekambang merupakan obyek wisata yang menarik dan potensial, baik dari wisata alamnya yang berupa pantai dengan segala potensinya maupun wisata budaya yang berupa upacara ritual. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam melaksanakan pengembangan Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri yang membedakannya dengan obyek wisata lainnya.
2. Perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Malang kemudian diperinci lagi dalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Balekambang. Penyusunan RIPP ini tetap berpedoman pada kebijaksanaan pengembangan pariwisata di tingkat Nasional dan Propinsi Jawa Timur.
3. Pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, dalam hal ini potensi wisata pantai sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut dan ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan program pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang dan Jawa Timur.

4. Sasaran dari perencanaan pengembangan adalah kawasan wisata Pantai Balekambang yang berada di Desa Srignonco Kecamatan Bantur. Dalam sasaran ini, disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk menata dan mengembangkan kawasan Pantai Balekambang menjadi suatu kawasan wisata yang menarik, indah dan nyaman didasarkan pada pandangan wisatawan.
5. Perencanaan yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi mempelajari kebijaksanaan dan peraturan yang ada dan studi yang pernah dilakukan terhadap wilayah perencanaan; membuat identifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitar dan dalam wilayah perencanaan Pantai Balekambang; membuat identifikasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai karakteristik dan kondisi obyek dan daya tarik wisata Pantai Balekambang; membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi serta potensi dan peluang pengembangan yang dimungkinkan; membuat identifikasi dan rencana teknik eksternal dan internal kawasan yang meliputi rencana eksternal kawasan dan rencana internal kawasan; membuat analisis makro dampak pengembangan kegiatan pariwisata yang meliputi analisis fisik atau analisis makro dampak lingkungan hidup, analisis dampak sosial, dan analisis dampak ekonomi; serta membuat penentuan aspek pengelolaan dan tahapan pelaksanaan rencana, yang meliputi prioritas pelaksanaan pembangunan, pentahapan pelaksanaan rencana Balekambang, arahan penanganan lingkungan, indikasi program dan proyek serta pendanaan, dan aspek kelembagaan dan hukum pembangunan.

6. Dengan berpedoman pada Rencana Teknik Kawasan Wisata Balekambang, pengembangan yang sudah dilaksanakan pada kawasan wisata Pantai Balekambang meliputi tahap 1 dan 2 yang sudah mulai berjalan. Pelaksanaan pengembangan tahap I mengembangkan jaringan jalan dengan pembukaan akses baru dibangun taman bermain dan kios sovenir, kantor pengelola dan gardu pandang. Sedangkan tahap II meliputi kelanjutan pengembangan jaringan jalan yang sudah dirintis pada tahap sebelumnya pelaksanaan pembangunan gardu pandang, pendopo, kios makanan, parkir, fasilitas penunjang, dan penginapan. Sedangkan pelaksanaan pengembangan untuk tahap III dan IV belum berjalan.
7. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengembangan internal dengan cara pembinaan tentang pentingnya pelayanan kepada pengunjung serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Tapi pelaksanaannya belum merata untuk pegawai di unit wisata Pantai Balekambang. Pegawai yang diikutsertakan hanya Kepala Unit Wisata Pantai Balekambang, dimana staf-staf yang berada dibawahnya belum ada yang pernah mengikuti diklat. Padahal, diklat kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bisa dikatakan sudah lengkap.
8. Upaya promosi dan pemasaran wisata Pantai Balekambang dilaksanakan dengan pembuatan buku, brosur dan pamflet tentang kepariwisataan Kabupaten Malang, bekerjasama dengan Departemen Pariwisata, hotel, *Tourist Information Service* (TIS), media cetak maupun elektronik untuk mempromosikan keindahan Pantai Balekambang. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengikuti even-even wisata

seperti pameran wisata, baik lokal maupun tingkat nasional dan membentuk Kelompok-Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah sekitar obyek wisata, dimana yang menjadi pedoman adalah terciptanya program Sapta Pesona. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga mengadakan pemilihan duta wisata untuk memperkenalkan obyek wisata yang ada di Kabupaten Malang dalam rangka mengundang wisatawan dan menggaet investor.

9. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang, faktor-faktor pendukung pengembangan adalah karakteristik obyek yang terdiri dari obyek wisata alam yang berupa daya tarik berupa pantai dengan segala keindahan alamnya dan byek wisata budaya yang berupa even-even tradisonal seperti upacara Jalanidhipuja dan upacara Suroan; dibukanya jalur Malang Selatan; peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar obyek wisata; UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, serta jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain meliputi keterbatasan dana, kondisi jalan menuju obyek yang rusak, belum adanya biro perjalanan yang bekerjasama dengan pihak pengelola, kurangnya investor, suasana yang kurang kondusif, faktor bencana alam, status tanahnya masih dikelola oleh Perhutani, serta air bersih di lokasi wisata belum memenuhi syarat.

B. Saran

1. Peningkatan jumlah wisatawan terjadi pada saat diadakannya even-even tradisional, seperti Upacara Suroan dan Jalanidhipuja dan pada saat lebaran. Oleh karena itu, pihak pengelola obyek wisata Pantai Balekambang perlu lebih meningkatkan pelayanan, sehingga jumlah wisatawan dapat terus meningkat.
2. Promosi hendaknya lebih ditambah frekuensinya menjadi dua kali dalam sebulan, karena selama ini promosi untuk obyek wisata Pantai Balekambang dinilai kurang. Perencanaan strategi promosi yang tepat perlu dilaksanakan, sehingga masyarakat lebih mengenal obyek wisata dan akhirnya tertarik untuk mengunjungi obyek.
3. Pembenahan terhadap aksesibilitas jalan yang rusak antara Gondanglegi – Balekambang, karena jalan merupakan sarana dan prasarana yang vital dalam mendukung pengembangan yang dilaksanakan. Hal ini dapat ditempuh dengan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga. Karena jika dibiarkan, akan mengganggu wisatawan yang berkunjung, sehingga wisatawan enggan kembali ke Balekambang dengan alasan jalan yang kurang baik.
4. Pemerintah hendaknya semakin giat dalam mencari investor yang mau untuk diajak bekerjasama dalam mengelola pantai wisata Balekambang dengan menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Usaha ini hendaknya disertai dengan kemauan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam hal perizinan. Dengan adanya

investor, beban yang ditanggung akan semakin berkurang, sehingga masalah terbatasnya dana yang dihadapi dapat sedikit teratasi.

5. Pihak Jasa Yasa seharusnya lebih memperhatikan pentingnya kerjasama dengan biro perjalanan yang ada sekarang ini, mengingat keberadaannya sangat vital dibutuhkan, karena mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan bagi para wisatawan.
6. Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian untuk memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat sekitar obyek dalam hal pembuatan cinderamata, karena selama ini cinderamata yang dijual di Pantai Balekambang masih didatangkan dari tempat lain, yaitu dari Pasir Putih, Situbondo.
7. Peningkatan sarana dan prasarana wisata dari segi kualitas maupun kuantitas hendaknya dilakukan secara terus-menerus, terutama perlu adanya sarana pengamanan pengunjung yang berupa perahu, karena selama ini bila ada wisatawan yang terbawa arus masih meminta pertolongan dari nelayan di Kondangmerak.
8. Peningkatan kebersihan di kawasan wisata Pantai Balekambang juga harus diperhatikan. Pihak pengelola unit wisata hendaknya menggerakkan para pegawai atau staf yang ada untuk membersihkan areal di dalam kawasan wisata dan menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang mencukupi. Dengan dilaksanakannya hal tersebut, diharapkan lokasi obyek wisata dapat terjaga kebersihannya, sehingga wisatawan yang berkunjung merasa nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE-YKPN.
- Badan Perencanaan Kabupaten Malang. 2005. *Hasil-Hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2003-2005*.
- Badan Perencanaan Kabupaten Malang. 2005. *Data Potensi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gondanglegi dan Sekitarnya (meliputi : Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran dan Gondanglegi)*.
- Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang. 2005. *Panduan Pariwisata Kabupaten Malang*. Malang : Pemerintah Kabupaten Malang.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta : UI Press.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jayadinata, Johara T. 1992. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah Bahari*. Bandung : ITB.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Milles, Matthew B. dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1995. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Talidzuhu. 1993. *Pembangunan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.

Noor, Irwan. 1991. *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang : PPIS Unibraw.

Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta : Bina aksara.

Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Riyadi dan Bratakusumah, Dedy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Ross, Glen F. *Psikologi Pariwisata*.

Saurianto. 2004. *Kepariwisata Kabupaten Malang*. Malang : Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Sjafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung : Mandar Maju.

Spillane, James J. 1991. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.

Syahroni, 2001. *Pengertian Dasar dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Visi Perencana Vol. 1 No 1, Oktober 2001. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

-----, 2002. *Pengertian Dasar dan Generik tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*. Makalah Diskusi GTZ – SfDM No 2/2002.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gunung Agung.

Wahab, Salah. 1992. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Yoeti, Oka A. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

-----, 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang **Kepariwisataan**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2005 tentang *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006*.

Instruksi Presiden No 9 Tahun 1969 tentang *Pengembangan Kepariwisataani*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 Tahun 1996 tentang *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 1994/1995-2004/2005*.

Lampiran Peraturan Daerah No 20 Tahun 1997 tentang *Rencana Teknik Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Balekambang dan Ngliyep Tahun 1995/1996-2005/2006*.

Artikel

Anonymous. 2006. *Garap Sendangbiru Rp 40 Miliar*. Surya 8 Maret 2006 : 13.

----- . 2006. *Sektor Pariwisata Digerajok Rp 200 Juta*. Radar Malang 15 Maret 2006 : 32.

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)**A. Wawancara untuk Badan Perencanaan Kabupaten Malang :**

- 1) Bagaimana tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang?
- 2) Bagaimanakah peran Badan Perencanaan dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai Balekambang?
- 3) Apakah dalam perencanaan pengembangan yang dilakukan sudah melibatkan investor?

B. Wawancara untuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang :

- 1) Bagaimana upaya promosi dan pemasaran obyek wisata yang selama ini telah dilakukan?
- 2) Apakah program pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang mempunyai manfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar obyek?
- 3) Bagaimanakah pelaksanaan diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan?
- 4) Bagaimanakah cara yang dilaksanakan dalam mempromosikan Pantai Balekambang?

C. Wawancara untuk Sub Unit Wisata Pantai Balekambang pada Perusahaan Daerah

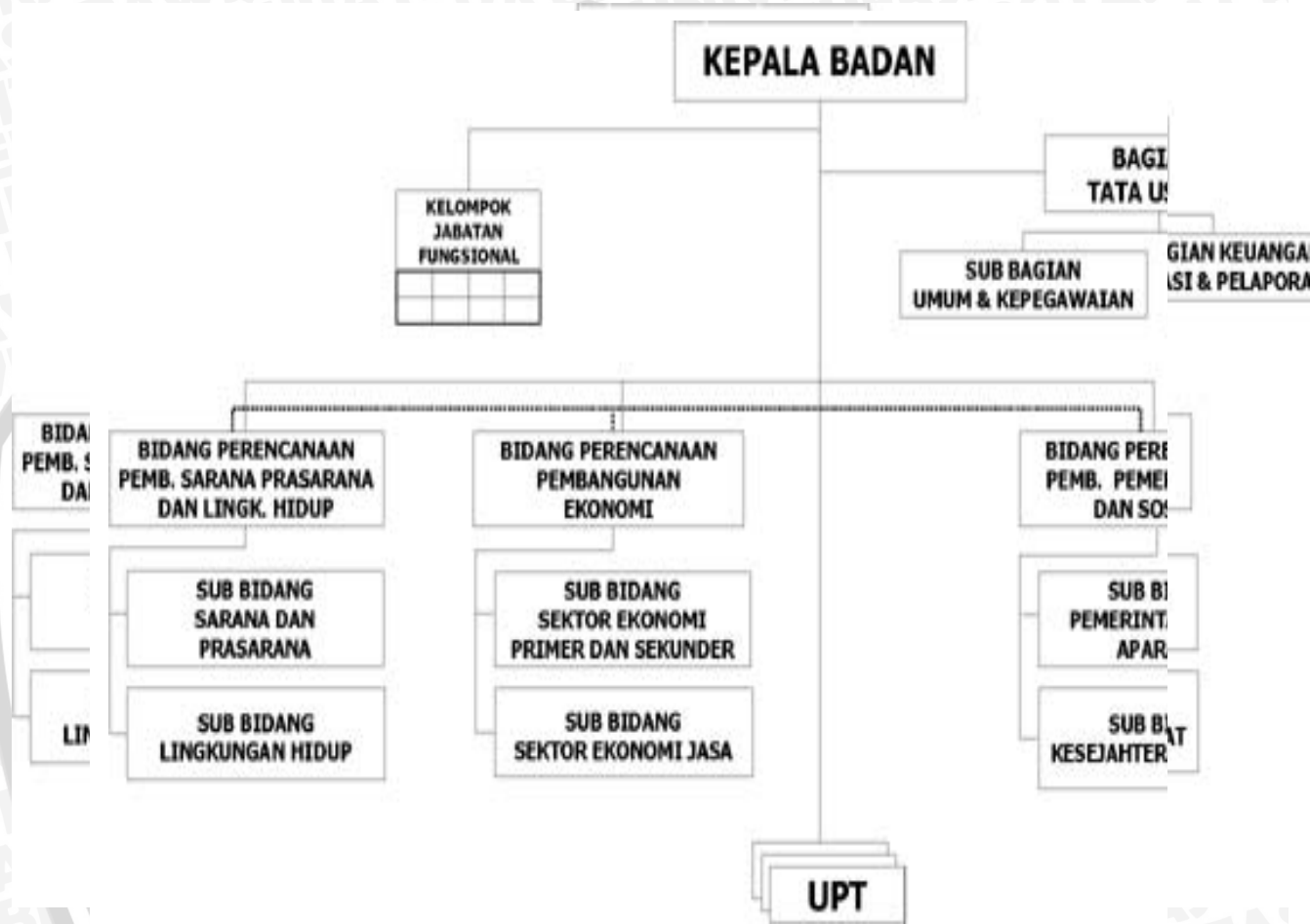
Jasa Yasa Kabupaten Malang :

- 1) Apa saja jenis wisata yang ada di kawasan wisata Pantai Balekambang?
- 2) Bagaimana pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pariwisata?
- 4) Bagaimana cara yang ditempuh dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pada unit wisata Pantai Balekambang?
- 5) Apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam upaya promosi dan pemasaran obyek wisata Pantai Balekambang?
- 6) Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pengembangan kawasan wisata Pantai Balekambang?
- 7) Bagaimanakah jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Balekambang?
- 8) Adakah biro perjalanan yang bekerjasama dengan pihak pengelola pantai Balekambang?
- 9) Dengan adanya bencana alam seperti tsunami, apakah juga mempengaruhi wisatawan yang berkunjung?

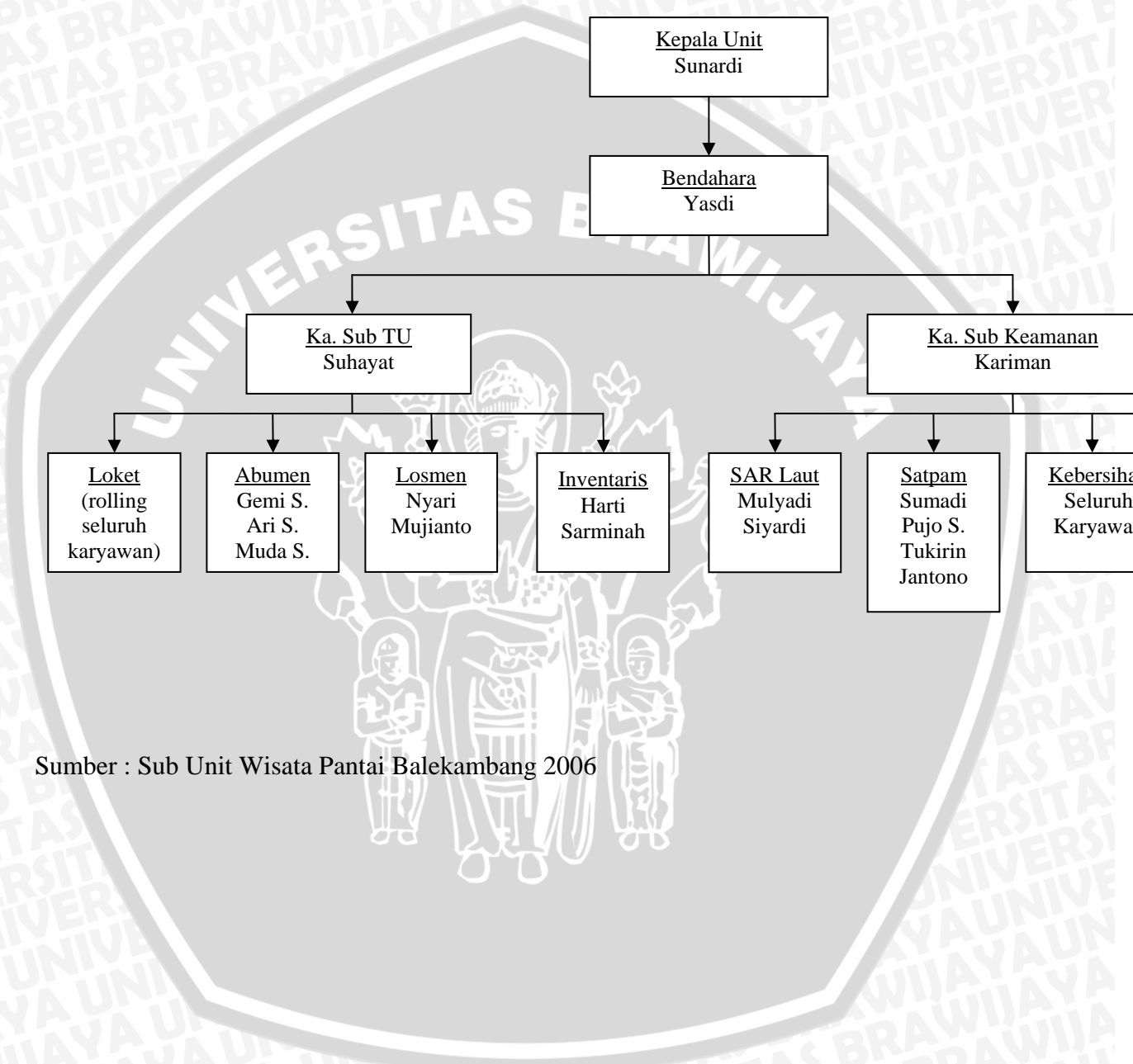
D. Wawancara untuk masyarakat sekitar kawasan wisata Pantai Balekambang

- 1) Apakah dengan adanya pengembangan yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Balekambang ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan?

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN KABUPATEN MALANG



Struktur Organisasi Sub Unit Wisata Pantai Balekambang



Sumber : Sub Unit Wisata Pantai Balekambang 2006

FOTO OBYEK WISATA PANTAI BALEKAMBANG



Pantai Balekambang



Panorama di Pulau Ismoyo



Sunset di Pantai Balekambang



Larung Sesaji 1 Suro di Pulau Hanoman



Upacara Jalanidhipuja Masyarakat Hindu Dharma



Larung Jolan-Jolen Pada Saat Upacara Jalanidhipuja



CURRICULUM VITAE

- Nama : Desy Vita Fitrianingrum
NIM : 0210310023
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 30 Juni 1984
Agama : Islam
Alamat/No Telp :
1) Alamat Asal : Ketoyan RT 03 RW 01 Wonosegoro, Boyolali
Jawa Tengah 57382 – Telp. 081 334 770078
2) Alamat di Malang : Jl. Kertosentono 135 Malang 65145 –
Telp. (0341) 564872
Pendidikan Formal :
1) TK Bustanul Athfal Ketoyan (Tamat Tahun 1991)
2) SDN I Ketoyan (Tamat Tahun 1996)
3) SMPN I Boyolali (Tamat Tahun 1999)
4) SMUN I Boyolali (Tamat Tahun 2002)
5) Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi
Pembangunan Universitas Brawijaya Malang (Tamat Tahun 2006)
Pengalaman Organisasi :
1) Anggota KOPMA Universitas Brawijaya
2) Staf Humas Internal Badan Eksekutif Mahasiswa FIA Universitas Brawijaya Periode
2004/2005
Pengalaman Kepanitiaan :
1) Panitia Ospek Jurusan Administrasi Publik (KIRANA I) di Coban Rondo Tahun 2003
2) Panitia Seminar dan Lokakarya Nasional Persatuan Nasional Mahasiswa Administrasi
Wilayah VI (Jatim, Bali, NTB, NTT) FIA di Batu, Malang Tahun 2004
3) Panitia Ospek Fakultas Ilmu Administrasi (GENERASI) Tahun 2004
4) Panitia Ospek Jurusan Administrasi Publik (KIRANA II) di Coban Rondo Tahun 2004



